



Katalog BPS: 2102003



ESTIMASI PARAMETER DEMOGRAFI: Tren Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi

Hasil Sensus Penduduk 2010



BADAN PUSAT STATISTIK



ESTIMASI PARAMETER DEMOGRAFI: Tren Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi

Hasil Sensus Penduduk 2010

Estimasi Parameter Demografi: Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil SP2010

ISSN: 2302-8521

No. Publikasi: 04110.1203

Katalog BPS: 2201003

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: 124 halaman

Naskah:

Subdirektorat Demografi

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

**ORGANISASI PENYUSUNAN PUBLIKASI
ESTIMASI FERTILITAS, MORTALITAS DAN MIGRASI**

PENANGGUNG JAWAB UMUM : Drs. Razali Ritonga, MA

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : Ir. Thoman Pardosi, SE, M.Si

PENULIS : 1. Sri Wahyuni, S.ST, SE, M.Si
2. Nuraini, S.ST

EDITOR : Dendi Handiyatmo, SST, M.Si

PENGOLAH DATA : 1. Ari Purbowati, S.Si
2. Yogo Aryo Jatmiko, S.ST

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kebutuhan data statistik kependudukan khususnya angka kelahiran, kematian dan migrasi, sangat diperlukan untuk evaluasi program pembangunan. Indikator ini untuk memetakan karakteristik demografi suatu wilayah. Angka kelahiran, kematian dan migrasi ini juga sangat dibutuhkan untuk keperluan input proyeksi penduduk. Mengingat data tersebut belum dapat diharapkan dari sistem registrasi penduduk, maka untuk pemenuhan kebutuhan datanya digunakan hasil sensus dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan estimasi angka kelahiran, kematian dan migrasi penduduk baik untuk angka nasional maupun provinsi, yang dihitung berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Estimasi dilakukan dengan berbagai metode tidak langsung dengan menggunakan asumsi tertentu. Untuk melihat perkembangan nilai-nilai estimasi dari tahun-tahun yang lalu sampai dengan data terbaru, maka dalam publikasi ini disajikan juga estimasi angka kelahiran, kematian dan migrasi berdasarkan SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga publikasi “Estimasi Parameter Demografi : Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Sensus Penduduk 2010” dapat disajikan. Terimakasih juga kepada para pemerhati masalah kependudukan maupun bagi para perencana pembangunan atau pengambil keputusan khususnya dibidang kependudukan di tingkat daerah maupun pusat yang memanfaatkan informasi ini dalam merumuskan kebijakan berwawasan kependudukan. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan pada masa yang akan datang.

Jakarta, September 2012
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
A. FERTILITAS	1
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
II. METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.1.1 Sensus Penduduk 1971 (SP71)	7
2.1.2 Survei Penduduk Antar Sensus 1976 (SUPAS76)	7
2.1.3 Sensus Penduduk 1980 (SP80)	8
2.1.4 Survei Penduduk Antar Sensus 1985 (SUPAS85)	8
2.1.5 Sensus Penduduk 1990 (SP90)	8
2.1.6 Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987 dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991, 1994, dan 1997	9
2.1.7 Survei Penduduk Antar Sensus 1995 (SUPAS95)	12
2.1.8 Sensus Penduduk 2000 (SP2000)	13
2.1.9 Survei Penduduk Antar Sensus 2005 (SUPAS05)	13
2.1.10 Sensus Penduduk 2010 (SP2010)	14

2.2	Metode Estimasi Fertilitas	14
2.2.1	Metode Anak Kandung	15
2.2.2	Metode Rele	15
2.2.3	Metode Palmore	16
2.2.4	Metode Guna Sekaran-Palmore	17
2.3	Indeks Coale	17
III.	TREN TINGKAT FERTILITAS	19
3.1	Estimasi Level Kematian	19
3.2	Tren Fertilitas Indonesia	19
3.3	Tren Fertilitas Antar Provinsi	23
3.4	Indeks Coale	27
IV.	KESIMPULAN	31
	DAFTAR PUSTAKA	35
	LAMPIRAN A	39

B. MORTALITAS	45
V. PENDAHULUAN	47
5.1 Latar Belakang	47
5.2 Tujuan Penulisan	48
5.3 Sistematika Penulisan	49
VI. ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA SEBELUM DEKADE 1970-AN	51
VII. METODOLOGI	55
7.1 Sumber Data	55
7.2 Metode yang Digunakan	56
7.2.1 Metode Brass	58
7.2.2 Metode Sullivan	58
7.2.3 Metode Trusell	58
7.2.4 Metode Feeney	59
7.3 Keterbatasan	61
VIII. TREN KEMATIAN BAYI DI INDONESIA	61
8.1 Angka Kematian Bayi menurut Beberapa Metode	61
8.2 Tren Angka Kematian Bayi di Indonesia	62
8.3 Tren Angka Kematian Bayi menurut Provinsi	64
8.4 Tren Level Mortalitas Indonesia dan Provinsi	66
8.5 Tren Angka Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi	68
IX. KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN B	77

C. MIGRASI	81
X. PENDAHULUAN	83
10.1 Latar Belakang dan Permasalahan	83
10.2 Tujuan Penulisan	87
10.3 Sistematika Penulisan	87
XI. DATA DAN METODOLOGI	89
11.1 Sumber Data	89
11.2 Konsep dan Definisi	90
11.2.1 Migran Semasa Hidup	91
11.2.2 Migran Risen	91
XII. POLA DAN ARUS MIGRASI	93
12.1 Migrasi Seumur Hidup	93
12.1.1 Migrasi Seumur Hidup Antar Pulau	93
12.1.2 Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi	96
12.2 Migrasi Lima Tahun yang Lalu	102
12.2.1 Migrasi Lima Tahun yang Lalu Antar Pulau	102
12.2.2 Migrasi Lima Tahun yang Lalu Antar Provinsi	104
XIII. KESIMPULAN	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Estimasi Angka Kelahiran Total menurut Metode Estimasi dan Sumber Data, Indonesia SP1971-2010	20
Tabel 3.2	Estimasi Angka Kelahiran Total dengan Menggunakan Metode Anak Kandung, Indonesia, 1968-2007	21
Tabel 3.3	Perkembangan Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu Tahun 1971-2005.....	22
Tabel 3.4	Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Provinsi Berdasarkan Metode Anak Kandung, 1971-2005	25
Tabel 3.5	Persentase Wanita Berstatus Kawin menurut Provinsi dan Pemakaian Alat/Cara KB, 1991-2007	26
Tabel 3.6	Indeks Fertilitas Coale menurut Provinsi dan Sumber Data, Tahun 1971-2005	28
Tabel 3.7	Persentase Penurunan Indeks Fertilitas Coale per Provinsi Tahun 1971-2005	30
Tabel Lampiran A.1	Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Provinsi Berdasarkan Metode Anak Kandung, Tahun 1971-2010	41
Tabel Lampiran A.2	Angka Kelahiran menurut Umur Ibu dan Angka Kelahiran Total menurut Provinsi Tahun 1971-2010 (Perkotaan+Perdesaan)	42
Tabel 8.1	Estimasi Angka Kematian Bayi dari Beberapa Metode Hasil SP1980-SP2010	62
Tabel 8.2	Estimasi Angka Kematian Bayi (IMR) per 1000 Kelahiran Hidup menurut Provinsi Hasil SP1971-SP2010.....	63
Tabel 8.3	Estimasi Level Mortalitas menurut Provinsi, Hasil SP1971-SP2010	67
Tabel 8.4	Estimasi Angka Harapan Hidup Waktu Lahir menurut Provinsi, Hasil SP1971-SP2010	69
Tabel Lampiran B	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Hasil SP1971-SP2010	79
Tabel 10.1	Distribusi Penduduk Indonesia per Pulau Tahun 1930, 1961, 1971, 1980, 1985, 1990, 2000 dan 2010	84
Tabel 11.1	Pertanyaan Mengenai Migrasi Penduduk pada Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010	90
Tabel 11.2	Migran dan Bukan Migran Berdasarkan Kedua Pertanyaan dalam SP2010..	91

Tabel 12.1	Persentase Migran Keluar Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010	95
Tabel 12.2	Persentase Migran Masuk Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.....	96
Tabel 12.3	Migrasi Seumur Hidup 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010	101
Tabel 12.4	Persentase Migran Keluar Lima Tahun yang Lalu menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1980, 1990, 2000 dan 2010	103
Tabel 12.5	Persentase Migran Masuk Lima Tahun yang Lalu menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010	104
Tabel 12.6	Migrasi Lima Tahun yang Lalu 1980, 1990, 2000, dan 2010	106

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Estimasi Angka Kelahiran Total menurut Metode Estimasi dan Sumber Data, Indonesia, 1971-2010 20
Gambar 3.2	Angka Kelahiran menurut Umur Ibu Tahun 1971-2010..... 23

<http://www.bps.go.id>

A. FERTILITAS

<http://www.bp.go.id>

<http://www.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang berhasil menurunkan tingkat fertilitas dengan cepat. Sejak ditandatanganinya deklarasi mengenai kependudukan oleh para pemimpin dunia pada tahun 1967, perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan sudah mulai terlihat. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang harus ditanggulangi, karena akan mengecilkkan arti pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk melaksanakan kebijaksanaan kependudukan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program, termasuk program pengendalian penduduk yang merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas penduduk.

Kemudian kebijaksanaan kependudukan tidak hanya ditujukan pada penurunan tingkat fertilitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. GBHN 1993 dan UU Nomor 10 tahun 1992 memperluas tujuan program KB dengan mencakup masalah sosial, penundaan usia perkawinan, mengatur kehamilan, meningkatkan kebahagiaan keluarga dan mengembangkan kesejahteraan keluarga.

Penurunan tingkat fertilitas di Indonesia telah berlangsung cukup lama, dan saat ini berada pada porsi yang cukup rendah. Posisi ini menunjukkan pelaku usaha yang lebih untuk mempertahankan ataupun menurunkannya. Konferensi Internasional tentang penduduk dan pembangunan 2009 turut merekomendasikan tidak lagi berfokus pada pengendalian penduduk tetapi bagaimana penduduk mengatur dirinya untuk bereproduksi. Orientasi semula manusia merupakan objek dalam upaya pengendalian penduduk sekarang manusia sebagai subjek. Paradigma ini tentunya akan merubah pola fertilitas Indonesia mendatang.

Seperti halnya dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, umumnya data kependudukan di Indonesia masih belum sempurna. Registrasi vital kependudukan yang sangat penting sebagai dasar berbagai penelitian kependudukan termasuk data tentang kelahiran yang sangat berpengaruh dalam penyusunan perencanaan bidang kependudukan dirasakan masih jauh dari sempurna.

Ketidaksempurnaan kualitas data tentang kelahiran ini mungkin disebabkan oleh karena kurangnya perhatian dan kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya data kelahiran. Hal ini tercermin dari ketidaksempurnaan data registrasi vital penduduk hampir di semua daerah/provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari registrasi vital kependudukan belum dapat menggambarkan keadaan kelahiran penduduk sesungguhnya. Sehubungan dengan keterbatasan data yang ada, telah banyak dikembangkan metode perkiraan fertilitas oleh para ahli yang ternyata sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai alat untuk memperkirakan keadaan kelahiran, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

Bagi Indonesia, data yang dikumpulkan dalam sensus penduduk dan survei kependudukan membuka kesempatan untuk mengaplikasikan beberapa teknik perkiraan fertilitas. Pertanyaan tentang banyaknya anak yang lahir hidup dan masih hidup memberikan informasi mengenai tingkat fertilitas kumulatif dan kelangsungan hidup anak. Tahun kelahiran anak terakhir dan informasi apakah anak itu masih hidup waktu wawancara merupakan tambahan informasi untuk memperkirakan fertilitas. Para ahli kependudukan telah memanfaatkan informasi tersebut untuk memperkirakan fertilitas. Mamas (1983) menggunakan metode anak kandung, sedangkan Hull dan Dasvarma (1984) mencoba metode tahun kelahiran anak terakhir (*Last Live Birth*) untuk memperoleh perkiraan fertilitas pada tahun sensus.

Berdasarkan hasil perkiraan fertilitas dengan menggunakan berbagai metode juga menunjukkan adanya penurunan fertilitas, namun demikian masing-masing memberikan angka estimasi yang berbeda (Mamas dkk., 1991). Hal ini dapat dimengerti karena masing-masing metode menggunakan teknik dan asumsi yang berbeda. Dengan telah tersedianya data hasil SP2010, menarik untuk diketahui perbedaan tingkat fertilitas dari masing-masing metode tersebut, disamping untuk mengetahui kecenderungan tren penurunan fertilitas selama periode 1968-2007 berdasarkan hasil SP1971 sampai dengan SP2010.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan perkembangan tingkat fertilitas baik secara nasional maupun provinsi selama periode 1968-2007, dan secara khusus akan melihat perkembangan tingkat fertilitas di Indonesia pada periode tersebut menggunakan berbagai metode estimasi. Secara rinci tujuan tulisan ini adalah: pertama menyajikan penghitungan tingkat

fertilitas dengan menggunakan beberapa metode estimasi, kedua memberi gambaran mengenai kecenderungan perkembangan tingkat fertilitas di Indonesia selama periode 1968-2007, ketiga menunjukkan perbedaan (*diferensial*) tingkat fertilitas antar provinsi dan perkembangannya selama periode 1968-2007.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan estimasi tingkat fertilitas dalam buku ini akan dibagi dalam beberapa bab. Bab I menyajikan latar belakang dan tujuan penulisan. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam mengestimasi tingkat kelahiran, termasuk sumber data yang digunakan. Bab III membahas pola perkembangan tingkat fertilitas selama periode 1968-2007. Bab terakhir menyajikan kesimpulan.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

II. METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan data primer hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Disamping itu, dalam pembahasan perkembangan fertilitas digunakan data hasil Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000 serta hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005 yang telah dipublikasikan oleh BPS. Kemudian secara lebih lengkap, dalam lampiran disajikan juga hasil SUPAS 1976, 1985, 1995 dan 2005, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1991, 1994, 1997, 2002/2003 dan 2007. Berikut akan diuraikan berbagai sumber data yang akan digunakan.

2.1.1 Sensus Penduduk 1971 (SP71)

Sensus Penduduk 1971 (SP71) dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah listing rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan Juli 1971 sehubungan dengan pencatatan penduduk untuk keperluan pemilihan umum tahun 1971. Tahap kedua merupakan pencacahan lengkap mengumpulkan keterangan umum tentang umur, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Tahap ketiga adalah pencacahan sampel dengan fraksi sampling 3,8 persen dari seluruh jumlah rumah tangga, yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan perseorangan maupun rumah tangga. Sensus mencakup semua provinsi (26 provinsi) wilayah Republik Indonesia.

2.1.2 Survei Penduduk Antar Sensus 1976 (SUPAS76)

Kegiatan SUPAS76 meliputi tiga tahap dan dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik. Tahap pertama (SUPAS I) mengumpulkan keterangan dasar tentang komposisi dan banyaknya rumah tangga dari sampel terpilih. Tahap kedua (SUPAS II) mengumpulkan keterangan rinci tentang keterangan demografi dan sosial ekonomi sub sampel tertentu dari sampel keseluruhan yang meliputi semua daerah. Jenis keterangan yang dikumpulkan dalam SUPAS II termasuk karakteristik ekonomi dari rumah tangga dan anggotanya, status perkawinan, perceraian, pengalaman kelahiran, keinginan untuk mempunyai anak tambahan, pengetahuan dan praktek KB, dan perpindahan penduduk.

Tahap terakhir disebut Survei Fertilitas Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

dalam survei ini bersumber dari kelompok pertanyaan seperti yang terdapat dalam Survei Fertilitas Dunia (*World Fertility Survei*). Daerah liputan survei hanya Jawa dan Bali dan mencakup 10.000 rumah tangga yang dipilih dari listing tahap pertama.

2.1.3 Sensus Penduduk 1980 (SP80)

Penyelenggaraan SP80 sepenuhnya mengikuti pola SP71, dengan pencacahan lengkap dan sampel. Aktivitas SP80 berlangsung selama bulan September-Oktober 1980 dan mencakup 27 provinsi di seluruh Indonesia. Ada dua cara yang dilakukan dalam pengumpulan datanya. Cara pertama adalah pencacahan lengkap terhadap seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia, dan keterangan yang dikumpulkan bersifat sangat mendasar seperti jenis kelamin dan kewarganegaraan. Cara kedua adalah pencacahan sampel sekitar 5 persen dari jumlah rumah tangga, dan keterangan yang dikumpulkan lebih rinci seperti kelahiran, migrasi, perkawinan dan tempat tinggal.

2.1.4 Survei Penduduk Antar Sensus 1985 (SUPAS85)

Kegiatan SUPAS85 berlangsung di seluruh wilayah Republik Indonesia pada bulan Oktober-Desember 1985. Sampel SUPAS85 diperoleh dari kerangka SP80 atau sekitar 20 persen dari total keseluruhan rumah tangga dengan menggunakan 5 persen kerangka sampel SP80. Data yang dikumpulkan dalam SUPAS85, antara lain umur, jenis kelamin, angkatan kerja, perkawinan, kelahiran, dan keluarga berencana. SUPAS85 dirancang untuk mampu melakukan perkiraan karakteristik perseorangan dan rumah tangga hingga tingkat desa-kota, disamping tingkat provinsi.

2.1.5 Sensus Penduduk 1990 (SP90)

Sensus Penduduk 1990 (SP1990) dilaksanakan pada bulan Oktober 1990. Pola penyelenggaraan SP90 mengikuti pola SP80. Sensus Penduduk 1990 mencakup 27 provinsi di seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan dalam daftar kuesioner SP90 tidak banyak berbeda dengan kuesioner SP80. Ukuran sampel yang digunakan adalah sekitar 5 persen dari seluruh rumah tangga. Berbeda dengan SP80 yang menggunakan ukuran sampel sama untuk setiap kabupaten/kotamadya, ukuran sampel pada SP90 bervariasi antar kabupaten/kotamadya dengan

tujuan agar dapat menyajikan tingkat kabupaten/kotamadya. Pemilihan sampel dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan wilayah pencacahan (wilcah) secara sistematis. Tahap kedua adalah pemilihan rumah tangga, yang dibedakan menurut rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Selanjutnya, rumah tangga biasa dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan, sedangkan rumah tangga khusus dilakukan pemilihan langsung.

2.1.6 Survei Penduduk Antar Sensus 1995 (SUPAS95)

Pelaksanaan SUPAS95 dilakukan pada bulan September-Oktober 1995, meliputi seluruh kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. SUPAS95 dirancang khusus untuk mendapatkan data statistik kependudukan yang dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 1990 dengan jumlah sampel sebesar 206.000 rumah tangga.

Data yang dikumpulkan dalam SUPAS95 meliputi bidang demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pada bidang demografi himpunan data terinci mengenai migrasi, fertilitas dan mortalitas, termasuk riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin. Keterangan yang dihimpun di bidang ketenagakerjaan mencakup angkatan kerja, jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Sosial budaya mencakup partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, bahasa, dan kondisi tempat tinggal.

2.1.7 Sensus Penduduk 2000 (SP2000)

Pelaksanaan SP2000 dilakukan pada bulan Juni 2000, meliputi seluruh wilayah teritorial Indonesia. Seperti pada Sensus Penduduk 1961, Sensus Penduduk 2000 dilaksanakan satu tahap, yaitu pencacahan lengkap. Ini berarti cakupan SP2000 meliputi seluruh penduduk Indonesia. SP2000 dirancang khusus untuk mendapatkan data statistik kependudukan sampai wilayah terkecil. Dengan demikian kebutuhan konsumen data kependudukan baik pemerintah maupun masyarakat luas dapat dipenuhi sampai wilayah administrasi terkecil.

Data yang dikumpulkan dalam SP2000 meliputi bidang demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pada bidang demografi himpunan data terinci mengenai migrasi, fertilitas dan mortalitas. Keterangan yang dihimpun di bidang ketenagakerjaan mencakup angkatan kerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan. Sosial budaya mencakup agama, kewarganegaraan/suku bangsa, dan tingkat pendidikan.

2.1.8 Survei Penduduk Antar Sensus 2005 (SUPAS05)

Pelaksanaan lapangan SUPAS05 dilakukan pada bulan Juni 2005, meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 30 provinsi dan 440 kabupaten/kota, tidak termasuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Parameter demografi untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disajikan dari proyeksi penduduk Indonesia 2000-2025. SUPAS05 dirancang khusus untuk mendapatkan data statistik kependudukan yang dapat dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2000.

SUPAS05 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran semua rumah tangga yang bertempat tinggal dalam 16.709 blok sensus terpilih. Keterangan yang dikumpulkan dalam tahap ini adalah keterangan mengenai rumah tangga dan anggota rumah tangga menurut jenis kelamin. Tahap kedua adalah wawancara terhadap 267.344 rumah tangga terpilih secara sistematis dari seluruh rumah tangga yang terdaftar pada tahap pertama. Keterangan yang dikumpulkan dalam tahap ini meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin. Keterangan yang dihimpun di bidang ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Data sosial budaya mencakup partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia (lansia). SUPAS05 juga mencakup pelaporan kejadian vital kelahiran, kematian, dan perpindahan.

2.1.9 Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

SP2010 dilaksanakan secara serentak pada Mei tahun 2010 yaitu dilaksanakannya pendaftaran bangunan dan rumah tangga dan pencacahan lengkap seluruh penduduk. Keterangan yang dikumpulkan mencakup keterangan mengenai nama ART, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, agama, kecacatan (*functional disability*), suku bangsa, bahasa, migrasi, pendidikan, status perkawinan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan fasilitas perumahan.

Kegiatan lapangan SP2010 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Indonesia kondisi November 2009, meliputi: 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan, dan 77.126 desa/kelurahan. Selain di dalam wilayah geografis, juga dilakukan sensus terhadap duta besar atau diplomat perwakilan RI di luar negeri dengan pendataan melalui *e-census* (email dan

website).

2.1.10 Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991, 1994, 1997, 2002-2003 dan 2007

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987 (SPI87) dilaksanakan pada tahun 1987 di 20 provinsi dari 27 provinsi di Indonesia, sebagai bagian I dari pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). SPI87 tidak mencakup pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan, karena Biro Pusat Statistik pada tahun yang sama telah mengumpulkan informasi tersebut melalui SUSENAS 1987. Ukuran sampel yang digunakan dalam SPI87 adalah 14.141 rumah tangga yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991 (SDKI91) merupakan bagian survei ke dua tentang kondisi demografi dan kesehatan Indonesia yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. SDKI91 dilakukan oleh Biro Pusat Statistik bekerja sama dengan BKKBN dan Departemen Kesehatan, dengan biaya berasal dari IRD, Westinghouse, USAID/Jakarta dan UNFPA/Jakarta.

Ada dua jenis daftar yang digunakan dalam pengumpulan data SDKI91. Pertama adalah daftar rumah tangga yang digunakan untuk mendaftarkan semua anggota rumah tangga dan keterangan-keterangan dasar mereka. Keterangan yang dikumpulkan pada daftar ini memberikan dasar perhitungan untuk memperoleh ukuran (rate) dan untuk dapat menunjuk diwawancarai secara individu seorang wanita harus berstatus kawin atau pernah kawin dan berumur 15-49 tahun. Daftar pertanyaan kedua digunakan pada wawancara individu dengan setiap responden yang terpilih dalam rumah tangga. Daftar ini mengumpulkan keterangan dalam berbagai bidang, yaitu: latar belakang responden, perilaku dan keinginan reproduksi, pengetahuan dan pemakaian kontrasepsi, penyediaan alat kontrasepsi, pemberian air susu ibu, imunisasi dan kesehatan.

Ukuran sampel yang digunakan adalah 28.000 rumah tangga yang terbagi atas 1.500 hingga 2.000 rumah tangga di setiap provinsi Jawa-Bali, 1.000 rumah tangga di setiap provinsi luar Jawa-Bali I dan 500 rumah tangga di luar Jawa-Bali II. Pemilihan sampel dilakukan secara dua tahap, tahap pertama memilih wilayah secara sistematis dan tahap kedua memilih rumah tangga dari wilayah terpilih.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994 (SDKI94) merupakan survei yang ketiga kali tentang kondisi demografi dan kesehatan Indonesia, yang dilakukan sebagai bagian dari proyek internasional survei demografi dan kesehatan (*Demographic and Health Surveys/IDHS*). Tujuan utama SDKI94 adalah untuk menyediakan data tentang fertilitas, kematian bayi dan anak, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak. Selain itu untuk pertama kali SDKI94 mengumpulkan data tentang kematian maternal, pengetahuan tentang AIDS dan ketersediaan pelayanan KB dan kesehatan. SDKI94 diselenggarakan sebagai hasil kerjasama Biro Pusat Statistik (BPS), Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Departemen Kesehatan (DEPKES). Macro International Inc. (MI) dalam proyek DHS menyediakan dana dan bantuan teknis melalui kerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID). Sebagian besar biaya pelaksanaan survei disediakan oleh Bank Dunia, Pemerintah Indonesia dan USAID Jakarta.

SDKI94 menggunakan empat daftar pertanyaan; tiga daftar pertanyaan untuk rumah tangga dan satu daftar pertanyaan untuk tingkat wilayah. Tiga daftar pertanyaan yang digunakan pada tingkat rumah tangga terdiri dari daftar rumah tangga, daftar perseorangan, dan daftar pengeluaran rumah tangga. Daftar pertanyaan rumah tangga dan daftar perseorangan dirancang mengikuti model "A" daftar pertanyaan dari DHS yang dirancang untuk negara-negara yang prevalensi KB-nya tinggi. Topik yang dicakup dalam SDKI94 tetapi tidak tercakup pada SDKI91 adalah pengetahuan wanita tentang AIDS dan kematian maternal. Sebanyak 33.738 rumah tangga dan 28.168 wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun diwawancarai dalam SDKI94.

Pada tahun 1997 dilakukan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997 (SDKI97), yang merupakan survei tentang kondisi demografi dan kesehatan Indonesia yang keempat kalinya sebagai bagian bagian dari proyek *Demographic and Health Surveys* (DHS). Pertanyaan-pertanyaan pada SDKI97 tidak berbeda dengan SDKI94. Sama halnya dengan SDKI94, tujuan utama SDKI97 adalah untuk menyediakan data tentang fertilitas, kematian bayi dan anak, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, termasuk juga data tentang kematian maternal, pengetahuan tentang AIDS dan ketersediaan pelayanan KB dan kesehatan. Jumlah rumah tangga dan wanita pernah kawin umur 15-49 yang diwawancarai dalam SDKI97 lebih banyak dibandingkan SDKI94, yaitu sebanyak 34.255 rumah tangga dan 28.810 wanita pernah kawin.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003 (SDKI02) merupakan survei yang kelima mengenai kondisi demografi dan kesehatan di Indonesia, yang dilakukan sebagai bagian dari proyek *Demographic and Health Surveys* (DHS). SDKI02 dirancang bersama-sama oleh empat institusi: Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan (DEPKES), dan ORC Macro. Hampir seluruh biaya survei ini disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pinjaman dari Bank Dunia. *United States Agency for International Development* (USAID) menyediakan dana tambahan untuk pelaksanaan survei di tiga provinsi baru (Provinsi Bangka Belitung, Banten dan Gorontalo) dan bantuan teknis melalui ORC Macro. BPS bertanggung jawab melaksanakan survei, termasuk merancang survei, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan data. SDKI 2002-2003 dilaksanakan di 26 provinsi di Indonesia yang meliputi daerah perkotaan dan perdesaan. Karena alasan keamanan, empat provinsi lainnya yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, dan Papua tidak dicakup dalam kegiatan survei ini. Sebanyak 28.867 wanita pernah kawin umur 15-49 dan 8.057 pria kawin umur 15-54 diwawancarai dalam SDKI 2002-2003.

SDKI 2002-2003 mengumpulkan tiga macam data, yaitu keterangan rumah tangga yang mencakup keterangan sosial dan ekonomi rumah tangga, wanita pernah kawin umur 15-49 tahun, dan pria kawin umur 15-54 tahun. Keterangan rumah tangga yang dicatat antara lain nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan anggota rumah tangga, dan keterangan tempat tinggal rumah tangga. Kepada wanita pernah kawin usia 15-49 tahun ditanyakan antara lain latar belakang responden, riwayat kelahiran, pengetahuan tentang keluarga berencana, kehamilan, pemberian air susu ibu, imunisasi dan kesehatan anak, perkawinan, preferensi fertilitas, latar belakang suami dan pekerjaan responden, pengetahuan tentang AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, dan kematian ibu. Berbagai keterangan mengenai pria kawin dikumpulkan untuk melihat sejauh mana peran pria terhadap keluarga berencana, kehamilan, dan kesehatan reproduksi. Keterangan yang dikumpulkan antara lain mengenai latar belakang responden, pengetahuan tentang keluarga berencana, perkawinan dan sikap terhadap perempuan, preferensi fertilitas, partisipasi dalam penanganan kesehatan, dan pengetahuan tentang AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 merupakan survei keenam kali yang dilakukan sebagai bagian dari proyek internasional '*Demographic and Health Survey*' atau 'DHS'. Survei pertama adalah Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia yang dilaksanakan pada

tahun 1987. Survei-survei selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1991, 1994, 1997, 2002-2003. SDKI 2007 dirancang bersama-sama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan (Depkes) serta MEASURE DHS Macro International. Inc. BPS dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan survei, termasuk merancang survei, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan data.

Tujuan utama dari SDKI 2007 adalah menyediakan informasi yang rinci mengenai penduduk, keluarga berencana dan kesehatan bagi pembuat kebijakan dan pengelola program kependudukan dan kesehatan. Secara khusus SDKI 2007 dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menghimpun informasi mengenai latar belakang sosial-ekonomi responden wanita, tingkat fertilitas, perkawinan dan aktifitas seksual, keinginan mempunyai anak, pengetahuan dan keikutsertaan keluarga berencana, praktek menyusui, kematian anak dan dewasa termasuk kematian ibu, kesehatan ibu dan anak, kepedulian dan sikap terhadap AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 merupakan survei yang berskala nasional, mencakup 40.701 rumahtangga, 32.895 wanita pernah kawin umur 15-49, dan 8.758 pria kawin umur 15-54. SDKI 2007 adalah survei keenam yang dilaksanakan di Indonesia. Perlu kehati-hatian dalam menganalisa tren dengan data SDKI dikarenakan adanya perbedaan cakupan wilayah. SDKI 2007 mencakup 33 provinsi di Indonesia.

2.2 Metode Estimasi Fertilitas

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971-2010 dan SUPAS 1976-2005 serta SDKI 1991-2007 dapat digunakan empat metode dalam mengestimasi tingkat fertiltas yaitu metode Anak Kandung (*Own Children* atau *OC*), Rele, Palmore dan Gunasekaran-Palmore. Masing-masing metode biasanya menghasilkan tingkat fertiltas yang berbeda serta memerlukan rincian data yang berbeda. Di samping keempat metode tersebut, juga digunakan "Indeks Coale" yang tujuannya bukan untuk memperkirakan kelahiran tetapi untuk menggambarkan penurunan fertiltas selama kurun waktu 1968-2007. Berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 Metode Anak Kandung

Metode anak kandung merupakan perkembangan dari metode "*reverse-survival*". Ukuran fertilitas yang dihasilkan adalah angka kelahiran menurut umur wanita (*Age Specific Fertility Rate* atau ASFR). Untuk itu diperlukan matriks tabulasi silang menurut anak terhadap ibu kandung. Ibu yang dimaksud adalah wanita usia 15 hingga 55 tahun dan anak usia 0 hingga 15 tahun (UN, 1983). Setiap sel pada matriks y dinotasikan dengan $P_x(t)$, menunjukkan anak kandung usia x yang ibunya berusia y tahun pada waktu t . Anak yang dilahirkan $(t-x)$ tahun yang lalu, pada waktu itu ibunya berusia $(y-x)$ tahun. Jumlah wanita yang diperlukan dalam penghitungan angka kelahiran menurut umur, diperoleh dari daftar rumah tangga. Metode *reverse survival* dapat digunakan untuk menghitung jumlah wanita maupun jumlah kelahiran sebelum saat pencacahan berdasarkan pola kematian pada masa lalu.

Masalah utama pada penggunaan metoda ini ialah kesalahan pelaporan umur yang dapat timbul baik pada anak maupun ibu. Salah satu cara untuk mengatasi ini ialah dengan membuat matriks menurut kelompok umur. Dengan demikian, tingkat kelahiran yang diperoleh berdasarkan kelompok umur pada tahun tertentu.

Masalah lain ialah pelaporan jumlah anak kandung yang kerap kali terlupakan atau justru berlebihan. Umumnya, wanita 40 tahun keatas cenderung sukar mengingat jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Hal ini dapat terjadi misalnya karena ada anak kandung yang ternyata tidak tinggal bersama ibunya pada saat pencacahan. Tetapi karena penelitian ini berdasarkan kelahiran di masa lalu yang tidak terlalu jauh dari saat pencacahan yaitu anak-anak berumur 5 tahun yang dilahirkan oleh wanita yang relatif masih muda maka diperkirakan persentase anak-anak seperti ini yang tinggal di luar rumah tangga berpisah dengan ibunya relatif sangat kecil.

2.2.2 Metode Rele

Metode Rele sebenarnya merupakan pengembangan dari teori penduduk stabil (Rele, 1967). Dikatakan bahwa pada hampir semua populasi, dapat dijumpai hubungan linier antara rasio ibu anak (*Child Woman Ratio*) dengan tingkat kelahiran kasar (*gross reproduction rate*), yang secara mudah dapat diubah menjadi tingkat kelahiran total (*Total Fertility Rate*, atau TFR).

Keuntungan utama dari metode ini ialah kesederhanaannya, karena hanya memerlukan sebaran umur penduduk dan perkiraan kematian. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dihasilkan rasio ibu-anak. Dengan mengetahui perkiraan kasar atas harapan hidup ketika lahir, jumlah ini dapat diubah menjadi perkiraan TFR. Dengan demikian, metode ini menghasilkan suatu cara yang cepat dan mudah dalam memperkirakan kelahiran, utamanya untuk daerah-daerah kecil. Kelemahannya adalah metode ini sensitif terhadap perbedaan tingkat lewat cacah antara ibu dan anak. Selain itu, dalam perhitungannya diperlukan informasi tentang tingkat kematian.

2.2.3 Metode Palmore

Metode ini diperkenalkan oleh Bogue dan Palmore pada tahun 1964, yang mendasarkan kepada asumsi adanya hubungan linier antara rasio anak dan wanita (*Child Woman Ratio = CWR*), ukuran kematian dan TFR. Dalam penghitungannya diperlukan beberapa indikator lain seperti perbedaan pola perkawinan. Bila dibandingkan dengan metode Rele, metode ini memerlukan lebih banyak data yang biasanya tersedia dalam sensus maupun survei terutama untuk melengkapi perkiraan kelahiran pada tingkat administrasi di bawah provinsi. Metode ini menggunakan tingkat kematian bayi sebagai pengganti harapan hidup waktu lahir.

Palmore (1967) memperbaiki persamaan yang digunakan dengan menggunakan data yang lebih akhir, dan persamaannya adalah sebagai berikut:

$$TFR = 12,0405 + 13,5277 IMR + 11,1042 CWR - 176,4889 CP - 6,4698 PEM$$

TFR adalah tingkat kelahiran total per 1.000 wanita

IMR adalah tingkat kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

CP adalah persentase anak berusia kurang dari lima tahun

PEM adalah persentase wanita pernah kawin usia 20-24 tahun

CWR adalah rasio anak 0-4 tahun per 1000 wanita umur 15-49 tahun.

Metode ini sensitif terhadap kualitas data, utamanya bayi dan anak-anak. Ada tiga formula yang dirumuskan oleh Palmore yaitu A, B dan C, namun pada penelitian ini hanya digunakan formula A karena hasil estimasinya lebih mendekati estimasi metode-metode lainnya (lihat Palmore, 1967).

2.2.4 Metode Gunasekaran-Palmore

Metode Gunasekaran-Palmore (1984) dapat dikatakan sebagai metode baru dalam perkiraan fertilitas yang menitikberatkan cara penghitungan TFR pada hubungan antara kelahiran, kematian dan sebaran umur penduduk. Dimensi penting dalam hubungan ini adalah pengaruh/efek dominan fertilitas terhadap struktur umur penduduk dan pengaruh marginal mortalitas terhadap hal serupa.

Pendekatan Gunasekaran-Palmore dalam estimasi fertilitas juga didasarkan pada teori statistik yang menunjukkan bahwa dua momen pertama (*mean and varian*) peka terhadap perubahan yang terjadi dalam frekuensi sebaran. Adapun ukuran kemencengan dan kelancipan (momen ke-3 dan ke-4) menunjukkan konsentrasi relatif dan letak bilangan dalam suatu sebaran umur penduduk. Dengan demikian, momen dari suatu sebaran merupakan indikator dari kondisi hubungan fertilitas dengan sebaran umur, sehingga dapat menunjukkan tingkat fertilitas, pada tahun yang merujuk sebaran tersebut. Metode ini juga memerlukan keterangan tentang angka harapan hidup wanita pada saat dilahirkan.

2.3 Indeks Coale

Penurunan tingkat fertilitas dapat pula dilihat dari Indeks Coale. Indeks Coale terdiri dari tiga komponen I_f , I_g dan I_m . I_f (indeks fertilitas secara keseluruhan) adalah rasio dari jumlah kelahiran yang diamati dalam suatu populasi dengan jumlah kelahiran yang akan terjadi/diharapkan jika wanita dalam setiap kelompok umur mengalami fertilitas standar atau fertilitas maksimum.

Coale (1965) menggunakan tingkat fertilitas wanita Hutterite yang berstatus kawin periode 1921-1930 sebagai fertilitas standar karena menurut Coale, angka fertilitas ini sepanjang pengamatan merupakan yang tertinggi. I_g (indeks fertilitas dari wanita kawin) adalah rasio antara jumlah kelahiran yang terjadi dari wanita yang pernah kawin dengan jumlah kelahiran yang akan terjadi/diharapkan jika wanita yang pernah kawin mengalami fertilitas standar. Jadi, indeks ini menggambarkan fertilitas berasal dari wanita berstatus kawin (*legitimate births*). I_m (indeks fertilitas dari proporsi wanita kawin) adalah rasio antara jumlah kelahiran yang diharapkan dari wanita yang kawin jika mengalami tingkat fertilitas standar dengan jumlah kelahiran yang diharapkan dari seluruh wanita yang mengalami fertilitas standar. Jika diketahui bahwa

banyaknya anak yang lahir di luar perkawinan sangat kecil atau dapat diabaikan, maka hubungan antara I_f , I_g dan I_m dapat dituliskan sebagai berikut: $I_f = I_g * I_m$.

<http://www.bps.go.id>

III. TREN FERTILITAS

3.1 Estimasi Level Kematian

Salah satu data yang diperlukan untuk menghitung tingkat kelahiran berdasarkan metode anak kandung, Rele dan Palmore dan Gunasekaran-Palmore adalah level kematian. Dengan demikian, tahap pertama dalam menghitung tingkat kelahiran adalah memperkirakan level kematian pada wilayah dan periode yang sama dalam penelitian tingkat kelahiran. Beberapa metode dapat digunakan dalam penghitungannya, antara lain adalah metode Brass.

Level kematian yang digunakan dalam penghitungan tingkat fertilitas tahun 1971-2010 didasarkan pada publikasi BPS hasil SP71, SP80, SP90, SUPAS95, SP2000 dan SP2010. Sedangkan untuk tahun 2005, estimasi level kematian dihitung dari data yang dikumpulkan dalam SUPAS 2005 berdasarkan data jumlah anak yang pernah dilahirkan, jumlah anak yang masih hidup dan jumlah anak yang sudah meninggal yang merupakan data dasar untuk penghitungan tingkat kematian secara tidak langsung. Tabel hasil estimasi level kematian tersebut akan disajikan pada Bab Mortalitas.

3.2 Tren Fertilitas Indonesia

Penurunan tingkat fertilitas Indonesia selama kurun waktu 1968-2002 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 yang menyajikan hasil estimasi dengan metode Gunasekaran-Palmore, metode Palmore A, metode Own Children dan metode Rele. Pada tabel tersebut tampak bahwa estimasi dengan menggunakan Gunasekaran-Palmore menghasilkan angka fertilitas tertinggi selama periode 1968-1987, dan yang terendah pada periode yang sama adalah metode Rele. Sedangkan pada periode 1992-1997, metode Rele menghasilkan angka estimasi yang paling tinggi, dan yang terendah adalah metode Anak Kandung (*Own Children*). Adapun hasil SUPAS05 (2002) angka fertilitas tertinggi adalah hasil estimasi dengan metode Palmore, dan yang terendah adalah Rele. Perbedaan hasil disebabkan oleh perbedaan komponen masukan dalam penghitungan masing-masing metode. Namun

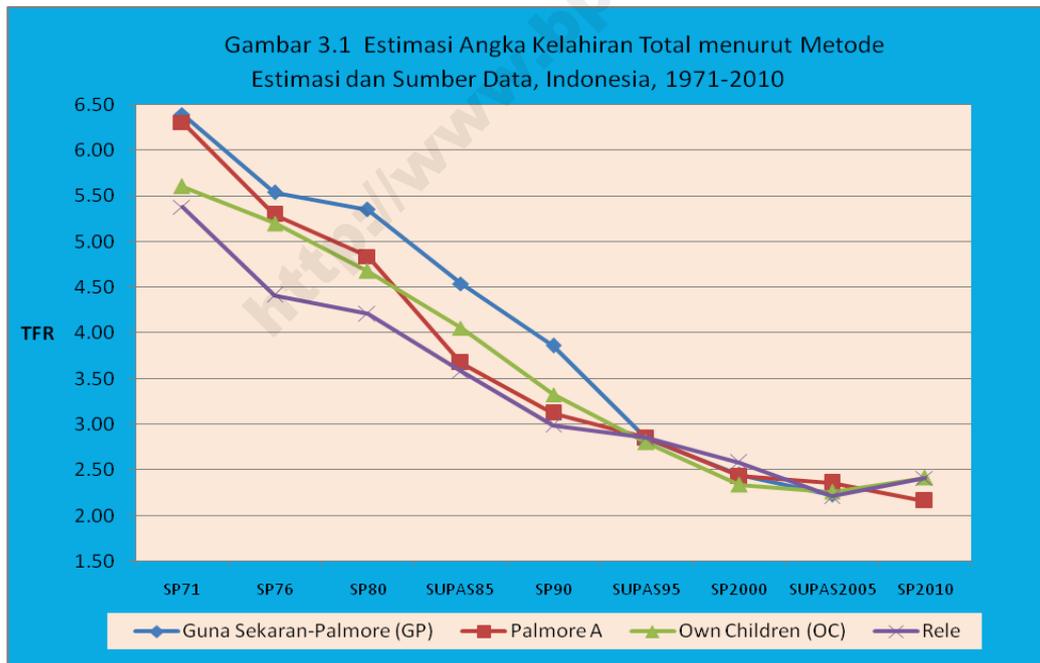
demikian, seiring dengan terus menurunnya tingkat fertilitas di Indonesia ke tingkat yang cukup rendah dalam sepuluh tahun terakhir, hasil estimasi dari berbagai metode tidak lagi menunjukkan perbedaan yang cukup berarti.

Tabel 3.1 Estimasi Angka Kelahiran Total menurut Metode Estimasi dan Sumber Data, Indonesia, 1971-2010

Metode	1971 (1968)	1976 (1973)	1980 (1977)	1985 (1982)	1990 (1987)	1995 (1992)	2000 (1997)	2005 (2002)	2010 (2007)
Guna Sekaran-Palmore (GP)	6.397	5.539	5.354	4.539	3.861	2.840	2.450	2.230	-
Palmore A	6.309	5.294	4.839	3.674	3.121	2.849	2.430	2.362	2.163
Own Children (OC)	5.605	5.200	4.680	4.055	3.326	2.802	2.340	2.263	2.414
Rele	5.378	4.411	4.207	3.580	2.991	2.853	2.580	2.210	2.411

Keterangan:

- ¹⁾ Berdasarkan Sensus Penduduk 1971, SUPAS 1976, Sensus Penduduk 1980, SUPAS 1985, Sensus Penduduk 1990, SUPAS 1995, Sensus Penduduk 2000, SUPAS 2005, Sensus Penduduk 2010
- ²⁾ Angka didalam kurung menunjukkan tahun rujukan



Pada pembahasan selanjutnya, metode anak kandung dipakai dalam melihat tren tingkat fertilitas di Indonesia selama periode 1968-2007 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama hampir 39 tahun (1968-2007) sejak pelaksanaan program keluarga berencana dimulai secara kelembagaan, tingkat fertilitas terus mengalami penurunan. Pada akhir tahun 60 an, hasil Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat bahwa tingkat fertilitas di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 5,61 anak per wanita usia reproduksi. Meskipun 10 tahun kemudian angkanya terus menurun, namun penurunannya masih relatif kecil yaitu hanya 2-3 persen per tahunnya. Penurunan yang lebih cepat dimulai pada periode 10 tahun kedua (1977-1987) dimana secara rata-rata setiap tahunnya turun 3,5 persen hingga angka fertilitas dapat ditekan menjadi 3,33 anak per wanita.

Kondisi tersebut dapat dipertahankan, bahkan penurunannya dipacu lebih cepat lagi sebagaimana terlihat dari hasil Sensus Penduduk tahun 1990 dan 2000 yang memperlihatkan adanya penurunan sekitar 3,6 persen pertahunnya sampai tahun 1997, sehingga tingkat fertilitas telah berkurang menjadi hanya 2,34 anak per wanita. Dan berdasarkan hasil SUPAS05, tingkat fertilitas tercatat sebesar 2,26 dengan penurunan hanya 0,7 persen per tahun. Sementara itu berdasarkan hasil SP2010, tingkat fertilitas tercatat sebesar 2,41 dengan kenaikan 1,3 persen per tahun.

Tabel 3.2 Estimasi Angka Kelahiran Total dengan Menggunakan Metode Anak Kandung, Indonesia, 1968-2010

Periode (tahun)	TFR	% Penurunan Pertahun
(1)	(2)	(3)
SP71 (1968)	5.605	
		2,0
SP80 (1977)	4.680	
		3,5
SP90 (1987)	3.326	
		3,5
SUPAS95 (1992)	2.802	
		3,6
SP2000 (1997)	2.344	
		0,7
SUPAS2005 (2002)	2.263	
		-1,3
SP2010 (2007)	2.414	

Catatan:

- Berdasarkan metode anak kandung
- Angka dalam kurung menunjukkan tahun rujukan

Seiring dengan menurunnya angka kelahiran total (TFR), pada periode yang sama, angka kelahiran menurut umur ibu (ASFR) juga menunjukkan penurunan di hampir semua kelompok umur meskipun dengan kecepatan yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.3 dan Gambar 3.2. Pada akhir periode 1960-an sampai dengan akhir 1970-an tingkat kelahiran usia sangat muda (15-19 tahun) masih cukup tinggi sekitar 155 per 1000 wanita usia tersebut. Angka tersebut berhasil ditekan cukup signifikan pada periode 1990 an menjadi 71 dan terus menurun hingga menjadi 43 per 1000 wanita pada tahun 2002 dan 41 per 1000 wanita pada tahun 2007.

Tabel 3.3 Perkembangan Angka Kelahiran menurut Umur Ibu, Tahun 1971-2010

Umur Ibu	SP71 (1968)	SP80 (1977)	SP90 (1987)	SUPAS95 (1992)	SP2000 (1977)	SUPAS05 (2002)	SP2010 (2007)	Penurunan Fertilitas (%)					
								1968	1977	1987	1992	1997	2002
								1977	1987	1992	1997	2002	2007
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15 – 19	0,155	0,116	0,071	0,061	0,044	0,043	0,041	3,27	5,61	3,08	6,75	0,60	0,67
20 – 24	0,286	0,248	0,179	0,151	0,114	0,115	0,117	1,60	3,69	3,46	5,78	-0,09	-0,43
25 – 29	0,273	0,232	0,171	0,146	0,122	0,123	0,130	1,82	3,45	3,21	3,66	-0,18	-1,13
30 – 34	0,211	0,177	0,129	0,105	0,095	0,095	0,105	1,97	3,58	4,20	2,02	-0,04	-1,88
35 – 39	0,124	0,104	0,075	0,063	0,056	0,053	0,061	1,97	3,70	3,55	2,38	1,03	-2,73
40 – 44	0,055	0,046	0,031	0,027	0,026	0,019	0,022	2,01	4,48	2,80	0,76	6,14	-2,58
45 – 49	0,017	0,013	0,009	0,008	0,012	0,005	0,006	3,03	4,17	2,38	-7,79	20,11	-5,59
TFR (15 – 49)	5,605	4,680	3,326	2,802	2,344	2,263	2,414	2,02	3,87	3,49	3,63	0,70	-1,28

Keterangan:

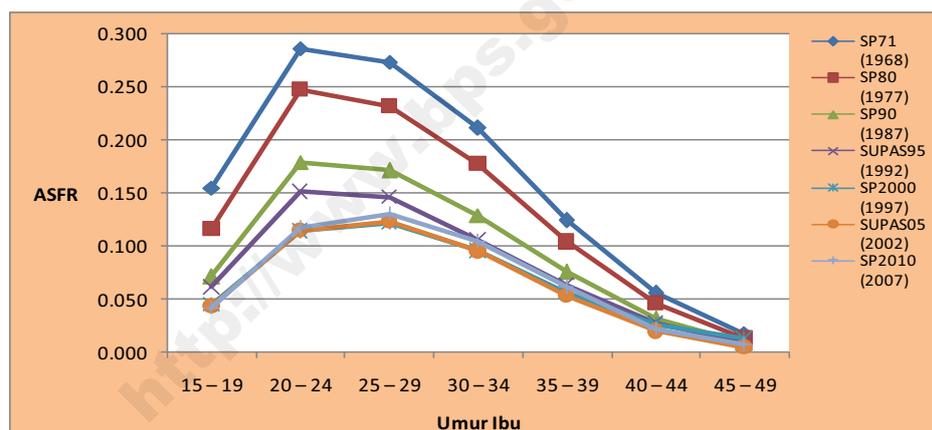
- ¹⁾ Berdasarkan Sensus Penduduk 1971
- ²⁾ Berdasarkan Sensus Penduduk 1980
- ³⁾ Berdasarkan Sensus Penduduk 1990
- ⁴⁾ Berdasarkan SUPAS 1995
- ⁵⁾ Berdasarkan Sensus Penduduk 2000
- ⁶⁾ Berdasarkan SUPAS 2005
- ⁷⁾ Berdasarkan SP2010

Gambaran yang sama juga terjadi pada usia 20-24 tahun. Bahkan sejak tahun 1997 (hasil SP2000) telah terjadi pergeseran usia dengan tingkat fertilitas tertinggi dari usia 20-24 menjadi usia 25-29 tahun. Sementara pada usia tua (45-49) relatif stabil, angkanya berkisar belasan per 1000 wanita. Sementara itu hasil SP2010 pada kelompok umur (30-34)

mengalami peningkatan dan bergeser ke tingkat fertilitas terendah pada kelompok umur (45-49). Pergeseran tertinggi tingkat fertilitas ke kelompok umur yang lebih tinggi ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan tingkat fertilitas secara keseluruhan

Menurunnya tingkat kelahiran di semua kelompok umur ibu dengan tingkat penurunan usia muda yang lebih cepat menyebabkan pola kelahiran menurut umur di Indonesia berangsur-angsur semakin landai (Gambar 3.2) yang mencerminkan terjadinya pergeseran median usia melahirkan menuju usia yang lebih tua. Gambaran tersebut mengindikasikan kondisi yang lebih baik karena meningkatnya usia melahirkan akan dapat mengurangi resiko kematian si ibu maupun bayinya pada saat melahirkan.

Gambar 3.2 Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu, 1971-2010



3.3 Tren Fertilitas Antar Provinsi

Gambaran yang sama dengan perkembangan secara nasional, tingkat kelahiran di tiap-tiap provinsi menunjukkan perkembangan yang terus menurun, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 yang menyajikan perkembangan tingkat kelahiran antar provinsi. Dari tabel tersebut tampak bahwa pada akhir tahun 1960-an, tingkat fertilitas di seluruh provinsi masih sangat tinggi, mencapai 5-7 kelahiran per wanita usia reproduksi (15-49 tahun) dimana yang tertinggi di provinsi Papua (7,20) dan terendah adalah Jawa Timur (4,72). Sepuluh tahun kemudian, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1980, tingkat fertilitas di hampir seluruh provinsi

telah menurun sekitar 1 kelahiran per wanita. Penurunan yang cukup cepat khususnya terjadi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sulawesi Utara, sedangkan pada provinsi-provinsi lainnya di Sumatera, penurunan tingkat fertilitas masih sangat pelan, hanya berkisar 1 persen per tahunnya.

Penurunan yang cukup besar terjadi pada periode 10 tahun berikutnya sebagaimana terlihat dari hasil Sensus Penduduk 1990 yang memperlihatkan penurunan hingga lebih dari 5 persen pertahun di provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara. Sementara itu pada periode yang sama provinsi-provinsi yang penurunan tingkat fertilitasnya lambat adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Papua, hanya menurun kurang dari 2 persen pertahunnya. Setelah 30 tahun program keluarga berencana berjalan, tingkat fertilitas di sebagian besar provinsi telah dapat diturunkan hingga menjadi kurang dari 3 kelahiran per wanita usia reproduksi, kecuali provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang angkanya masih diatas 3, hal itu terlihat dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000. Bahkan di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur tingkat fertilitas sudah cukup kecil yaitu kurang dari 2 kelahiran per wanita.

Hasil SUPAS 2005 memperlihatkan gambaran perkembangan yang hampir sama dengan SP2000 meskipun dengan penurunan yang makin pelan, bahkan di beberapa provinsi mulai terlihat gejala naiknya angka kelahiran. Semakin melambatnya penurunan tersebut diduga disamping karena tingkat fertilitas yang memang sudah relatif kecil.

Hasil SP2010 memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan hampir di setiap provinsi bila dibandingkan dengan hasil SUPAS2005. Faktor transisi restrukturisasi kelembagaan pengelola program keluarga kedalam struktur otonomi pemerintah daerah diduga turut berpengaruh terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program keluarga berencana.

Tabel 3.4 Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Propinsi Berdasarkan Metode Anak Kandung, 1971-2010

Propinsi	SP71 (1968)	SP80 (1977)	SP90 (1987)	SUPAS95 (1992)	SP2000 (1977)	SUPAS05 (2002)	SP2010 (2007)	Penurunan Fertilitas (%)					
								1968	1977	1987	1992	1997	2002
								1977	1987	1992	1997	2002	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11. Nangroe Aceh	6,27	5,24	4,37	3,29	2,81	2,62	2,79	2,0	2,0	5,8	3,2	1,4	-1,3
12. Sumatera Utara	7,20	5,94	4,29	3,53	3,10	2,73	3,01	2,2	3,7	4,0	2,7	2,6	-2,0
13. Sumatera Barat	6,18	5,76	3,89	3,35	3,06	2,84	2,91	0,8	4,4	3,1	1,8	1,5	-0,4
14. R i a u	5,94	5,44	4,09	3,25	2,77	2,58	2,82	1,0	3,2	4,7	3,2	1,5	-1,8
15. J a m b i	6,39	5,57	3,76	3,11	2,67	2,43	2,51	1,5	4,5	3,9	3,1	1,8	-0,6
16. Sumatera Selatan	6,33	5,59	4,22	3,14	2,88	2,26	2,56	1,4	3,2	6,1	1,7	5,0	-2,5
17. Bengkulu	6,72	6,20	3,97	3,19	2,68	2,38	2,51	0,9	5,1	4,5	3,6	2,4	-1,1
18. Lampung	6,36	5,75	4,05	3,29	2,65	2,35	2,45	1,1	4,0	4,3	4,4	2,4	-0,9
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	2,60	2,54	2,54	-	-	-	-	0,4	0,1
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	2,04	2,38	-	-	-	-	-	-3,1
31. DKI Jakarta	5,18	3,99	2,33	1,93	1,63	1,77	1,82	2,9	6,2	3,9	3,4	-1,7	-0,5
32. Jawa Barat	6,34	5,07	3,47	2,87	2,51	2,33	2,43	2,5	4,3	3,8	2,8	1,5	-0,9
33. Jawa Tengah	5,33	4,37	3,05	2,58	2,06	2,01	2,20	2,2	4,1	3,4	4,7	0,5	-1,8
34. DI Yogyakarta	4,76	3,42	2,08	2,00	1,44	1,66	1,94	3,7	5,7	0,8	6,9	-2,9	-3,0
35. Jawa Timur	4,72	3,56	2,46	2,27	1,71	1,84	2,00	3,2	4,2	1,6	5,8	-1,4	-1,7
36. Banten	-	-	-	-	2,72	2,32	2,35	-	-	-	-	3,2	-0,2
51. B a l i	5,96	3,97	2,28	2,01	1,89	2,10	2,13	4,6	6,4	2,5	1,2	-2,1	-0,3
52. Nusa Tenggara Barat	6,66	6,49	4,98	3,68	2,92	2,80	2,59	0,3	3,0	6,2	4,8	0,8	1,6
53. Nusa Tenggara Timur	5,96	5,54	4,61	4,01	3,37	3,67	3,82	-	2,1	2,8	3,6	-1,7	-0,8
61. Kalimantan Barat	6,27	5,52	4,44	3,47	2,99	2,72	2,64	1,4	2,5	5,1	3,0	1,9	0,6
62. Kalimantan Tengah	6,83	5,87	4,03	3,16	2,74	2,28	2,56	1,7	4,3	5,0	2,9	3,8	-2,4
63. Kalimantan Selatan	5,43	4,60	3,24	3,09	2,33	2,46	2,35	1,9	4,0	0,9	5,8	-1,1	1,0
64. Kalimantan Timur	5,41	4,99	3,28	2,96	2,50	2,44	2,61	0,9	4,8	2,1	3,4	0,5	-1,3
71. Sulawesi Utara	6,79	4,91	2,69	2,66	2,13	2,06	2,43	3,7	6,9	0,2	4,6	0,7	-3,3
72. Sulawesi Tengah	6,53	5,90	3,85	3,28	2,75	2,96	2,94	1,1	4,8	3,2	3,6	-1,5	0,1
73. Sulawesi Selatan	5,71	4,88	3,54	3,05	2,56	2,59	2,55	1,8	3,6	3,0	3,5	-0,2	0,3
74. Sulawesi Tenggara	6,45	5,82	4,91	3,69	3,31	3,16	3,20	1,1	1,9	5,9	2,2	0,9	-0,2
75. Gorontalo	-	-	-	-	2,70	2,80	2,76	-	-	-	-	-0,7	0,2
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	3,33	-	-	-	-	-	-
81. Maluku	6,89	6,16	4,59	3,68	3,39	3,08	3,56	-	3,3	4,5	1,7	1,9	-2,9
82. Maluku Utara	-	-	-	-	3,18	2,90	3,35	-	-	-	-	1,9	-2,9
91. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	3,18	-	-	-	-	-	-
94. Papua	7,20	5,35	4,70	3,78	3,28	2,76	2,87	-	1,4	4,5	2,9	3,5	-0,8
INDONESIA	5,61	4,68	3,33	2,80	2,34	2,26	2,41	2,0	3,9	3,5	3,6	0,7	-1,3

Keterangan:

- 1) Berdasarkan Sensus Penduduk 1971 2) Berdasarkan Sensus Penduduk 1980 3) Berdasarkan Sensus Penduduk 1990 4) Berdasarkan SUPAS 1995
5) Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 6) Berdasarkan SUPAS 2005 7) Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

Keterkaitan penurunan tingkat fertilitas dengan keberhasilan program keluarga berencana semakin terlihat dari data perkembangan pemakaian kontrasepsi yang disajikan pada Tabel 3.5. Dari tabel terlihat bahwa berdasarkan hasil SDKI angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (modern dan tradisional) selama kurun waktu 1991-2007 cenderung terus meningkat seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas, baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Untuk tingkat nasional, prevalensi kontrasepsi moderen meningkat dari 47,1 persen pada tahun 1991 menjadi 52 persen pada tahun 1994, dan 54,7 persen pada tahun 1997

serta 56,7 persen pada tahun 2002 dan 57,4 persen pada tahun 2007. Sementara untuk cara tradisional pada periode yang sama angkanya relatif stabil di kisaran 2,6 sampai 4,0 persen. Gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda jika dilihat pada tingkat provinsi, dimana pada sebagian besar provinsi tingkat prevalensi kontrasepsi cenderung meningkat selama kurun waktu 1991-2007.

Tabel 3.5 Persentase Wanita Berstatus Kawin menurut Propinsi dan Pemakaian Alat/Cara KB, 1991-2007

Propinsi	Pakai Alat/Cara KB										Tidak Pakai Alat/Cara KB				
	Modern					Tradisional					1991	1994	1997	2002	2007
	1991	1994	1997	2002	2007	1991	1994	1997	2002	2007					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11. Aceh	24,9	30,1	36,3	-	45,4	4,0	2,2	0,8	-	2,0	71,1	67,7	62,9	-	52,6
12. Sumatera Utara	34,0	40,2	42,0	43,2	42,6	3,1	6,8	4,0	9,4	11,5	62,8	53,0	54,0	47,5	45,9
13. Sumatera Barat	37,8	41,1	41,8	46,2	52,8	2,5	3,1	3,0	6,7	7,2	59,7	55,8	55,2	47,1	40,0
14. Riau	35,2	38,6	44,1	55,7	52,8	4,6	2,4	3,8	2,1	4,0	60,2	59,0	52,0	42,2	43,2
15. Jambi	46,3	54,1	60,3	57,9	62,5	1,6	1,0	1,4	1,1	2,7	52,1	44,9	38,2	41,0	34,8
16. Sumatera Selatan	44,6	50,1	54,8	58,6	62,6	2,5	2,8	3,1	2,8	2,1	52,9	47,9	42,1	38,6	35,3
17. Bengkulu	55,9	60,2	62,3	64,0	70,4	2,4	1,4	4,3	4,2	3,6	41,7	37,4	33,4	31,8	26,0
18. Lampung	50,8	58,0	64,7	58,9	66,0	3,0	1,3	1,8	2,6	5,0	46,2	40,7	33,5	38,6	29,0
19. Bangka Belitung	-	-	-	63,3	64,7	-	-	-	1,9	3,1	-	-	-	34,9	32,2
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	54,0	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	42,5
31. DKI Jakarta	51,8	54,7	53,9	57,4	56,4	4,2	5,0	5,0	5,8	3,7	44,0	40,3	41,1	36,8	39,9
32. Jawa Barat	49,7	56,0	56,5	57,5	60,3	1,3	0,7	1,1	1,5	0,8	49,0	43,3	42,4	41,0	38,9
33. Jawa Tengah	48,1	59,6	61,4	62,2	60,0	1,7	1,5	1,0	2,8	3,8	50,3	38,9	37,6	35,0	36,2
34. DI Yogyakarta	57,0	59,8	63,7	63,2	54,8	14,3	9,7	9,2	12,5	12,0	28,7	30,5	27,1	24,4	33,2
35. Jawa Timur	53,0	53,6	58,0	63,2	62,3	2,4	2,3	3,1	3,8	3,8	44,6	44,1	38,9	33,0	33,9
36. Banten	-	-	-	57,3	55,4	-	-	-	1,2	2,0	-	-	-	41,4	42,6
51. Bali	70,2	66,5	66,2	58,9	65,4	1,7	1,9	1,9	2,4	4,0	28,1	31,6	31,9	38,8	30,6
52. Nusa Tenggara Barat	38,2	47,9	54,3	52,5	52,2	0,8	1,9	2,1	1,0	2,7	61,0	50,3	43,5	46,5	45,1
53. Nusa Tenggara Timur	35,0	32,6	35,2	27,5	30,1	4,2	4,7	4,1	7,3	12,0	60,8	62,7	60,7	65,2	57,9
61. Kalimantan Barat	42,9	49,5	55,4	55,7	61,2	1,4	1,1	2,7	2,1	1,5	55,6	49,4	41,9	42,2	37,3
62. Kalimantan Tengah	42,9	41,1	57,0	62,9	65,2	1,7	3,4	6,3	1,0	1,3	55,4	55,5	36,7	36,1	33,5
63. Kalimantan Selatan	47,2	51,1	58,5	56,2	63,2	4,7	3,6	1,6	1,4	1,2	48,1	45,3	39,8	42,4	35,6
64. Kalimantan Timur	54,6	54,7	54,5	52,3	55,4	3,4	5,8	4,8	3,8	3,9	42,1	39,5	40,7	43,8	40,7
71. Sulawesi Utara	62,8	69,1	63,5	66,4	66,7	5,7	3,5	7,7	3,7	2,6	31,5	27,5	28,8	29,9	30,7
72. Sulawesi Tengah	47,5	48,3	50,2	49,8	59,8	2,8	4,2	1,5	4,8	3,8	49,6	47,5	48,3	45,4	36,4
73. Sulawesi Selatan	32,9	35,2	36,7	42,4	42,9	4,2	7,4	4,8	6,6	10,5	62,9	57,4	58,5	50,9	46,6
74. Sulawesi Tenggara	37,9	41,8	46,7	40,9	44,4	4,0	4,5	6,4	7,7	6,2	58,1	53,7	46,9	51,4	49,4
75. Gorontalo	-	-	-	48,2	58,8	-	-	-	3,8	1,4	-	-	-	48,0	39,8
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	44,5	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	54,6
81. Maluku	36,5	33,4	36,1	-	29,4	6,6	1,5	4,0	-	4,8	56,8	53,7	59,9	-	65,8
82. Maluku Utara	-	-	-	-	46,2	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	51,3
91. Papua Barat	-	-	-	-	37,5	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	60,4
94. Papua	18,9	29,2	38,3	-	24,5	1,6	12,1	12,1	-	13,8	79,4	58,7	49,6	-	61,7
INDONESIA	47,1	52,0	54,7	56,7	57,4	2,6	2,7	2,7	3,6	4,0	50,3	45,3	42,6	39,7	38,6

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991-2007

3.4 Indeks Coale

Tabel 3.6 menyajikan indeks fertilitas Coale secara nasional maupun provinsi untuk tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2005. Tabel tersebut menyajikan Indeks fertilitas dari wanita kawin karena adanya pengaruh pemakaian kontrasepsi (I_g), Indeks fertilitas dari proporsi wanita kawin karena adanya pengaruh penundaan usia kawin (I_m) dan Indeks fertilitas secara keseluruhan (I_f).

Angka nasional menunjukkan I_g pada tahun 1971 sebesar 0,552 yang berarti bahwa wanita berstatus kawin di Indonesia melahirkan 55,2 persen jika diasumsikan mengalami dan mengikuti pola fertilitas wanita Hutterite. Angkanya kemudian menurun menjadi 49,3 persen pada tahun 1980, 37,8 persen tahun 1990, 34,0 persen pada tahun 1995, 20,0 persen pada tahun 2000 dan 19 persen pada tahun 2005. Penurunan I_g terjadi di setiap provinsi, baik selama periode 1971-1980, periode 1980-1990, periode 1990-1995, periode 1995-2000 maupun periode 2000-2005 tetapi dengan tingkat penurunan yang bervariasi (Lihat Tabel 3.7). Penurunan I_g menunjukkan penurunan tingkat fertilitas karena adanya peningkatan pemakaian kontrasepsi, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Indeks lainnya adalah I_m yang pada tahun 1971 sebesar 0,843. Ini berarti bahwa proporsi wanita di usia subur yang melahirkan sekitar 84,3 persen jika diasumsikan mengikuti pola fertilitas wanita Hutterite. Keadaannya kemudian menurun menjadi 79,5 persen pada tahun 1980, 74,0 persen pada tahun 1990, 68,4 persen pada tahun 1995, 67,6 persen pada tahun 2000 dan turun menjadi 66,8 pada tahun 2005. Jika dilihat penurunan antar provinsi (Tabel 3.7) tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir (2000-2005) penurunan I_m yang paling cepat terjadi di Sulawesi Tenggara dan Bengkulu masing-masing sebesar 4,4 dan 3,5 persen.

Penurunan I_m berarti penurunan proporsi kawin atau penurunan tingkat fertilitas dengan cara penundaan usia kawin. Ditundanya usia kawin merupakan usaha untuk menaikkan rata-rata usia kawin pertama dari wanita. Hal ini terbukti bahwa rata-rata usia kawin wanita Indonesia telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Inilah salah satu penyebab turunnya I_m dari periode ke periode hingga tahun 2005.

Tabel 3.6
Indeks Fertilitas Coale menurut Propinsi dan Sumber Data, Tahun 1971-2005

Propinsi	Ig			Im			If											
	SP71	SP80	SP90															
11. Nangroe Aceh Darussalam	0,627	0,567	0,527	0,441	0,362	-	0,835	0,761	0,682	0,618	0,638	-	0,524	0,431	0,359	0,273	0,231	-
12. Sumatera Utara	0,762	0,674	0,540	0,466	0,414	0,237	0,755	0,700	0,649	0,612	0,596	0,586	0,575	0,472	0,350	0,285	0,247	0,218
13. Sumatera Barat	0,626	0,620	0,465	0,425	0,385	0,252	0,797	0,751	0,679	0,619	0,621	0,602	0,499	0,466	0,316	0,263	0,239	0,225
14. R i a u	0,627	0,599	0,475	0,402	0,359	0,222	0,797	0,755	0,723	0,675	0,642	0,664	0,500	0,452	0,343	0,271	0,230	0,215
15. J a m b i	0,634	0,568	0,418	0,364	0,311	0,200	0,866	0,826	0,775	0,720	0,707	0,698	0,549	0,469	0,324	0,262	0,220	0,202
16. Sumatera Selatan	0,663	0,612	0,483	0,374	0,362	0,186	0,795	0,756	0,735	0,701	0,639	0,639	0,527	0,463	0,355	0,262	0,231	0,184
17. Bengkulu	0,667	0,631	0,442	0,372	0,314	0,196	0,828	0,803	0,771	0,715	0,709	0,684	0,552	0,507	0,341	0,266	0,222	0,197
18. Lampung	0,604	0,572	0,440	0,369	0,293	0,195	0,901	0,846	0,776	0,736	0,720	0,707	0,544	0,484	0,341	0,272	0,211	0,192
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	0,317	0,207	-	-	-	-	0,672	0,688	-	-	-	-	0,213	0,212
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	0,195	-	-	-	-	-	0,589	-	-	-	-	-	0,179
31. DKI Jakarta	0,569	0,490	0,327	0,305	0,248	0,160	0,780	0,696	0,610	0,535	0,554	0,539	0,444	0,341	0,199	0,163	0,138	0,150
32. Jawa Barat	0,585	0,494	0,367	0,335	0,289	0,191	0,905	0,870	0,801	0,714	0,713	0,700	0,529	0,430	0,294	0,239	0,206	0,191
33. Jawa Tengah	0,507	0,454	0,338	0,304	0,242	0,161	0,863	0,806	0,764	0,701	0,690	0,682	0,438	0,366	0,258	0,213	0,167	0,162
34. DI Yogyakarta	0,506	0,404	0,281	0,269	0,196	0,144	0,748	0,680	0,627	0,608	0,580	0,569	0,378	0,275	0,176	0,164	0,114	0,133
35. Jawa Timur	0,493	0,365	0,270	0,254	0,194	0,144	0,882	0,832	0,778	0,740	0,712	0,712	0,435	0,304	0,210	0,188	0,138	0,149
36. Banten	-	-	-	-	0,313	0,194	-	-	-	-	0,695	0,677	-	-	-	-	0,218	0,191
51. B a l i	0,646	0,460	0,292	0,261	0,238	0,169	0,759	0,728	0,668	0,656	0,673	0,692	0,490	0,335	0,195	0,171	0,160	0,174
52. Nusa Tenggara Barat	0,658	0,658	0,525	0,437	0,350	0,235	0,836	0,797	0,765	0,697	0,677	0,671	0,550	0,524	0,402	0,304	0,237	0,228
53. Nusa Tenggara Timur	0,660	0,654	0,581	0,530	0,449	0,320	0,715	0,648	0,628	0,606	0,592	0,603	0,472	0,424	0,365	0,322	0,266	0,295
61. Kalimantan Barat	0,680	0,599	0,498	0,428	0,355	0,226	0,758	0,757	0,741	0,682	0,674	0,659	0,515	0,453	0,369	0,292	0,239	0,223
62. Kalimantan Tengah	0,693	0,604	0,439	0,367	0,310	0,183	0,817	0,811	0,775	0,723	0,743	0,724	0,566	0,490	0,340	0,265	0,231	0,188
63. Kalimantan Selatan	0,527	0,474	0,369	0,378	0,276	0,200	0,856	0,817	0,744	0,685	0,701	0,709	0,451	0,387	0,275	0,259	0,194	0,203
64. Kalimantan Timur	0,555	0,549	0,378	0,358	0,303	0,202	0,816	0,773	0,742	0,706	0,693	0,692	0,453	0,424	0,280	0,253	0,210	0,203
71. Sulawesi Utara	0,790	0,583	0,337	0,334	0,180	0,159	0,680	0,691	0,676	0,673	0,695	0,675	0,537	0,403	0,228	0,225	0,125	0,167
72. Sulawesi Tengah	0,702	0,640	0,446	0,407	0,265	0,244	0,766	0,754	0,729	0,681	0,710	0,701	0,538	0,483	0,325	0,277	0,188	0,246
73. Sulawesi Selatan	0,608	0,548	0,449	0,428	0,349	0,218	0,771	0,716	0,634	0,581	0,594	0,582	0,469	0,392	0,285	0,249	0,207	0,212
74. Sulawesi Tenggara	0,681	0,616	0,548	0,450	0,397	0,265	0,785	0,781	0,736	0,692	0,689	0,659	0,535	0,481	0,403	0,312	0,273	0,259
75. Gorontalo	-	-	-	-	0,318	0,225	-	-	-	-	0,714	0,711	-	-	-	-	0,227	0,231
81. Maluku	0,766	0,690	0,547	0,457	0,424	0,262	0,697	0,705	0,682	0,646	0,630	0,606	0,534	0,486	0,373	0,296	0,267	0,248
82. Maluku Utara	-	-	-	-	0,386	0,241	-	-	-	-	0,673	0,664	-	-	-	-	0,260	0,238
94. Papua	0,823	0,523	0,523	0,413	0,352	0,225	0,750	0,824	0,824	0,759	0,764	0,743	0,617	0,431	0,431	0,314	0,269	0,226
INDONESIA	0,552	0,493	0,378	0,340	0,198	0,187	0,843	0,795	0,740	0,684	0,676	0,668	0,465	0,392	0,280	0,233	0,134	0,186

Lebih lanjut Tabel 3.6 dan 3.7 memperlihatkan bahwa selama periode 1971-2000 terjadi penurunan indeks I_f , baik secara nasional maupun untuk semua provinsi. Kondisi ini menunjukkan penurunan tingkat fertilitas karena pemakaian kontrasepsi dan penundaan usia kawin. Pada tahun 1971 indeks I_f sebesar 0,465, yang berarti bahwa wanita di Indonesia melahirkan sekitar 46,5 persen jika mereka diasumsikan mengalami dan mengikuti pola fertilitas wanita suku Hutterite. Keadaannya kemudian menurun menjadi 39,2 persen pada tahun 1980 dan 28,0 persen pada tahun 1990, 23,3 persen pada tahun 1995, dan pada tahun 2000 menjadi 13,4 persen.

Berbeda dengan pola selama periode 1971-2000, dalam 5 tahun terakhir angka indeks I_f justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya yaitu meningkat dari 13,4 persen pada tahun 2000 menjadi 18,6 persen pada tahun 2005 berdasarkan hasil SUPAS05, atau meningkat 38,5 persen.

Jika dilihat menurut provinsi, I_f di Provinsi Jawa dan Bali secara umum menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan I_f di provinsi pulau-pulau lainnya. Hal ini terlihat masing-masing pada tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2005. Secara keseluruhan, I_f selalu menurun di setiap provinsi selama periode 1971-2000, namun dengan kecepatan penurunan yang bervariasi antar provinsi (lihat Tabel 3.7). Sedangkan pada periode 2000-2005 beberapa provinsi di Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan justru mengalami kenaikan indeks I_f . Penurunan I_f yang paling kecil (tidak berubah) terjadi di Papua (0,0 persen) selama periode 1980-1990, akan tetapi pada periode 1990-1995 Papua menjadi provinsi yang I_f nya turun paling besar (27,1 persen). Pada periode 1995-2000, Provinsi Bali merupakan provinsi yang mengalami penurunan I_f yang terendah (6,4 persen). Tabel 3.6 juga menunjukkan I_f terendah pada periode 1971-1990 terdapat di DI Yogyakarta yaitu berturut-turut sebesar 0,378 tahun 1971, 0,275 tahun 1980, 0,176 tahun 1990, tetapi pada tahun 1995 DKI Jakarta menjadi provinsi yang I_f nya terendah yaitu sebesar 0,163 dan pada tahun 2000 DI Yogyakarta kembali menjadi provinsi dengan I_f terendah. I_f pada tahun 1971 tertinggi terdapat di Papua yaitu sebesar 0,617, tahun 1980 terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 0,524, pada tahun 1990 terdapat di Papua yaitu sebesar 0,431, pada tahun 1995 terdapat di Nusa Tenggara Timur yaitu 0,322 dan pada tahun 2000 di Papua yaitu sebesar 0,314.

Tabel 3.7
Persentase Penurunan Indeks Fertilitas Coale Per Propinsi Tahun 1971-2005

Propinsi	Ig						Im						If						
	1971	1980	1990	1995	2000	2005	1971	1980	1990	1995	2000	2005	1971	1980	1990	1995	2000	2005	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Nanggroe Aceh Darussalam	9,6	7,1	16,3	17,9	-	34,6	8,9	10,4	9,4	-3,2	-	-	17,7	16,7	24,0	15,4	-	-	
12. Sumatera Utara	11,5	19,9	13,7	11,2	42,8	-	7,3	7,3	5,7	2,6	1,7	1,7	17,9	25,8	18,6	13,3	11,6	-	
13. Sumatera Barat	1,0	25,0	8,6	9,4	34,7	-	5,8	9,6	8,8	-0,3	3,0	3,0	6,6	32,2	16,8	9,1	6,0	-	
14. Riau	4,5	20,7	15,4	10,7	38,2	-	5,3	4,2	6,6	4,9	-3,5	-3,5	9,6	24,1	21,0	15,1	6,4	-	
15. Jambi	10,4	26,4	12,9	14,6	35,8	-	4,6	6,2	7,1	1,8	1,3	1,3	14,6	30,9	19,1	16,0	8,0	-	
16. Sumatera Selatan	7,7	21,1	22,6	3,2	48,7	-	4,9	2,8	4,6	8,8	0,1	0,1	12,1	23,3	26,2	11,8	20,4	-	
17. Bengkulu	5,4	30,0	15,8	15,6	37,6	-	3,0	4,0	7,3	0,8	3,5	3,5	8,2	32,7	22,0	16,5	11,5	-	
18. Lampung	5,3	23,1	16,1	20,6	33,5	-	6,1	8,3	5,2	2,2	1,8	1,8	11,0	29,5	20,2	22,4	9,2	-	
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	34,6	-	-	-	-	-	-2,4	-2,4	-	-	-	-	-	0,5	-
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. DKI Jakarta	13,9	33,3	6,7	18,7	-	-	10,8	12,4	12,3	-3,6	2,7	2,7	23,2	41,6	18,1	15,3	-8,4	-	
32. Jawa Barat	15,6	25,7	8,7	13,7	33,8	-	3,9	7,9	10,9	0,1	1,8	1,8	18,7	31,6	18,7	13,8	7,3	-	
33. Jawa Tengah	10,5	25,6	10,1	20,4	33,5	-	6,6	5,2	8,2	1,6	1,2	1,2	16,4	29,5	17,4	21,6	2,7	-	
34. DI Yogyakarta	20,2	30,4	4,3	27,1	26,6	-	9,1	7,8	3,0	4,6	1,9	1,9	27,2	36,0	6,8	30,5	-16,8	-	
35. Jawa Timur	26,0	26,0	5,9	23,6	26,0	-	5,7	6,5	4,9	3,8	0,0	0,0	30,1	30,9	10,5	26,6	-8,1	-	
36. Banten	-	-	-	-	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-
51. Bali	28,8	36,5	10,6	8,8	28,9	-	4,1	8,2	1,8	-2,6	-2,8	-2,8	31,6	41,8	12,3	6,4	-8,8	-	
52. Nusa Tenggara Barat	0,0	20,2	16,8	19,9	32,7	-	4,7	4,0	8,9	2,9	0,9	0,9	4,7	23,3	24,4	22,0	3,8	-	
53. Nusa Tenggara Timur	0,9	11,2	8,8	15,3	28,7	-	9,4	3,1	3,5	2,3	-1,9	-1,9	10,2	13,9	11,8	17,4	-11,1	-	
61. Kalimantan Barat	11,9	16,9	14,1	17,1	36,3	-	0,1	2,1	8,0	1,2	2,2	2,2	12,0	18,5	20,9	18,2	6,7	-	
62. Kalimantan Tengah	12,8	27,3	16,4	15,5	40,8	-	0,7	4,4	6,7	-2,8	2,5	2,5	13,4	30,6	22,1	12,8	18,6	-	
63. Kalimantan Selatan	10,1	22,2	-2,4	27,0	27,5	-	4,6	8,9	7,9	-2,3	-1,2	-1,2	14,2	28,9	5,8	25,1	-4,8	-	
64. Kalimantan Timur	1,1	31,1	5,3	15,4	33,4	-	5,3	4,0	4,9	1,8	0,1	0,1	6,4	34,0	9,6	17,0	3,2	-	
71. Sulawesi Utara	26,2	42,2	0,9	46,1	11,8	-	-1,6	2,2	0,4	-3,3	2,9	2,9	25,0	43,4	1,3	44,4	-33,5	-	
72. Sulawesi Tengah	8,8	30,3	8,7	34,9	8,1	-	1,6	3,3	6,6	-4,3	1,3	1,3	10,2	32,7	14,8	32,1	-30,8	-	
73. Sulawesi Selatan	9,9	18,1	4,7	18,5	37,6	-	7,1	11,5	8,4	-2,2	2,0	2,0	16,4	27,3	12,6	16,9	-2,3	-	
74. Sulawesi Tenggara	9,5	11,0	17,9	11,8	33,2	-	0,5	5,8	6,0	0,4	4,4	4,4	10,1	16,2	22,6	12,5	5,2	-	
75. Gorontalo	-	-	-	-	29,3	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-1,7	-
81. Maluku	9,9	20,7	16,5	7,2	38,2	-	-1,1	3,3	5,3	2,5	3,8	3,8	9,0	23,3	20,6	9,8	7,2	-	
82. Maluku Utara	-	-	-	-	37,7	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	8,4	-
94. Papua	36,5	0,0	21,0	14,8	36,0	-	-9,9	0,0	7,9	-0,7	2,8	2,8	30,1	0,0	27,1	14,3	16,0	-	
INDONESIA	10,7	23,3	10,1	41,8	5,7	-	5,7	6,9	7,6	1,2	1,2	1,2	15,7	28,6	16,8	42,5	-38,5	-	

Catatan : Angka minus menunjukkan kenaikan

IV. KESIMPULAN

Publikasi ini bertujuan untuk melihat perkembangan tingkat fertilitas baik secara nasional maupun provinsi di Indonesia selama periode 1967-2009 berdasarkan data SP71, SP80, SUPAS85, SP90, SUPAS95, SP2000, SUPAS05 dan SP2010. Selain itu juga membandingkan tingkat fertilitas berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan empat metode yaitu Anak Kandung, Palmore, Gunasekaran-Palmore, dan Rele. Di samping itu, juga disajikan Indeks Coale untuk melihat perkembangan penurunan fertilitas yang diperkirakan sebagai dampak dari pemakaian kontrasepsi dan penundaan usia kawin.

Selama periode 1967-2009, tren fertilitas Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan. Penurunan yang cepat terjadi selama periode 1967-1984, dan kemudian penurunannya menjadi lambat pada periode 1987-1990. Hal ini diperkirakan ada kaitannya dengan penurunan tingkat kematian bayi (Syahrudin, 1983; Cantrelle, 1973). Tingkat kematian bayi cukup tinggi hingga periode tahun tujuh puluhan dan ini juga diikuti dengan tingginya tingkat kelahiran. Namun kemudian tingkat kematian bayi turun secara drastis selama dekade tujuh puluhan dan mulai melambat pada dekade delapan puluhan. Kenyataan ini diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat kelahiran. Diperkirakan dengan semakin lambatnya penurunan tingkat kematian bayi, setelah selang beberapa waktu kemudian penurunan tingkat fertilitas juga akan semakin melambat.

Hasil estimasi juga menunjukkan terjadinya pergeseran tingkat fertilitas menurut kelompok umur ibu. Berdasarkan SP71 puncak dari fertilitas terjadi pada kelompok umur ibu (20-24) tahun dengan angka yang cukup mencolok, kemudian berdasarkan SUPAS95 keadaannya sedikit bergeser pada kelompok umur (25-29) tahun, meskipun kelompok umur ibu (20-24) tahun masih merupakan yang tertinggi, tetapi angkanya sudah makin dekat (menyamai) angka di kelompok umur ibu (25-29) tahun. Hasil SP2000, SUPAS05 dan SP2010 memperlihatkan bahwa fertilitas tertinggi sudah bergeser ke kelompok umur (25-29) tahun. Terjadinya kenyataan seperti ini diperkirakan antara lain karena pengaruh pemakaian kontrasepsi dan penundaan usia kawin.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa masing-masing metode estimasi yang dilakukan yaitu Gunasekaran-Palmore, Palmore A, *Own Children*, dan Rele menunjukkan angka kelahiran yang menurun, namun dengan tingkat yang berbeda. Umumnya, angka tertinggi dihasilkan dengan menggunakan metode Gunasekaran-Palmore dan angka terendah dihasilkan

dengan menggunakan metode Rele. Ini tidak berarti bahwa metode yang satu akan lebih baik dari metode yang lainnya karena masing-masing metode memerlukan persyaratan data yang berbeda, dan hasil estimasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas datanya. Diperkirakan, jika data yang digunakan mempunyai kualitas yang sangat baik dan angka kelahiran sudah rendah, hasil estimasi kelima metode akan sangat dekat satu dengan lainnya, namun hal ini masih perlu pembuktian secara matematis. Pemilihan metode tentunya harus disesuaikan dengan ketersediaan, kualitas, dan kebenaran asumsi data yang digunakan serta kemungkinan untuk membandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Untuk kondisi Indonesia misalnya, metode Rele diperkirakan kurang sesuai karena metode ini berangkat dari asumsi penduduk stabil, padahal keadaan penduduk Indonesia belum memenuhi kondisi seperti itu. Namun demikian dengan telah relatif rendahnya tingkat fertilitas di Indonesia, hasil SP2010 dan SUPAS05 menunjukkan bahwa hasil estimasi antara berbagai metode tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.

Hal lain yang ditunjukkan dalam analisa fertilitas ini ialah adanya variasi tingkat fertilitas yang cukup tajam antar provinsi sampai pertengahan tahun 1980-an, walaupun di semua provinsi menunjukkan kecenderungan penurunan. Hal ini diperkirakan berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi, norma-norma, nilai kekeluargaan, dan kultur di masing-masing provinsi. Namun demikian, peranan pemerintah misalnya dengan program keluarga berencana juga dapat mempengaruhi perilaku fertilitas. Dalam analisa fertilitas ini jelas terlihat bahwa tingkat fertilitas menunjukkan perbedaan menurut wilayah yang disesuaikan dengan dimulainya program keluarga berencana.

Selama periode 1971-2000 indeks Coale juga menunjukkan penurunan baik secara nasional maupun di setiap provinsi. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa penurunan tingkat fertilitas karena indeks fertilitas dalam perkawinan (pengaruh pemakaian kontrasepsi) kontribusinya lebih besar dibandingkan dengan penurunan indeks fertilitas karena proporsi kawin (penundaan usia kawin). Namun demikian dari hasil SUPAS05 diperoleh gambaran bahwa selama periode 2000-2005 ada kecenderungan peningkatan fertilitas dilihat dari indeks Coale, khususnya di beberapa provinsi.

Dari berbagai hasil penelitian fertilitas menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas berhubungan erat dengan perubahan-perubahan faktor sosial ekonomi dan demografi. Namun demikian analisa dalam publikasi ini hanya terbatas dalam melihat perkembangan tingkat fertilitas di Indonesia tanpa menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut.

Estimasi tingkat fertilitas yang dihasilkan dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh program-program dalam bidang kependudukan baik secara nasional maupun provinsi. Lebih khusus lagi, hasil analisa ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencari cara yang lebih baik dalam membuat kebijaksanaan kependudukan. Tentunya, untuk membuat kebijaksanaan yang lebih mantap diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab penurunan fertilitas. Penelitian yang dimaksud hendaknya tidak hanya dilakukan secara nasional tetapi juga menurut daerah, dan hendaknya juga penelitian tersebut selalu diperbaharui sesuai dengan ketersediaan datanya.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, SM, Suprobo, TH, 1989. *Tingkat dan Pola Perkembangan Fertilitas di Indonesia sampai Tahun 1985, Analisa SUPASI985*, Jakarta; BPS dan LD-FEUI.
- Adioetomo, SM; Kitting AS, Salman, T, 1989, *Fertility Transition in Indonesia, Tren in Proximate Determinants of Fertility Based on The 1987 NICPS/DHS*. Paper Presented in The 21st International Population Conference, New Delhi, India, 20-27 September 1989.
- Bakir, S.Z., 1984, Female Labour Force and Fertility in Indonesia, *Laporan Seminar Fertilitas Indonesia*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1983, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1992*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1988, *Perkiraan Angka Kelahiran dan Kematian*, Seri SUPAS No.34, Jakarta, Biro Pusat Statistik.
- BPS, 1994, *"Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi"*, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, 2001, *"Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, 2006, *"Estimasi Parameter Demografi : Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, BKKBN, DEPKES dan DHS, 1993, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991* Jakarta.
- BPS, BKKBN, DEPKES dan DHS, 1995, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994*, Jakarta.
- BPS, 2011, *"Publikasi Tematik : Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Bongaarts, J, 1978. *A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility*.
Population and Development Review 4: 105-132.

Committee on Population and Demography Report, 1989, *Recent Trend in Fertility and Mortality in Indonesia*, Report No: 29, National Research Council, Washington D.C.

Dasvarma, G.L.; Hull, T.H., 1984 *Estimation of Fertility in Indonesia 1980 from Last Live Birth Data*, *Majalah Demografi Indonesia*, No. 22, 33-46.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993-1998, TAP MPR NOMOR II/MPR/1993, 1993, SINAR GRAFIKA, Jakarta.

Gunasekaran, S; Palmore JA Jr, 1984, *Regression Estimates of The Gross Reproduction Rate Using Moments of The Female Age Distribution*, *Asian and Pacific Census Forum*, Vol 10, No. 4, 5-10.

Hatmadji, S.H., 1984, Fertility Differential in Indonesia, *Laporan Seminar Fertilitas Indonesia*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Hugo, G.J.; Hull, T.H.; Hull, V.J.; Jones, G.W.; 1987, *The Demographic Dimension in Indonesian Development*, East Asian Social Science Monograph, Oxford University Press, Singapore.

Hull, T.H., Hull, V.I dan Singarimbun, M, 1977, *Indonesia's Family Planning Stories: Success and Challenge*, Population Bulletin, 32, 6, Population Reference Bureau Inc, Washington D.C.

Jones, G.W., 1990, *Family Planning Programs in ASEAN Countries*, Paper Presented at Eight Biennial Conference, Asian Studies Association of Australia, Griffith University, Brisbane July 2-5.

Knodel, JE, 1984, *The Decline Fertility in Germany, 1871-1939*. Princeton: Princeton University Press.

Mamas, SG, 1983, *Tren dan Variasi Angka Kelahiran Indonesia Menurut Provinsi, dalam Laporan Seminar Fertilitas Indonesia*, 30 Mei - 1 Juni 1983, Jakarta Biro Pusat Statistik.

Mamas, SG, Palmore J.A.; Arifiatno Y., 1991, *Recent Fertility Trend in Indonesia 1971-1987*, Eas West Centre: Honolulu

Mc Nicoll, G, Singarimbun, M, 1983, *Fertility Decline in Indonesia: Analysis and Interpretation*, National Academy Press, Washington D.C.

Newell, Colin; 1988, *Methods and Models in Demography*, Belhaven Press, London.

Palmore, James A., 1978, *Regression Estimates of Changes in Fertility 1955-1960 to 1965-1975 for Most Major Nations and Territories*, Paper of the East-West Population Institute, No. 58.

Palmore, 1987, *Regression Estimates of Fertility for India 1971 and 1981*, New Delhi: Ministry of Home Affairs.

Reese, T.H., Soedarmadi, Haryono S, 1975, *The Indonesian National Family Planning Program*, BIES. Vol (IX) No. 3, ANU, Canberra, Rao, N. Rama; J.R. Rele dan James A.

Syahrudin, 1984, *Pengaruh Kematian Bayi Terhadap Fertilitas Indonesia, dalam Laporan Seminar Fertilitas Indonesia*, 30 Mei - 1 Juni 1983: 20-76, Jakarta, Biro Pusat Statistik.

Watkins, SC, 1987. *"The Fertility Transition: Europe and the Third World Compared"*. Sociologi Forum, 2(4), p. 645-673.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN A

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel A.1
Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Provinsi Berdasarkan Metode Anak Kandung, 1971-2010

Propinsi	SP71	SP80	SP90	SUPAS95	SP2000	SUPAS05	SP2010
	(1968)	(1977)	(1987)	(1992)	(1977)	(2002)	(2007)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Nangroe Aceh Darruslam	6.27	5.24	4.37	3.29	2.81	2.62	2.79
12. Sumatera Utara	7.20	5.94	4.29	3.53	3.10	2.73	3.01
13. Sumatera Barat	6.18	5.76	3.89	3.35	3.06	2.84	2.91
14. R i a u	5.94	5.44	4.09	3.25	2.77	2.58	2.82
15. J a m b i	6.39	5.57	3.76	3.11	2.67	2.43	2.51
16. Sumatera Selatan	6.33	5.59	4.22	3.14	2.88	2.26	2.56
17. Bengkulu	6.72	6.20	3.97	3.19	2.68	2.38	2.51
18. Lampung	6.36	5.75	4.05	3.29	2.65	2.35	2.45
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	2.60	2.54	2.54
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	2.04	2.38
31. DKI Jakarta	5.18	3.99	2.33	1.93	1.63	1.77	1.82
32. Jawa Barat	6.34	5.07	3.47	2.87	2.51	2.33	2.43
33. Jawa Tengah	5.33	4.37	3.05	2.58	2.06	2.01	2.20
34. DI Yogyakarta	4.76	3.42	2.08	2.00	1.44	1.66	1.94
35. Jawa Timur	4.72	3.56	2.46	2.27	1.71	1.84	2.00
36. Banten	-	-	-	-	2.72	2.32	2.35
51. B a l i	5.96	3.97	2.28	2.01	1.89	2.10	2.13
52. Nusa Tenggara Barat	6.66	6.49	4.98	3.68	2.92	2.80	2.59
53. Nusa Tenggara Timur	5.96	5.54	4.61	4.01	3.37	3.67	3.82
61. Kalimantan Barat	6.27	5.52	4.44	3.47	2.99	2.72	2.64
62. Kalimantan Tengah	6.83	5.87	4.03	3.16	2.74	2.28	2.56
63. Kalimantan Selatan	5.43	4.60	3.24	3.09	2.33	2.46	2.35
64. Kalimantan Timur	5.41	4.99	3.28	2.96	2.50	2.44	2.61
71. Sulawesi Utara	6.79	4.91	2.69	2.66	2.13	2.06	2.43
72. Sulawesi Tengah	6.53	5.90	3.85	3.28	2.75	2.96	2.94
73. Sulawesi Selatan	5.71	4.88	3.54	3.05	2.56	2.59	2.55
74. Sulawesi Tenggara	6.45	5.82	4.91	3.69	3.31	3.16	3.20
75. Gorontalo	-	-	-	-	2.70	2.80	2.76
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	3.33
81. Maluku	6.89	6.16	4.59	3.68	3.39	3.08	3.56
82. Maluku Utara	-	-	-	-	3.18	2.90	3.35
91. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	3.18
94. Papua	7.20	5.35	4.70	3.78	3.28	2.76	2.87
INDONESIA	5.61	4.68	3.33	2.80	2.34	2.26	2.41

Keterangan:

1) Berdasarkan Sensus Penduduk 1971

4) Berdasarkan SUPAS 1995

7) Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

2) Berdasarkan Sensus Penduduk 1980

5) Berdasarkan Sensus Penduduk 2000

3) Berdasarkan Sensus Penduduk 1990

6) Berdasarkan SUPAS 2005

Tabel A.2
Angka Kelahiran menurut Umur Ibu dan Angka Kelahiran Total
menurut Provinsi 1971-2010

Propinsi	Sensus Penduduk	Periode	Referensi Waktu	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)							Perkotaan+Perdesaan
				15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Angka Kelahiran Total
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11 Aceh	1971	1967-1970	1968	158	324	316	241	130	62	22	6 265
	1980	1976-1979	1977	105	281	265	204	120	55	17	5 235
	1990	1986-1989	1987	74	224	233	177	105	45	14	4 367
	2000	1996-1999	1997	45	141	147	115	69	32	14	2 814
	2010	2006-2009	2007	29	125	157	130	81	28	8	2 793
12 Sumatera Utara	1971	1967-1970	1968	129	333	351	304	197	94	31	7 195
	1980	1976-1979	1977	87	285	310	253	159	73	20	5 935
	1990	1986-1989	1987	47	212	241	190	112	44	12	4 289
	2000	1996-1999	1997	33	147	177	140	78	32	12	3 096
	2010	2006-2009	2007	30	138	176	142	82	27	7	3 010
13 Sumatera Barat	1971	1967-1970	1968	129	313	317	255	152	59	11	6 180
	1980	1976-1979	1977	102	289	299	244	151	58	8	5 755
	1990	1986-1989	1987	49	191	215	174	107	35	7	3 890
	2000	1996-1999	1997	32	130	166	143	89	39	12	3 060
	2010	2006-2009	2007	28	123	166	140	88	31	6	2 908
14 Riau	1971	1967-1970	1968	149	299	298	228	140	55	19	5 940
	1980	1976-1979	1977	108	281	279	222	133	51	13	5 435
	1990	1986-1989	1987	71	214	219	170	95	39	11	4 088
	2000	1996-1999	1997	42	128	152	119	69	31	13	2 774
	2010	2006-2009	2007	44	136	156	123	72	26	7	2 818
15 Jambi	1971	1967-1970	1968	217	319	301	229	130	58	24	6 390
	1980	1976-1979	1977	143	287	269	218	126	54	17	5 570
	1990	1986-1989	1987	97	208	185	141	81	32	10	3 759
	2000	1996-1999	1997	62	133	132	103	60	29	13	2 665
	2010	2006-2009	2007	57	126	131	101	59	21	7	2 508
16 Sumatera Selatan	1971	1967-1970	1968	152	326	320	248	150	56	13	6 325
	1980	1976-1979	1977	111	283	291	225	135	58	14	5 585
	1990	1986-1989	1987	85	224	219	166	98	41	12	4 223
	2000	1996-1999	1997	52	136	142	112	70	40	25	2 881
	2010	2006-2009	2007	51	126	137	107	61	22	7	2 556
17 Bengkulu	1971	1967-1970	1968	155	346	330	274	139	70	29	6 715
	1980	1976-1979	1977	117	323	308	238	158	76	19	6 195
	1990	1986-1989	1987	91	222	204	146	87	35	10	3 969
	2000	1996-1999	1997	57	142	137	103	59	27	11	2 679
	2010	2006-2009	2007	51	128	136	103	58	20	6	2 512
18 Lampung	1971	1967-1970	1968	216	326	310	224	129	53	13	6 355
	1980	1976-1979	1977	151	301	278	218	126	58	18	5 750
	1990	1986-1989	1987	88	217	197	155	96	45	14	4 054
	2000	1996-1999	1997	54	131	129	102	63	34	17	2 646
	2010	2006-2009	2007	43	124	128	104	62	23	7	2 454
19 Bangka Belitung	2000	1996-1999	1997	56	136	133	102	57	25	10	2 595
	2010	2006-2009	2007	65	131	131	98	57	20	5	2 538

Perkotaan+Perdesaan

Propinsi	Sensus Penduduk	Periode	Referensi Waktu	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)							Angka Kelahiran
				15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21 Kepulauan Riau	2010	2006-2009	2007	20	91	144	123	69	23	7	2 384
31 DKI Jakarta	1971	1967-1970	1968	140	266	268	198	110	41	12	5 175
	1980	1976-1979	1977	94	208	213	157	87	31	8	3 990
	1990	1986-1989	1987	36	121	138	100	49	16	5	2 326
	2000	1996-1999	1997	20	73	98	78	39	14	5	1 631
	2010	2006-2009	2007	17	73	107	93	52	17	5	1 818
32 Jawa Barat	1971	1967-1970	1968	208	305	280	211	199	50	14	6 335
	1980	1976-1979	1977	157	264	237	185	109	49	13	5 070
	1990	1986-1989	1987	92	181	170	132	77	33	9	3 468
	2000	1996-1999	1997	57	119	123	99	61	30	13	2 507
	2010	2006-2009	2007	44	115	128	105	65	24	7	2 434
33 Jawa Tengah	1971	1967-1970	1968	144	284	265	199	115	47	12	5 330
	1980	1976-1979	1977	110	245	222	162	89	37	9	4 370
	1990	1986-1989	1987	73	176	153	111	65	25	6	3 049
	2000	1996-1999	1997	38	101	109	84	49	22	9	2 056
	2010	2006-2009	2007	39	111	122	95	51	17	4	2 196
34 DI Yogyakarta	1971	1967-1970	1968	68	253	252	199	117	48	14	4 755
	1980	1976-1979	1977	51	183	189	141	80	31	8	3 415
	1990	1986-1989	1987	29	123	127	82	40	12	3	2 082
	2000	1996-1999	1997	14	62	88	71	35	13	4	1 435
	2010	2006-2009	2007	20	90	117	95	50	14	2	1 937
35 Jawa Timur	1971	1967-1970	1968	149	246	225	169	96	45	14	4 720
	1980	1976-1979	1977	114	207	172	115	65	29	9	3 555
	1990	1986-1989	1987	69	148	122	84	45	18	6	2 456
	2000	1996-1999	1997	37	89	90	66	36	17	8	1 713
	2010	2006-2009	2007	41	108	107	82	43	14	4	2 002
36 Banten	2000	1996-1999	1997	48	119	129	111	72	42	24	2 720
	2010	2006-2009	2007	34	104	124	105	66	26	10	2 345
51 Bali	1971	1967-1970	1968	134	298	300	229	137	67	26	5 955
	1980	1976-1979	1977	95	240	200	128	79	38	14	3 970
	1990	1986-1989	1987	46	151	127	75	35	16	6	2 275
	2000	1996-1999	1997	38	109	112	70	31	12	6	1 891
	2010	2006-2009	2007	39	117	127	86	42	12	4	2 132
52 Nusa Tenggara Barat	1971	1967-1970	1968	155	311	321	278	159	75	32	6 655
	1980	1976-1979	1977	109	303	315	268	180	89	34	6 490
	1990	1986-1989	1987	81	245	240	199	137	68	25	4 975
	2000	1996-1999	1997	58	142	139	112	72	41	19	2 915
	2010	2006-2009	2007	45	124	131	110	69	29	10	2 592
53 Nusa Tenggara Timur	1971	1967-1970	1968	72	241	292	267	189	94	37	5 960
	1980	1976-1979	1977	45	214	281	259	182	95	32	5 540
	1990	1986-1989	1987	43	194	241	210	143	69	22	4 608
	2000	1996-1999	1997	34	136	171	152	104	52	24	3 366
	2010	2006-2009	2007	45	161	189	173	122	55	18	3 816
61 Kalimantan Barat	1971	1967-1970	1968	141	297	308	245	146	82	34	6 265
	1980	1976-1979	1977	111	275	275	223	131	68	21	5 520
	1990	1986-1989	1987	96	229	222	172	107	47	15	4 437
	2000	1996-1999	1997	59	143	146	115	71	36	15	2 994
	2010	2006-2009	2007	58	130	135	105	65	27	9	2 639

Propinsi	Sensus Penduduk	Periode	Referensi Waktu	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)							Angka Kelahiran Total
				15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
62 Kalimantan Tengah	1971	1967-1970	1968	179	322	327	258	173	81	25	6 825
	1980	1976-1979	1977	129	305	288	240	139	53	20	5 870
	1990	1986-1989	1987	97	216	191	152	93	45	12	4 029
	2000	1996-1999	1997	75	144	129	98	60	31	13	2 739
	2010	2006-2009	2007	69	127	123	99	62	25	9	2 563
63 Kalimantan Selatan	1971	1967-1970	1968	179	264	259	202	109	57	15	5 425
	1980	1976-1979	1977	127	249	229	169	91	44	10	4 595
	1990	1986-1989	1987	76	176	163	126	69	28	9	3 238
	2000	1996-1999	1997	56	118	116	90	53	25	10	2 331
	2010	2006-2009	2007	55	122	119	93	55	19	5	2 346
64 Kalimantan Timur	1971	1967-1970	1968	151	292	260	199	114	54	11	5 405
	1980	1976-1979	1977	116	264	250	199	106	46	16	4 985
	1990	1986-1989	1987	71	180	170	124	70	30	10	3 275
	2000	1996-1999	1997	51	127	131	101	57	25	10	2 504
	2010	2006-2009	2007	51	127	138	110	65	23	8	2 607
71 Sulawesi Utara	1971	1967-1970	1968	103	312	350	298	199	77	19	6 790
	1980	1976-1979	1977	85	256	245	197	126	60	12	4 905
	1990	1986-1989	1987	55	163	142	96	52	22	7	2 687
	2000	1996-1999	1997	51	116	111	79	43	18	7	2 125
	2010	2006-2009	2007	53	124	124	97	60	23	5	2 427
72 Sulawesi Tengah	1971	1967-1970	1968	147	309	316	261	168	75	30	6 530
	1980	1976-1979	1977	114	278	293	250	162	62	21	5 900
	1990	1986-1989	1987	85	215	199	140	85	37	10	3 853
	2000	1996-1999	1997	63	140	137	110	63	29	13	2 749
	2010	2006-2009	2007	66	146	145	118	76	29	9	2 944
73 Sulawesi Selatan	1971	1967-1970	1968	133	277	281	226	130	67	27	5 705
	1980	1976-1979	1977	90	228	244	203	124	63	23	4 875
	1990	1986-1989	1987	54	168	187	148	91	43	16	3 538
	2000	1996-1999	1997	41	114	130	109	68	35	16	2 560
	2010	2006-2009	2007	43	117	132	112	71	27	9	2 551
74 Sulawesi Tenggara	1971	1967-1970	1968	137	312	314	255	172	83	16	6 445
	1980	1976-1979	1977	111	306	292	228	142	68	17	5 820
	1990	1986-1989	1987	81	260	255	199	120	50	15	4 908
	2000	1996-1999	1997	69	167	167	129	78	37	16	3 306
	2010	2006-2009	2007	61	150	160	136	88	34	10	3 197
75 Gorontalo	2000	1996-1999	1997	67	149	132	100	59	25	9	2 704
	2010	2006-2009	2007	62	147	136	106	68	27	7	2 764
76 Sulawesi Barat	2010	2006-2009	2007	67	156	161	138	91	39	13	3 326
81 Maluku	1971	1967-1970	1968	97	267	325	311	225	109	43	6 885
	1980	1976-1979	1977	87	268	307	262	189	91	27	6 155
	1990	1986-1989	1987	67	215	233	196	127	57	24	4 593
	2000	1996-1999	1997	43	144	168	147	98	52	27	3 388
	2010	2006-2009	2007	45	150	180	159	109	50	20	3 561
82 Maluku Utara	2000	1996-1999	1997	77	155	143	123	70	44	22	3 175
	2010	2006-2009	2007	59	147	163	141	96	44	19	3 347
91 Papua Barat	2010	2006-2009	2007	53	137	151	135	89	47	24	3 179
94 Papua	1971	1967-1970	1968	172	367	349	286	173	71	21	7 195
	1980	1976-1979	1977	111	243	237	205	134	93	47	5 350
	1990	1986-1989	1987	104	224	219	172	116	73	32	4 701
	2000	1996-1999	1997	74	168	152	121	76	43	23	3 278
	2010	2006-2009	2007	56	131	130	106	74	49	29	2 874
INDONESIA	1971	1967-1970	1968	155	286	273	211	124	55	17	5 605
	1980	1976-1979	1977	116	248	232	177	104	46	13	4 680
	1990	1986-1989	1987	71	179	171	129	75	31	9	3 326
	2000	1996-1999	1997	44	114	122	95	56	26	12	2 344
	2010	2006-2009	2007	41	117	130	105	61	22	6	2 414

B. MORTALITAS

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

V. PENDAHULUAN

5.1 Latar Belakang

Ukuran mortalitas yang paling umum adalah angka kematian kasar (AKK). Angka kematian kasar dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut umur. Untuk kondisi Indonesia dengan struktur umur penduduk relatif muda, angka kematian kasar banyak dipengaruhi oleh tingkat kematian anak, terutama yang berumur di bawah 1 tahun. Tingkat kematian umur di bawah 1 tahun dikenal dengan angka kematian bayi (AKB), yang mempunyai hubungan erat dengan angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Perubahan AKB berpengaruh pada AHH dan AKK, yang secara teoritis turunya AKB menyebabkan turunya AKK dan naiknya AHH. Selain itu ukuran kematian lainnya yang digunakan adalah level mortalitas yaitu suatu fungsi dalam tabel kematian (*life table*). Level mortalitas mempunyai hubungan terbalik dengan AKB, naiknya level mortalitas menandakan turunya AKB.

Angka kematian anak, khususnya angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Oleh karena itu angka kematian bayi dipakai sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan bagian pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mencapai bangsa yang mandiri. Tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan adalah untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Program bidang kesehatan dilaksanakan pada seluruh siklus

hidup manusia, mulai dari masa dalam kandungan, anak-anak, remaja hingga masa lanjut usia.

Perkiraan AKB di Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan data dari survei atau sensus penduduk, karena data registrasi sebagai sumber data ideal untuk mendapatkan AKB belum dapat dipercaya. Hasil Sensus Penduduk (SP) menunjukkan adanya penurunan tingkat kematian bayi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Sampai saat ini estimasi AKB telah tersedia dari perhitungan hasil SP71, SP80, SP90, SP2000, SUPAS76, SUPAS85, SUPAS95, SUPAS05 dan SP2010 serta survei-survei kependudukan lainnya. Dalam rangka mendukung dan memantau keberhasilan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan kesehatan secara khusus, estimasi AKB dari setiap sensus dan survei terbaru sangat dibutuhkan. Hal ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan di bidang kesehatan di masa mendatang. Sehubungan dengan telah tersedianya data hasil SP2010 maka penghitungan beberapa ukuran mortalitas perlu dilakukan.

5.2 Tujuan Penulisan

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan estimasi AKB berdasarkan hasil SP71, SP80, SP90, SP2000, dan SP2010. Untuk melengkapi analisa tren AKB, akan dibahas pula pola AHH, dan level mortalitas. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: memperoleh gambaran mengenai perbedaan AKB menurut provinsi selama periode 1967-2006, disertai dengan perkiraan AHH dan level mortalitas menurut provinsi. Dengan demikian dari gambaran tersebut di atas diharapkan dapat disusun implikasi kebijaksanaan dibidang kesehatan yang lebih terarah dan terpadu.

5.3 Sistematika Penulisan

Estimasi AKB di Indonesia berdasarkan penghitungan SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010 akan dibahas dalam beberapa bab, mulai Bab V sampai dengan Bab IX. Bab V akan menyajikan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Gambaran mengenai AKB di masa lampau (sebelum tahun 1970-an) akan dijabarkan pada Bab VI berbentuk tinjauan pustaka. Bab VII menjelaskan sumber data dan metode yang digunakan untuk mengestimasi AKB. Inti tulisan akan dibahas Bab VIII yang berisi analisa tren AKB hasil SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010 beserta tren AHH dan level mortalitas per provinsi. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang disajikan pada Bab IX.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

VI. ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA SEBELUM DEKADE 1970-AN

Estimasi AKB yang berasal dari pengumpulan data sebelum SP61 sering dipertanyakan kebenarannya karena kualitas datanya yang kurang baik (McDonald, *et.al*, 1976). Walaupun demikian kondisi ini masih tetap dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mendapatkan gambaran tren AKB di masa lampau karena tidak ada data lain yang lebih baik. Pada awal abad ke 20, AKB tidak tersedia karena terbatasnya data sehingga tren AKB diperkirakan dari tren AHH dan AKK.

AKB pada periode ini sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat saat ini masih kurang baik, tingkat pendidikan masih rendah khususnya penduduk wanita, tingkat pendapatan pun masih rendah, serta fasilitas kesehatan yang masih jauh dari cukup. Selain itu, tingkat fertilitas yang cukup tinggi saat itu juga sangat mempengaruhi tingginya angka kematian bayi tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan kematian bayi dengan keadaan kesehatan, baik kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat sangat berarti.

Secara umum AKB di Indonesia sejak awal abad ke 20 cenderung menurun diawali dengan masuknya industrialisasi dari Eropa ke Indonesia (Hugo, *et.al*, 1987). Menurut Gardiner dan Oey (1983), penurunan angka kematian sampai tahun 1930-an kemungkinan besar lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembukaan tanah pertanian baru, peningkatan irigasi dan pengendalian terhadap produksi makanan. Widjoyo (1970) memperkirakan AKK sebelum tahun 1930 adalah sebesar 33,5 dan pada tahun 1930-1935 dan 1935-1940 turun menjadi 30,1 dan 27,8 sedangkan AHH naik dari 30,0 menjadi 32,5 dan 35,0 pada periode yang sama. Berdasarkan pengamatan Cho dan peneliti lainnya (1980) turunnya angka kematian pada dekade 1930-an ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya depresi ekonomi. Pada dekade 1940-an AKK naik tinggi sekali menjadi 35,1 pada tahun 1940-1945 dan 35,0 pada tahun 1945-1950 disertai dengan turunnya AHH menjadi 27,5 pada periode 1940-1950 (Widjoyo, 1970). Naiknya angka kematian

dengan pesat disebabkan karena perang yaitu jaman pendudukan Jepang (1942-1945) dan jaman perjuangan setelah kemerdekaan (1945-1949), (Cho, *et.al*, 1980).

Kesejahteraan masyarakat nampaknya sudah mulai membaik pada tahun 1950-an dengan dijalankannya program-program kesehatan masyarakat seperti pembasmian malaria dan cacar (Hugo, *et.al*, 1987). Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, serta pembangunan kesehatan mempunyai andil yang cukup memadai dalam menurunkan AKB. Demikian juga halnya dengan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan telah meningkat, sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Khususnya keadaan setelah merdeka, pendataan pemerintah mulai ada dan kebijakan-kebijakan tentang kependudukan mulai dilaksanakan. Pembangunan baik ekonomi, sosial, dan lainnya makin digalakkan, sehingga pendapatan masyarakat dan kesadaran akan kesehatan makin meningkat. Berdasarkan perkiraan Widjoyo (1970), AKK periode 1950-1955 adalah 28,3 dan AHH adalah 35,0 kemudian pada periode 1955-1960 AKK menjadi 26,2 dan AHH menjadi 37,5. Pada tahun 1960-an informasi mengenai AKB sudah tersedia dari hasil penghitungan sensus penduduk pertama setelah kemerdekaan (tahun 1961) walaupun baru terbatas pada tiga provinsi di Jawa. Penghitungan AKB menurut 26 provinsi di Indonesia baru dapat dihitung setelah diadakannya SP71 (Cho, *et.al*, 1980).

Ragam angka kematian antar provinsi untuk masa sebelum dilaksanakannya SP61 sulit dihitung karena terbatasnya data. Pada masa perang angka kematian di Pulau Jawa diperkirakan lebih tinggi dari pulau-pulau lainnya karena masalah kurang pangan dan kondisi kesehatan yang kurang baik saat itu. Pengiriman penduduk ke luar Pulau Jawa untuk keperluan penjajah antara lain kerja paksa (Hugo, *et.al*, 1987). Khususnya penduduk laki-laki membuat kaum wanita harus bekerja keras, sehingga anak-anaknya terlantar yang mengakibatkan AKB bertambah tinggi.

Pada tahun 1960-an perbedaan AKB antar provinsi cukup beragam. Menurut Cho, *et.al* (1980) perbedaan ini disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi antara lain: pendapatan, kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Faktor-faktor inilah yang

mempengaruhi perbedaan AKB di suatu daerah (lebih tinggi atau rendah) dengan daerah lainnya. Perbedaan pendapatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi lain. Perbedaan tersebut, saat itu akibat tidak meratanya pembangunan pada masa perang/awal kemerdekaan. Bailey (1962) menemukan bahwa AKB di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa kemungkinan besar disebabkan oleh masa menyusui yang lebih singkat. Hal ini ada hubungannya dengan status nutrisi bayi, sedangkan di provinsi-provinsi di luar Jawa, AKB yang tinggi kemungkinan besar lebih banyak disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan (Cho, *et.al*, 1980).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

VII. METODOLOGI

7.1 Sumber Data

Sumber utama penghitungan AKB selama ini adalah sensus dan survei kependudukan, karena registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan secara baik dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sumber data pertama yang dianggap dapat digunakan dalam estimasi parameter demografi sekaligus dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah SP71 (BPS, 1983). Setelah tahun 1971, ada beberapa survei kependudukan yang datanya dapat digunakan untuk mengestimasi AKB seperti SUPAS76, SUPAS85, SUPAS2005, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991, 1994 dan 1997 serta masih banyak lagi, tetapi hasil dari survei-survei tersebut tidak akan dianalisa dalam tulisan ini.

Sumber data yang akan digunakan dalam perkiraan AKB dalam tulisan ini adalah SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010. Sensus Penduduk (SP) mencakup keseluruhan penduduk, dengan demikian diharapkan hasil SP menggambarkan keadaan yang sebenarnya, walaupun ada kekhawatiran terdapatnya kelemahan yang lain seperti minimnya petugas yang baik sehingga ada kemungkinan data yang diperoleh kurang akurat. Informasi yang dibutuhkan untuk penghitungan AKB diambil dari pertanyaan khusus mengenai kelahiran dan kematian bayi dalam kurun waktu tertentu yang diajukan kepada responden wanita yang pernah kawin (BPS, 1988). Tidak bisa dipungkiri bahwa analisa tren kematian bayi 1967-2006 mempunyai kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh tingkat cakupan, kecermatan data dasar yang dipakai dalam penghitungan, teknik dan metode yang diaplikasikan yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan.

Pertanyaan-pertanyaan dalam sensus penduduk dan survei kependudukan yang digunakan untuk penghitungan AKB adalah "jumlah anak yang lahir hidup" dan "jumlah anak masih hidup". Data tersebut ditabulasikan dalam bentuk jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup menurut umur ibu yang dikelompokkan dalam 5 tahunan. Namun data dasar

tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan seperti yang diungkap oleh Brass (1975). Beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan terbatas pada anak-anak yang ibunya masih hidup pada saat sensus/survei. Tingkat kematian anak yang ibunya sudah meninggal kemungkinan lebih besar daripada yang ibunya masih hidup. Oleh karena itu AKB yang dihitung dari kematian anak dari ibu yang masih hidup saja cenderung lebih rendah dari keadaan sebenarnya.
2. Pada beberapa survei ditemukan bahwa ibu-ibu pada kelompok umur tua tidak melaporkan jumlah anaknya, baik sengaja atau karena lupa, sehingga kecenderungan untuk melaporkan jumlah anak yang sudah meninggal akan lebih besar lagi.
3. Anak-anak yang meninggal beberapa saat setelah dilahirkan cenderung tidak dilaporkan.
4. Lahir mati adalah bukan kematian; konsep ini sering disalah artikan sebagai lahir hidup yang kemudian segera mati dan dilaporkan sebagai kematian anak. Apabila ini terjadi maka AKB yang diperoleh akan lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya.

Selain itu Biro Pusat Statistik (1993) berdasarkan hasil penelitian kualitas data dasar untuk estimasi AKB dari survei rumah tangga SUSENAS 1993 mendapatkan bahwa ketepatan estimasi AKB dengan cara tidak langsung, juga akan dipengaruhi/tergantung pada:

1. Apakah asumsi yang melandasi suatu metode sesuai dengan keadaan demografi negara yang menggunakan metode tersebut.
2. Ketelitian pelaporan umur wanita yang pernah kawin dalam suatu survei atau sensus.

Namun demikian, dengan pemakaian metode yang tepat dan perapihan data dasar diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan ini.

7.2 Metode yang Digunakan

Dua macam cara yang biasa digunakan dalam memperkirakan tingkat kematian bayi ialah cara langsung (*direct method*) dan cara tidak langsung (*indirect method*). Cara langsung mengumpulkan keterangan mengenai kematian yang terjadi selama kurun waktu tertentu

(biasanya satu tahun sebelum waktu wawancara) dan membagi angka tadi dengan penyebut yang tepat, biasanya jumlah penduduk. Cara tidak langsung memperkirakan angka kematian bayi dengan menggunakan informasi tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan data kematian, misalnya struktur umur penduduk, komposisi anggota rumah tangga, jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak yang masih hidup, yang kemudian dikonversikan dengan metode tertentu. Cara langsung tidak dapat digunakan untuk memperkirakan angka kematian bayi dari hasil sensus karena informasi yang dikumpulkan tidak rinci seperti dalam pengumpulan data di beberapa survei kependudukan.

Ada beberapa metode penghitungan AKB. Pada tahun 1964 untuk pertama kalinya Brass memperkenalkan suatu metode yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli kependudukan yaitu Sullivan pada tahun 1972, kemudian Trussell pada tahun 1975, menyusul Feeney pada tahun 1977 dan Palloni-Heligman pada awal tahun 1980-an (UN, 1983 dan 1990). Dalam penghitungan AKB ada dua macam program komputer yang digunakan yaitu *Micro Computer Programs for Demographic Analysis (MCPDA)* dan *Mortpak*.

Program *MCPDA* dikeluarkan oleh *The Demographic Data for Development Project (DDD)*, *Institute for Resource Development* di Westinghouse. *MCPDA* terdiri dari 32 program penghitungan parameter demografi dan program yang dipakai untuk Metode Brass, Sullivan, Trussell, dan Feeney. Sedangkan *mortpak* adalah paket komputer dari United Nations yang terdiri dari 16 program penghitungan angka kematian. Program yang digunakan untuk memperkirakan AKB dalam analisa ini adalah *CEBCS (Children Ever Born Child Survival)* yang memperkirakan AKB dan AHH berdasarkan Metode Trussell dan Palloni-Heligman (UN, 1988).

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah **Metode Tidak Langsung**. Berikut akan diterangkan beberapa metode penghitungan AKB.

7.2.1 Metode Brass

Metode Brass (UN, 1967) menghitung rasio kematian anak dengan mengalikan data proporsi anak yang masih hidup dan proporsi anak yang sudah meninggal menurut umur ibu (dalam 5 tahunan) dengan suatu faktor pengali. Penghitungan ini menghasilkan suatu ukuran kematian anak yang diartikan sebagai banyaknya anak yang meninggal per 1.000 kelahiran sebelum anak tersebut mencapai usia 1, 2, 3, 5, 10, 15, dan 20 tahun atau diberi simbol q_1 , q_2 , q_3 , q_5 , q_{10} , q_{15} , dan q_{20} . Faktor pengali yang digunakan didasarkan pada nilai P_1/P_2 atau P_2/P_3 dengan P_1 , P_2 , dan P_3 adalah rata-rata anak lahir hidup pada wanita umur 15-19 untuk P_1 , 20-24 untuk P_2 , dan 25-29 untuk P_3 . Metode Brass mengasumsikan kematian konstan di masa lalu.

7.2.2 Metode Sullivan

Sullivan (1972) mengembangkan Metode Brass dengan perbedaan pada faktor pengali yang didapat dari persamaan regresi. Model regresi cara Sullivan ini terdiri dari empat model life table Coale-Demeny yaitu: West, South, East, and North. Pada saat ini para peneliti biasa memakai West Model untuk memperkirakan AKB karena pola mortalitas di Indonesia mendekati model tersebut. Dalam memperkirakan kematian anak, Sullivan hanya memakai rasio P_2/P_3 .

7.2.3 Metode Trusell

Tidak jauh berbeda dengan Sullivan, Trusell (UN, 1983) juga mengadakan pendekatan dengan cara regresi untuk memperoleh faktor pengalinya. Trusell memakai rasio P_1/P_2 dan P_2/P_3 sekaligus yang kemudian dikalikan dengan koefisien tertentu untuk mendapatkan faktor pengalinya. Trusell menyediakan satu set koefisien berdasarkan empat model tabel kematian Coale-Demeny. Selain itu terdapat pula satu set koefisien untuk penghitungan waktu rujukan yang diperkirakan berdasarkan rasio paritas di atas, yang selanjutnya dikonversikan ke kalender masehi. Untuk model yang

dikembangkannya, Trusell memakai asumsi perubahan kematian yang sesuai untuk digunakan di Indonesia.

7.2.4 Metode Feeney

Dalam penghitungan kematian, Feeney menyediakan tabel khusus yang dikembangkan dari model kurva fertilitas polinomial (Brass, 1975 dan Feeney, 1976). Rasio paritas yang dipakai adalah P_1/P_2 , P_2/P_3 dan P_3/P_4 . Dari setiap nilai rasio paritas dapat diperkirakan umur rata-rata melahirkan dari wanita dalam masa reproduksi yang akan menghasilkan rata-rata umur melahirkan dari seluruh penduduk wanita usia subur. Perkiraan angka kematian anak beserta waktu rujukannya dihitung berdasarkan nilai proporsi anak mati dan nilai umur rata-rata melahirkan. Feeney juga menyediakan tabel konversi waktu rujukan ke kalender masehi.

7.3 Keterbatasan

Pada Sensus Penduduk 2010, salah satu keistimewaannya adalah mengumpulkan data kematian menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Namun, beberapa ahli kependudukan menyatakan bahwa data kematian tersebut memiliki nilai yang terlalu rendah untuk Indonesia. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut dihitung dari metode *Brass Growth Balance* dan *General Growth Balance*. Kedua metode itu digunakan untuk mengukur tingkat kelengkapan (*completeness*) pengumpulan data kematian yang diperoleh dari sensus.

Dalam mengukur *completeness* data kematian, Brass menggunakan suatu metode pertumbuhan berimbang, dimana data kematian dibandingkan dengan proxi kelahiran. Pada penghitungan metode ini diasumsikan antara lain kelahiran dalam keadaan konstan, dan mengikuti tingkat pertumbuhan penduduk stabil. Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah tidak ada migrasi atau dengan kata lain

penduduk tertutup (*close population*). Hal yang sama juga harus dipenuhi untuk menghitung dengan metode *General Growth Balance*.

Secara nasional tingkat kelengkapan data kematian hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 44,26 persen. Berdasarkan hasil tersebut, para ahli demografi berpendapat bahwa angka kematian di Indonesia yang dikumpulkan dari SP2010 dianggap terlalu rendah dari kejadian kematian yang sebenarnya. Jadi angka kematian bayi yang sebenarnya terjadi lebih besar, ini dibuktikan dengan membandingkan angka kematian dari hasil sensus selalu lebih rendah dari angka kematian yang dihasilkan oleh survei yang menanyakan tentang kematian. Pola hasil sensus dan survei selalu menunjukkan hal yang sama baik pada daerah di wilayah Indonesia maupun di negara lain. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa ukuran-ukuran kematian dihitung berdasarkan data hasil pencacahan lapangan dan merupakan kejadian kematian yang dilaporkan responden pada SP2010.

VIII. TREN KEMATIAN BAYI DI INDONESIA

Estimasi AKB yang dihitung berdasarkan SP71, SP80, SP90, SP2000, dan SP2010 masing-masing merujuk kematian bayi tahun 1967, 1976, 1986, 1996 dan 2006. Angka kematian bayi yang dianalisa adalah AKB rata-rata yang dihitung dari probabilitas kematian bayi pada kelompok umur ibu 20-24, 25-29, dan 30-34. Berkaitan dengan analisa AKB, akan dibahas pula pola AHH dan level mortalitas. Sedangkan analisa AKB menurut provinsi akan didukung oleh perkiraan AHH dan level mortalitas menurut provinsi. Sebagaimana AKB, AHH juga dihitung berdasarkan rata-rata kelompok umur ibu 20-24, 25-29, dan 30-34.

8.1 Angka Kematian Bayi Menurut Beberapa Metode

AKB yang disajikan pada Tabel 8.1 menunjukkan bahwa perkiraan proporsi kematian bayi sebelum mencapai umur satu tahun menurut metode Brass, Sullivan, Trussel, dan Palloni tidak banyak berbeda, karena setiap metode merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Perbedaan yang besar hanya pada angka kematian bayi yang diperkirakan dengan cara Feeney, yang memberikan nilai yang sedikit lebih kecil dari hasil penghitungan metode lainnya. Hal yang sama ditunjukkan dalam penelitian Kasto (1983) yang membandingkan metode Brass, Sullivan, Trussel, dan Feeney. Dari tabel tersebut terlihat hasil estimasi AKB dari semua metode menunjukkan kecenderungan penurunan. Soemantri (1983) menyimpulkan bahwa dengan memperkirakan AKB dari rata-rata q_0 yang dihitung berdasarkan q_2 , q_3 , dan q_5 dari Life Table Model West, dengan Brass, Sullivan, ataupun Trussel tidak akan mempengaruhi nilai q_0 yang didapat. Kasto (1983) berpendapat dari segi metodologi, Metode Trussel lebih baik dari Brass dan Sullivan karena Trussel menggunakan kedua rasio paritas sekaligus yaitu P_1/P_2 dan P_2/P_3 , sedangkan Brass dan Sullivan memakai salah satu saja. Selain itu cara penghitungan Trussel mempunyai standard error terkecil (UN, 1983) bila dibandingkan dengan metode lain. Dengan alasan tersebut estimasi AKB yang dipakai untuk analisa AKB selanjutnya adalah estimasi AKB menurut Metode Trussel.

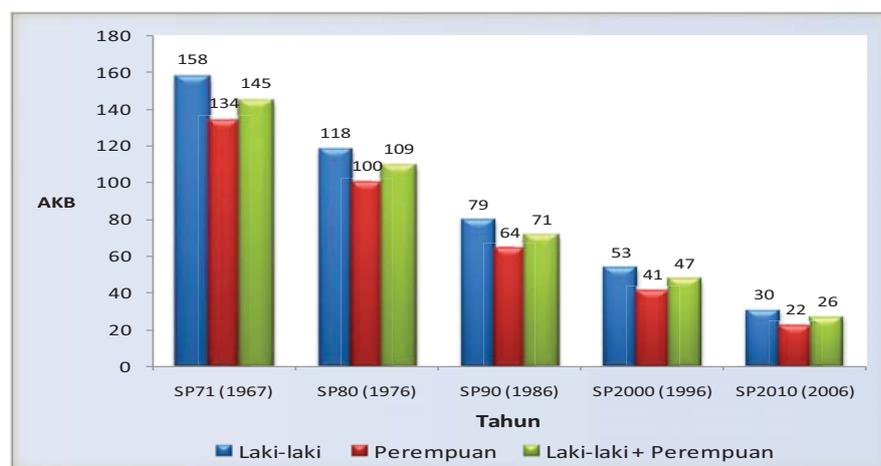
Tabel 8.1 Estimasi Angka Kematian Bayi dari Beberapa Metode Hasil SP1980-SP2010

Metode Penghitungan	SP1980 (1976)	SP1990 (1986)	SP2000 (1996)	SP2010 (2006)
Brass (Inchm)	109	71	55	26
Sullivan (Inchm)	107	70	54	26
Trussel (Mortpak)	110	71	47	26
Trussel (Inchm)	109	71	55	26
Feeney (Inchm)	102	62	42	19
Palloni (Mortpak)	106	70	47	26

Keterangan : Tahun dalam kurung menunjukkan tahun rujukan

8.2 Tren Angka Kematian Bayi di Indonesia 1967-2006

Selama 39 tahun terakhir, AKB di Indonesia cenderung menurun. Tabel 8.2 menyajikan estimasi AKB berdasarkan hasil SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010. Dari tabel tersebut nampak bahwa secara nasional terjadi penurunan AKB sekitar 82 persen selama periode 1967-2006, dengan persentasenya dari tahun ke tahun yang semakin cepat. AKB pada tahun 1967 adalah sebesar 145 per 1.000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1.000 kelahiran pada tahun 1976. Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per tahun.



Gambar 2. Tren Estimasi AKB Indonesia menurut Jenis Kelamin, Hasil SP71-SP2010 (per 1.000 Kelahiran Hidup)

Tabel 8.2
Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi
Hasil SP1971-SP2010

Provinsi	SP71 (1967)			SP80 (1976)			SP90 (1986)			SP2000 (1996)			SP2010 (2006)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11. Aceh	155	131	143	102	85	93	65	52	58	46	35	40	32	24	28
12. Sumatera Utara	132	112	121	97	81	89	68	54	61	50	39	44	30	22	26
13. Sumatera Barat	165	140	152	131	111	121	82	67	74	59	47	53	34	25	30
14. R i a u	159	135	146	119	101	110	72	58	65	55	43	48	27	19	23
15. J a m b i	167	142	154	131	111	121	81	66	74	59	47	53	34	25	29
16. Sumatera Selatan	168	143	155	111	93	102	79	64	71	59	47	53	29	22	25
17. Bengkulu	181	154	167	121	102	111	77	62	69	59	47	53	32	23	27
18. Lampung	158	134	146	108	91	99	77	62	69	55	43	48	27	19	23
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	47	53	30	22	26
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	16	20
31. DKI Jakarta	140	119	129	90	74	82	46	35	43	29	21	25	16	11	14
32. Jawa Barat	181	154	167	145	123	134	99	82	90	64	51	57	30	22	26
33. Jawa Tengah	156	132	144	108	90	99	72	58	65	50	39	44	24	17	21
34. DI Yogyakarta	111	93	102	69	55	62	47	36	42	29	21	25	19	13	16
35. Jawa Timur	131	111	120	106	89	97	71	57	64	55	43	48	28	20	24
36. Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	59	66	28	20	24
51. B a l i	142	120	130	101	84	92	58	45	51	41	31	36	23	17	20
52. Nusa Tenggara Barat	238	204	221	204	175	189	157	133	145	98	81	89	54	42	48
53. Nusa Tenggara Timur	167	142	154	139	118	128	85	70	77	64	51	57	44	34	39
61. Kalimantan Barat	156	133	144	129	109	119	89	74	81	64	51	57	32	23	27
62. Kalimantan Tengah	140	119	129	109	92	100	64	51	58	55	43	48	27	20	23
63. Kalimantan Selatan	179	152	165	134	113	123	99	83	91	78	63	70	39	30	34
64. Kalimantan Timur	113	95	104	109	92	100	65	52	58	46	35	40	25	18	21
71. Sulawesi Utara	124	105	114	102	85	93	70	56	63	33	24	28	29	21	25
72. Sulawesi Tengah	163	138	150	141	120	130	101	84	92	73	59	66	51	39	45
73. Sulawesi Selatan	175	149	161	120	102	111	78	63	70	64	51	57	36	27	31
74. Sulawesi Tenggara	181	154	167	126	107	116	85	70	77	59	47	53	46	35	40
75. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	51	57	63	50	56
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	42	48
81. Maluku	156	132	143	134	113	123	84	69	76	68	55	61	52	40	46
82. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	68	75	46	35	40
91. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	24	28
94. Papua	94 ^{*)}	78 ^{*)}	86 ^{*)}	114	96	105	88	73	80	64	51	57	22	16	19
INDONESIA	158	134	145	118	100	109	79	64	71	53	41	47	30	22	26

Catatan:

1. IMR dihitung dengan Metode Trussel dari kelompok umur Ibu 20–24, 25–29, 30–34
2. Angka dalam kurung () menunjukkan tahun rujukan
3. *) hanya mencakup daerah perkotaan

Selanjutnya berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan 71 per 1.000 kelahiran, yang berarti terjadi penurunan AKB sebesar 34,9 persen selama periode 1976-1986 atau rata-rata 3,5 persen per tahun. Pada periode berikutnya berdasarkan hasil SP2000, AKB pada tahun 1996 kembali turun lebih cepat menjadi 47 per 1.000 kelahiran atau 39 persen selama sepuluh tahun terakhir atau rata-rata 3,9 persen per tahun. Dan berdasarkan hasil SP2010, AKB telah menurun menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup, yang berarti terjadi penurunan sekitar 44 persen dalam 10 tahun terakhir.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa AKB selama 39 tahun terakhir ini telah menurun secara signifikan yang dimulai pada akhir tahun 1980-an. Hal ini kemungkinan karena secara nasional makin meningkatnya pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta membaiknya gizi masyarakat. Pembangunan di segala sektor yang terus dijalankan selama ini telah menaikkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pun bertambah baik, termasuk tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Keadaan ini akan makin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang selanjutnya akan membuat AKB terus menerus menurun sampai titik terendah.

8.3 Tren Angka Kematian Bayi menurut Provinsi

Sebelum dilaksanakan SP71 keragaman AKB menurut provinsi sulit diketahui karena terbatasnya data. Pada dekade 1960-an AKB antar provinsi cukup beragam dan keragaman ini terus berlangsung sampai tahun 1996. Tabel 8.2 menunjukkan bahwa perbedaan AKB antar provinsi selama 39 tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 1967 AKB terendah 2 kali lipat dari AKB tertinggi, 39 tahun kemudian kelipatan ini menjadi 4 kali. Hasil SP2010 menunjukkan bahwa AKB menurut provinsi beragam, dari yang terendah seperti di DKI Jakarta yaitu sekitar 14 kematian per 1.000 kelahiran sampai yang tertinggi di Gorontalo yaitu 56 kematian per 1.000 kelahiran. Beragamnya AKB per provinsi ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan keadaan sosial budaya dan belum meratanya aksesibilitas dan jangkauan fasilitas serta pelayanan kesehatan di setiap provinsi, disamping letak geografis Indonesia yang merupakan kepulauan dalam area yang cukup luas.

Di Pulau Jawa sampai tahun 2006, Provinsi Jawa Barat mempunyai AKB yang paling tinggi dari provinsi-provinsi lainnya dan lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 167, 134 dan 90 kematian per 1.000 kelahiran, masing-masing berdasarkan hasil SP71, SP80 dan SP90. Hasil SP2000 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah mulai mensejajarkan diri dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu dengan AKB sekitar 57 kematian per 1.000 kelahiran, menduduki peringkat kedua setelah Banten. Namun demikian, hasil SP2010 menunjukkan Jawa Barat kembali yang tertinggi di Pulau Jawa, yaitu 26 kematian per 1000 kelahiran. Selama 39 tahun terakhir di semua provinsi terjadi penurunan AKB, meskipun dengan kecepatan penurunan yang sangat bervariasi. Sebagai contoh, AKB Provinsi DKI Jakarta pada periode 1986-1996 turun dengan cepat dari 43 menjadi 25 kematian per 1.000 kelahiran, yang berarti turun sebesar 42 persen, dan menurun kembali menjadi 14 pada tahun 2006. Sementara itu pada periode yang sama (1986-1996) AKB Provinsi Bengkulu hanya turun sebesar 23 persen, yaitu dari 69 menjadi 53 kematian per 1.000 kelahiran, namun menurun tajam pada tahun 2006 menjadi 27 per 1.000 kelahiran.

Secara umum pola yang terjadi sejak SP71 sampai SP2000 menurut provinsi tidak banyak berubah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang AKB-nya tertinggi. Namun hasil SP2010 menunjukkan Provinsi Gorontalo mempunyai AKB tertinggi. Provinsi yang mempunyai AKB terendah telah terjadi pergeseran, DI Yogyakarta pada periode 1967-1986 sebagai provinsi yang AKB-nya terendah, namun hasil SP2000 dan SP2010 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai AKB terendah. Selain itu diketahui pula bahwa hampir semua provinsi-provinsi yang AKB-nya di atas angka nasional menurut SP71 secara umum hasil SP2010 masih tetap menunjukkan kondisi yang sama, seperti Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Provinsi Papua berdasarkan hasil SP71 mempunyai AKB yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, bahkan dengan angka nasional. Hal ini disebabkan karena cakupan SP71 di Papua hanya daerah perkotaan saja sehingga AKB yang dihitung berdasarkan hasil SP71 tentu saja hanya mencakup daerah perkotaan. Setelah itu

sejak SP80 cakupan sensus di Papua sudah mencapai ke seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, sehingga estimasi AKB-nya sudah mewakili seluruh wilayah Provinsi Papua.

8.4 Tren Level Mortalitas Indonesia dan Provinsi

Tabel 8.3 menyajikan level mortalitas per provinsi berdasarkan hasil SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010. Dari tabel tersebut terlihat adanya kenaikan level mortalitas dalam waktu 39 tahun terakhir. Pada periode 1967-1976 level mortalitas Indonesia masih dibawah 15, yang berarti masih tingginya kejadian kematian. Baru pada tahun 1986 dari hasil SP1990 terlihat mortalitas mulai bergerak diatas 15 yaitu sebesar 17,62 kemudian meningkat menjadi 19,92 pada tahun 1996 dan 21,44 pada tahun 2001. Hasil SP2010 telah mencapai 22,06 yang berarti selama kurun waktu 39 tahun terakhir level mortalitas telah meningkat sekitar 85 persen. Level mortalitas berbanding terbalik dengan AKB. Dengan demikian pola level yang terjadi dari hasil SP71 sampai dengan SP2010 sama dengan pola AKB hanya saja keadaannya terbalik, yaitu jika AKB menunjukkan kecenderungan menurun menurut hasil SP71 sampai SP2000 maka level mortalitas akan menunjukkan kecenderungan menaik dalam periode yang sama.

Seperti halnya AKB level mortalitas per provinsi juga sangat bervariasi. Turunnya AKB di suatu provinsi akan menaikkan level mortalitas di provinsi tersebut. Oleh karena itu pola level mortalitas yang terjadi di setiap provinsi akan sama dengan pola AKB di setiap provinsi tetapi dengan pola yang berlawanan. Hasil SP2010 memperlihatkan bahwa level mortalitas tertinggi terjadi di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Papua masing-masing sebesar 23,61; 23,35; dan 22,95. Provinsi yang mempunyai level mortalitas terendah adalah Gorontalo. Mulai dari 18,93 menurut hasil SP2000, naik menjadi 20,78 berdasarkan SUPAS95, kemudian turun menjadi 19,00 menurut hasil SP2010.

Tabel 8.3

Estimasi Level Mortalitas Menurut Provinsi, Hasil SP1971-SP2010

Provinsi	SP71 (1967)	SP80 (1976)	SP90 (1986)	SP2000 (1996)	SUPAS05 (2001)	SP2010 (2006)	Persentase Kenaikan				
							1967-1976	1976-1986	1986-1996	1996-2001	2001-2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11. Aceh	12,05	15,74	18,80	20,58	20,71	21,86	30,6	19,4	9,5	0,6	5,6
12. Sumatera Utara	13,53	16,11	18,56	20,17	22,01	22,11	19,1	15,2	8,7	9,1	0,4
13. Sumatera Barat	11,40	13,54	17,37	19,35	21,40	21,66	18,8	28,3	11,4	10,6	1,2
14. R i a u	11,80	14,39	18,18	19,76	22,49	22,43	21,9	26,3	8,7	13,8	-0,3
15. J a m b i	11,26	13,56	17,41	19,35	21,44	21,71	20,4	28,4	11,1	10,8	1,3
16. Sumatera Selatan	11,21	15,04	17,63	19,35	21,58	22,14	34,2	17,2	9,8	11,5	2,6
17. Bengkulu	10,48	14,30	17,80	19,35	21,01	21,90	36,5	24,5	8,7	8,6	4,3
18. Lampung	11,83	15,23	17,80	19,76	21,80	22,42	28,7	16,9	11,0	10,3	2,9
19. Bangka Belitung	-	-	-	19,35	22,33	22,04	-	-	-	15,4	-1,3
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	22,87	22,84	-	-	-	-	-
31. DKI Jakarta	12,98	16,70	20,54	22,23	23,05	23,61	28,7	23,0	8,2	3,7	2,4
32. Jawa Barat	10,45	12,65	15,97	18,93	20,91	22,12	21,1	26,2	18,5	10,4	5,8
33. Jawa Tengah	11,95	15,28	18,18	20,17	22,29	22,71	27,9	19,0	10,9	10,5	1,9
34. DI Yogyakarta	15,00	18,45	20,42	22,23	22,89	23,35	23,0	10,7	8,9	3,0	2,0
35. Jawa Timur	13,60	15,39	18,32	19,76	21,40	22,29	13,2	19,0	7,9	8,3	4,2
36. Banten	-	-	-	18,11	21,08	22,30	-	-	-	16,4	5,8
51. B a l i	12,87	15,79	19,48	20,99	22,17	22,81	22,7	23,4	7,8	5,6	2,9
52. Nusa Tenggara Barat	7,50	9,18	11,91	16,05	18,06	19,79	22,4	29,7	34,8	12,5	9,5
53. Nusa Tenggara Timur	11,30	13,03	17,11	18,93	20,03	20,71	15,3	31,3	10,6	5,8	3,4
61. Kalimantan Barat	11,94	13,71	16,74	18,93	21,65	21,90	14,8	22,1	13,1	14,4	1,1
62. Kalimantan Tengah	12,94	15,16	18,87	19,76	22,61	22,37	17,2	24,5	4,7	14,4	-1,1
63. Kalimantan Selatan	10,59	13,39	15,93	17,70	20,48	21,14	26,4	19,0	11,1	15,7	3,2
64. Kalimantan Timur	14,87	15,15	18,80	20,58	22,01	22,67	1,9	24,1	9,5	7,0	3,0
71. Sulawesi Utara	14,08	15,72	18,37	21,82	22,93	22,20	11,6	16,9	18,8	5,1	-3,2
72. Sulawesi Tengah	11,55	12,90	15,81	18,11	20,42	20,11	11,7	22,6	14,5	12,7	-1,5
73. Sulawesi Selatan	10,82	14,32	17,70	18,93	21,01	21,50	32,3	23,6	6,9	11,0	2,4
74. Sulawesi Tenggara	10,45	13,90	17,08	19,35	20,78	20,58	33,0	22,9	13,3	7,4	-1,0
75. Gorontalo	-	-	-	18,93	20,78	19,00	-	-	-	9,8	-8,6
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	19,80	-	-	-	-	-
81. Maluku	11,99	13,39	17,16	18,52	21,22	20,03	11,7	28,2	7,9	14,6	-5,6
82. Maluku Utara	-	-	-	17,29	20,55	20,55	-	-	-	18,8	0,0
91. Papua Barat	-	-	-	-	-	21,83	-	-	-	-	-
94. Papua	16,36 ^{*)}	14,79	16,82	18,93	21,76	22,95	-9,6	13,7	12,5	15,0	0,3
INDONESIA	11,87	14,47	17,62	19,92	21,44	22,06	21,9	21,8	13,1	7,6	2,9

Catatan:

1. Angka dalam kurung () menunjukkan tahun rujukan
2. *) hanya mencakup daerah perkotaan

8.5 Tren Angka Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi

Sejalan dengan penurunan AKB dan kenaikan level mortalitas, terjadi pola kenaikan AHH (lihat Tabel 8.4). Menurut hasil SP71, AHH Indonesia adalah 45,7 tahun yang kemudian naik menjadi 52,2 tahun berdasarkan hasil SP80. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar 14,2 persen. Sedangkan untuk periode 1986-1996 terjadi kenaikan sebesar 9,36 persen yaitu dari 59,8 tahun menurut hasil SP90 menjadi 65,4 tahun menurut hasil SP2000. Hasil SP2010 AHH telah mencapai 70,7 tahun yang artinya pada tahun 2006 setiap anak yang dilahirkan akan mempunyai harapan hidup secara rata-rata sampai berumur 70,7 tahun.

AHH per provinsi juga memperlihatkan pola kenaikan yang sama dengan pola level mortalitas, Provinsi yang AHH-nya terendah selama periode 1967-1986 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan pada periode 1996-2006 Provinsi Gorontalo. Provinsi yang AHH-nya tertinggi dari tahun 1967 sampai dengan 1986 yaitu Provinsi D.I Yogyakarta. Pada tahun 1996, AHH di Provinsi D.I. Yogyakarta sama dengan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 71,2 tahun. Pada tahun 2006, berdasarkan hasil SP2010 DKI Jakarta merupakan provinsi dengan AHH tertinggi.

Tabel 8.4
Estimasi Angka Harapan Hidup Waktu Lahir menurut Provinsi,
Hasil SP1971-SP2010

Propinsi	SP71 (1967)	SP80 (1976)	SP90 (1986)	SP2000 (1996)	SP2010 (2006)	Persentase Kenaikan			
						1967-1976	1976-1986	1986-1996	1996-2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11. Aceh	46,2	55,2	62,7	67,0	70,2	19,5	13,6	6,9	4,8
12. Sumatera Utara	49,9	56,1	62,1	66,0	70,9	12,4	10,7	6,3	7,4
13. Sumatera Barat	44,6	49,9	59,2	64,0	69,7	11,9	18,6	8,1	9,0
14. R i a u	45,6	52,0	61,2	65,0	71,7	14,0	17,7	6,2	10,3
15. J a m b i	44,2	50,0	59,3	64,0	69,9	13,1	18,6	7,9	9,2
16. Sumatera Selatan	44,1	53,6	59,8	64,0	70,9	21,5	11,6	7,0	10,8
17. Bengkulu	42,3	51,8	60,2	64,0	70,3	22,5	16,2	6,3	9,9
18. Lampung	45,6	54,0	60,2	65,0	71,7	18,4	11,5	8,0	10,3
19. Bangka Belitung	-	-	-	64,0	70,7	-	-	-	10,5
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	72,7	-	-	-	-
31. DKI Jakarta	48,6	57,6	66,3	71,2	74,7	18,5	15,1	7,4	5,0
32. Jawa Barat	42,3	47,7	55,8	63,0	70,9	12,8	17,0	12,9	12,5
33. Jawa Tengah	45,9	54,1	61,2	66,0	72,4	17,9	13,1	7,8	9,7
34. DI Yogyakarta	53,4	61,8	66,6	71,2	74,1	15,7	7,8	6,9	4,0
35. Jawa Timur	50,1	54,4	61,5	65,0	71,3	8,6	13,1	5,7	9,7
36. Banten	-	-	-	61,0	71,4	-	-	-	17,0
51. B a l i	48,3	55,4	64,3	68,1	72,7	14,7	16,1	5,9	6,7
52. Nusa Tenggara Barat	35,0	39,1	45,9	56,0	65,1	11,7	17,4	22,0	16,3
53. Nusa Tenggara Timur	44,4	48,7	58,6	63,0	67,4	9,7	20,3	7,5	6,9
61. Kalimantan Barat	45,9	50,4	57,7	63,0	70,3	9,8	14,5	9,2	11,6
62. Kalimantan Tengah	48,4	53,8	62,8	65,0	71,5	11,2	16,7	3,5	10,1
63. Kalimantan Selatan	42,6	49,6	55,7	60,0	68,4	16,4	12,3	7,7	14,1
64. Kalimantan Timur	53,2	53,8	62,7	67,0	72,3	1,1	16,5	6,9	7,9
71. Sulawesi Utara	51,3	55,2	61,6	70,1	71,1	7,6	11,6	13,8	1,4
72. Sulawesi Tengah	45,0	48,3	55,4	61,0	65,9	7,3	14,7	10,1	8,0
73. Sulawesi Selatan	43,2	51,8	60,0	63,0	69,3	19,9	15,8	5,0	10,1
74. Sulawesi Tenggara	42,3	50,8	58,5	64,0	67,0	20,1	15,2	9,4	4,7
75. Gorontalo	-	-	-	63,0	63,2	-	-	-	0,3
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	65,1	-	-	-	-
81. Maluku	46,0	49,6	58,7	62,0	65,7	7,8	18,3	5,6	6,0
82. Maluku Utara	-	-	-	59,0	67,0	-	-	-	13,5
91. Papua Barat	-	-	-	-	70,2	-	-	-	-
94. Papua	56.7 ^{*)}	53,0	57,9	63,0	73,0	-6,5	9,2	8,8	15,9
INDONESIA	45,7	52,2	59,8	65,4	70,7	14,2	14,6	9,4	8,2

Catatan:

1. Angka dalam kurung () menunjukkan tahun rujukan
2. *) hanya mencakup daerah perkotaan

<http://www.bps.go.id>

V. KESIMPULAN

Penurunan AKB di Indonesia dari tahun 1967-2006 cukup pesat yaitu sekitar 82 persen, namun diperkirakan penurunannya melambat di masa mendatang. Menurunnya AKB di Indonesia menurut beberapa peneliti (Utomo, 1984 dan Utomo dan Iskandar, 1986) disebabkan oleh faktor demografis dan sosial-ekonomi. Beberapa faktor demografis yang mempengaruhi AKB antara lain adalah jenis kelamin, tempat tinggal, urutan anak, selang kelahiran, dan umur ibu saat melahirkan. Sementara itu, faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi AKB adalah pendidikan, pekerjaan dan keadaan perumahan dari ibu yang pernah melahirkan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Supraptilah dan Soeradji (1979), bahwa tingkat kematian bayi semakin rendah dengan semakin tingginya tingkat sosial-ekonomi.

Angka kematian bayi antar provinsi di Indonesia sangat beragam, dari yang terendah seperti di DKI Jakarta yaitu sekitar 14 kematian per 1.000 kelahiran sampai yang tertinggi di Gorontalo yaitu 56 kematian per 1.000 kelahiran. Hull dan Sunaryo (1978) berpendapat bahwa ragam AKB antar provinsi ini dipengaruhi oleh makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti di Indonesia bagian Timur, beberapa provinsi di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, yang mengkonsumsi singkong dan sagu sebagai makanan pokok, malnutrisi merupakan masalah yang serius. Sedangkan menurut Utomo (1984) keragaman ini dipengaruhi oleh faktor geografi dan karakteristik sosial ekonomi yang tidak merata serta kualitas data yang tidak sama.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa level mortalitas meningkat selama periode 1967-2006. Kenaikan level mortalitas tertinggi terdapat di Bengkulu selama periode 1967-1976, Nusa Tenggara Timur selama periode 1976-1986, Nusa Tenggara Barat selama periode 1986-1996, Banten pada periode 1996-2001 dan pada periode 2001-2006 Nusa Tenggara Barat menjadi yang tertinggi kembali.

Sejalan dengan penurunan AKB, AHH juga meningkat selama periode 1967-2006. Peningkatan AHH selama periode tersebut sejalan dengan peningkatan level mortalitas. Jika dilihat per provinsi, Bengkulu mengalami peningkatan yang paling tajam selama periode 1967-1976, kemudian Nusa Tenggara Timur selama periode 1976-1986, dan untuk periode 1986-1996 adalah Nusa Tenggara Barat, sedangkan pada periode 1996-2006 adalah provinsi Banten.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persentase penurunan AKB dan kenaikan AHH sangat beragam, terutama terjadi pada periode 1976-1986 dan 1986-1996 serta 1996-2006. Lebih rinci lagi dapat dikatakan bahwa penurunan AKB dan peningkatan AHH di Indonesia Bagian Timur lebih lambat dibandingkan dengan penurunan AKB dan peningkatan AHH di Indonesia Bagian Barat.

Analisa mortalitas yang dilakukan dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih terarah dan terpadu. Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penentu kematian terutama pada bayi dan balita, baik secara nasional maupun pada wilayah yang lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih (1985) *"Differensial Mortalitas Bayi dan Anak di Jakarta dan Indonesia"*, dalam Analisa Kependudukan, berdasarkan data SP80, Jakarta, Biro Pusat Statistik
- Ananta, Aris dan Sri Moertingsih (1990) *"Perkembangan Penduduk Indonesia Menuju Tahun 2005"*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas -Universitas Indonesia
- BPS (1983), *"Perkiraan Angka Kelahiran dan Kematian Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980"*, BPS, Jakarta
- BPS (1988), *"Estimasi Tingkat Kelahiran dan Kematian Hasil Survei Penduduk AntaSensus 1985"*, Seri SUPAS No,35, BPS, Jakarta
- BPS (1993), *"Laporan Hasil Penelitian Kualitas Data Dasar Untuk Estimasi Angka Kematian Bayi dari Survei Rumah Tangga SUSENAS 1993"*, BPS, Jakarta
- BPS (1994), *"Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi"*, BPS, Jakarta
- BPS, 2001, *"Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, 2006, *"Estimasi Parameter Demografi : Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS (2011), *"Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010"*, BPS, Jakarta
- Brass, William (1975), *"Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data, Laboratories for Population on Statistics, An Occasional Publications"*, Chapel Hill: The Department of Biostatistics Scholl of Public Health The University of North Carolina
- Budiarso, Ratna L (1983) *"Angka dan Sebab Kematian Bayi dan Anak Balita: Survei Kesehatan Rumah Tangga 1980"*, Seminar Tingkat Kematian Bati di Indonesia, 1-3 Februari, BPS, Jakarta

- Utomo, Budi (1984) "*Kematian Bayi dan Anak di Indonesia: Beberapa Implikasi Kebijakan*" dalam Laporan Seminar dan Lokakarya Strategi Penelitian dan Strategi Program untuk Intensifikasi Penurunan Mortalitas Bayi dan Anak di Indonesia, Jakarta, 25-29 Mei 1984, Jakarta, Universitas Indonesia, hal 51-60
- Cho, Lee-Jay, Sam Suharto, Geoffrey McNicoll dan S,G, Made Mamas (1980), "*Population Growth of Indonesia: An Analysis of Fertility and Mortality Based on 1971 Population Census, Monographs of the Center for Southeast Asian Studies*", Kyoto University, hal 13-28
- Feeney, Griffith (1976), "*Estimating Infant Mortality from Child Survivorship Data by Age of Mother*", Asian and Pacific Census Newsletter
- Gani, Ascobat (1984) "*Kontribusi Program Kesehatan Dalam Penurunan Kematian Bayi dan Anak*", Strategi Penelitian dan Strategi Program untuk Intensifikasi Penurunan Mortalitas Bayi dan Anak di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta
- Gani, Ascobat, Eddy N, Hasmi, Ade Hidayati (1988), "*Morbiditas dan Mortalitas di Indonesia*", Konferensi Nasional Pusat Studi Kependudukan VI, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta
- Gardiner, Peter dan Oey, M (1983) "*Morbidity and Mortality in Java 1880-1940: The Evidence of The Colonial Report*" in N,Owen (1987), *Death and Disease in Southeast Asia: Exploration in Social, Medical and Demographic History*, Oxford University Press, Singapore
- Handayani S, Tuti (1986), "*Profil Kependudukan DI Yogyakarta*", Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hugo, Graeme J, Valerie J Hull, Terence J Hull dan Gavin Jones (1987), "*The Demographic Dimension in Indonesia Development*", Oxford University Press, Singapore
- Hull, T,H dan Sunaryo (1978), "*Levels and Trends of Infant and Child Mortality in Indonesia*", Working Paper No, 15, Yogyakarta: Population Institute, Gajah Mada University
- Institute for Resource Development/Westinghouse (1986), "*Micro Computer Programs for Demographic Analysis (MS-DOS Version)*"

- Kasto (1983) *"Perkiraan Tingkat Kematian Bayi di Indonesia"*, Seminar Tingkat Kematian Bayi di Indonesia, 1-3 Februari, 1983, BPS, Jakarta
- Soemantri, Suharsono (1983), *"Pola Perkembangan dan Perbandingan Antar Daerah Angka Kematian Bayi di Indonesia"*, Seminar Tingkat Kematian Bayi di Indonesia, 1-3 Februari 1983, BPS, Jakarta
- Sullivan, Jeremiah M (1972), *"Models for The Estimation of The Probability of Dying Between Birth and Exact of Early Childhood"*, Population Studies 26 (1)
- United Nations (1983), *"Indirect Techniques for Demographic Estimation"*, Manual X, New York: United Nations
- United Nation (1990), *"Step-by-Step Guide to The Estimation of Child Mortality, Population Studies"*, No, 107, New York: United Nations
- United Nations (1988), Mortpak-Life: *"The United Nations Software Package for Mortality Measurement"*, New York: United Nations (Pop Studies No, 104)
- United Nations (1967), *"Methods of Estimating Basic Demographic Measures from Incomplete Data"*, Manual IV, New York: UN
- Utomo, Budi dan Meiwita B, Iskandar (1986), *"Mortality Transition in Indonesia 1950-1980"*, AsianPopulation Studies Series No, 74, Bangkok: Economic and Social Commission for Asia and The Pacific
- Widayatun (1991), *"Womens Status and Child Survival in West Java, Indonesia"*, Asia-Pasific Population Journal 6(1)
- Widjojo Nitisastro (1970), *"Population Trends in Indonesia"*, Cornell University Press, Ithaca

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN B

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel B
Angka Harapan Hidup Waktu Lahir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Hasil SP1971 – SP2010

Provinsi	SP71 (1967)			SP80 (1976)			SP90 (1986)			SP2000 (1996)			SP2010 (2006)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
11. Aceh	44,6	47,6	46,2	53,5	56,8	55,2	60,8	64,5	62,7	65,0	69,0	67,0	68,2	72,2	70,2
12. Sumatera Utara	48,4	51,3	49,9	54,4	57,8	56,1	60,3	63,9	62,1	64,0	67,9	66,0	68,8	72,8	70,9
13. Sumatera Barat	43,1	46,0	44,6	48,4	51,4	49,9	57,5	60,9	59,2	62,1	65,9	64,0	67,7	71,7	69,7
14. R i a u	44,0	47,0	45,6	50,5	53,5	52,0	59,4	63,0	61,2	63,1	66,9	65,0	69,7	73,6	71,7
15. J a m b i	42,8	45,7	44,3	48,5	51,4	50,0	57,6	61,0	59,2	62,1	65,9	64,0	67,8	71,8	69,9
16. Sumatera Selatan	42,6	45,5	44,1	51,9	55,1	53,6	58,1	61,6	59,8	62,1	65,9	64,0	68,9	72,8	70,9
17. Bengkulu	40,9	43,7	42,3	50,2	53,2	51,8	58,5	62,0	60,2	62,1	65,9	64,0	68,3	72,2	70,3
18. Lampung	44,1	47,1	45,6	52,4	55,6	54,0	58,5	62,0	60,2	63,1	66,9	65,0	69,7	73,6	71,7
19. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,1	65,9	64,0	68,7	72,6	70,7
21. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,8	74,6	72,7
31. DKI Jakarta	47,1	50,0	48,6	55,8	59,2	57,6	64,3	68,2	66,3	69,2	73,1	71,2	72,8	76,5	74,7
32. Jawa Barat	40,8	43,6	42,3	46,2	49,1	47,7	54,2	57,4	55,8	61,1	64,8	63,0	68,9	72,8	70,9
33. Jawa Tengah	44,4	47,4	45,9	52,5	55,7	54,1	59,4	63,0	61,2	64,0	67,9	66,0	70,4	74,3	72,4
34. DI Yogyakarta	51,8	55,0	53,5	59,9	63,6	61,8	64,7	68,5	66,6	69,2	73,1	71,2	72,1	75,9	74,1
35. Jawa Timur	48,6	51,5	50,1	52,7	56,0	54,4	59,7	63,3	61,5	63,1	66,9	65,0	69,3	73,2	71,3
36. Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,1	62,8	61,0	69,4	73,3	71,4
51. B a l i	46,8	49,7	48,3	53,7	57,0	55,4	62,5	66,2	64,3	66,0	70,0	68,1	70,7	74,5	72,7
52. Nusa Tenggara Barat	33,7	36,3	35,0	37,7	40,4	39,1	44,6	47,3	45,9	54,3	57,6	56,0	63,1	67,0	65,1
53. Nusa Tenggara Timur	42,9	45,8	44,4	47,2	50,1	48,7	56,9	60,3	58,6	61,1	64,8	63,0	65,3	69,3	67,4
61. Kalimantan Barat	44,4	47,3	45,9	48,8	51,8	50,4	56,0	59,4	57,7	61,1	64,8	63,0	68,3	72,2	70,3
62. Kalimantan Tengah	47,0	49,8	48,4	52,2	55,4	53,9	61,0	64,7	62,8	63,1	66,9	65,0	69,5	73,4	71,5
63. Kalimantan Selatan	41,1	44,0	42,6	48,1	51,0	49,6	54,1	57,3	55,7	58,1	61,8	60,0	66,4	70,4	68,4
64. Kalimantan Timur	51,5	54,7	53,2	52,2	55,4	53,8	60,8	64,5	62,7	65,0	69,0	67,0	70,3	74,2	72,3
71. Sulawesi Utara	49,7	52,7	51,3	53,5	56,8	55,2	59,8	63,4	61,6	68,1	72,0	70,1	69,1	73,0	71,1
72. Sulawesi Tengah	43,4	46,4	45,0	46,9	49,7	48,3	53,8	57,0	55,4	59,1	62,8	61,0	63,9	67,8	65,9
73. Sulawesi Selatan	41,7	44,6	43,2	50,3	53,3	51,9	58,3	61,8	60,0	61,1	64,8	63,0	67,3	71,3	69,3
74. Sulawesi Tenggara	40,8	43,6	42,3	49,3	52,3	50,8	56,8	60,2	58,5	62,1	65,9	64,0	65,0	68,9	67,0
75. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,1	64,8	63,0	61,2	65,0	63,2
76. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	67,0	65,1
81. Maluku	44,5	47,5	46,0	48,1	51,0	49,6	57,0	60,4	58,7	60,1	63,8	62,0	63,7	67,6	65,7
82. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,2	60,7	59,0	64,9	68,9	67,0
91. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,1	72,1	70,2
94. Papua	54,9 ^{*)}	58,3 ^{*)}	56,7 ^{*)}	51,4	54,5	53,0	56,2	59,6	57,9	61,1	64,8	63,0	71,1	74,9	73,0
INDONESIA	44,2	47,2	45,7	50,6	53,7	52,2	58,1	61,5	59,8	63,5	67,3	65,4	68,7	72,6	70,7

Catatan:

1. IMR dihitung dengan Metode Trussel dari kelompok umur Ibu 20–24, 25–29, 30–34
2. Angka dalam kurung () menunjukkan tahun rujukan
3. *) hanya mencakup daerah perkotaan

C. MIGRASI

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

X. PENDAHULUAN

10.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia berasal dari masalah kependudukan. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia dan sebarannya dapat dilihat pada Tabel 10.1. Pada tahun 1930 penduduk Indonesia baru berkisar 60,9 juta, tetapi 70 tahun kemudian jumlahnya sudah lebih tiga kali lipat, yaitu menjadi 205,1 juta jiwa pada tahun 2000, dan pada tahun 2010 jumlahnya 237,6 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar akan menguntungkan bagi pembangunan jika mereka produktif, namun diperlukan modal serta investasi yang sangat besar. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi maka jumlah penduduk yang besar tersebut bahkan akan menjadi "beban" bagi pembangunan sosial ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi salah satunya disebabkan oleh tingkat fertilitas yang tinggi, yang mengakibatkan struktur umur penduduk Indonesia menjadi "muda", khususnya sebelum dicanangkannya program Keluarga Berencana (KB) secara intensif. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase penduduk dibawah 15 tahun dan rendahnya persentase penduduk 65 tahun ke atas. Struktur penduduk muda juga ditandai dengan rasio beban tanggungan yang tinggi. Pada tahun 1971 rasio beban tanggungan 86,9 persen artinya tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 86,9 orang yang tidak produktif. Angka tersebut menurun pada tahun 1990 tetapi masih cukup tinggi yaitu 63,61 persen, tahun 2000 turun lagi menjadi 53,8 persen dan pada tahun 2010 menjadi 51,3 persen. Besarnya rasio beban tanggungan ini merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena sebagian pendapatan yang sebenarnya dapat ditabung yang kemudian diinvestasikan bagi pembangunan ekonomi terpaksa harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan primer bagi penduduk yang tidak produktif. Di samping itu pertumbuhan angkatan kerja juga menjadi tinggi, yang merupakan beban pembangunan yang harus membuka kesempatan lapangan kerja bagi mereka. Masalah lain yaitu persebaran penduduk yang sangat tidak merata, merupakan ciri yang sangat tidak menguntungkan. Pulau Jawa dan Madura yang

merupakan pulau terkecil di antara 5 pulau utama mempunyai penduduk terbanyak, sehingga pulau ini menjadi daerah yang terpadat penduduknya. Dari tahun 1931 sampai tahun 1990 Pulau Jawa dan Madura dihuni oleh lebih dari 60 persen seluruh penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2000 dan 2010 angka ini sedikit dibawah 60 persen (lihat Tabel 10.1).

Tabel 10.1 Distribusi Penduduk Indonesia per Pulau, Tahun 1930, 1961, 1971, 1980, 1985, 1990, 2000, 2005 dan 2010
(x 1 000 000)

Tahun		Pulau					Jumlah
		Jawa & Madura	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Pulau-pulau lain	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1930	Jumlah	41,7	8,2	2,2	4,2	4,6	60,9
	%	68,7	13,5	3,6	6,9	7,3	100,0
1961	Jumlah	63,0	15,7	4,1	7,1	7,1	97,0
	%	65,0	16,2	4,2	7,3	7,3	100,0
1971	Jumlah	76,1	20,8	5,2	8,5	8,6	119,2
	%	63,8	17,5	4,4	7,1	7,2	100,0
1980	Jumlah	91,3	28,0	6,7	10,4	11,1	147,5
	%	61,9	19,0	4,5	7,1	7,5	100,0
1990	Jumlah	107,6	36,5	9,1	12,5	13,7	179,4
	%	60,0	20,3	5,1	7,0	7,6	100,0
2000	Jumlah	121,3	42,5	11,3	14,9	15,2	205,1
	%	59,1	21,0	5,5	7,3	7,3	100,0
2010	Jumlah	136,6	50,6	13,8	17,4	19,2	237,6
	%	57,5	21,3	5,8	7,3	8,1	100,0
Luas (%)		6,9	24,7	28,1	9,9	30,4	100,0
Sumber:							
1. Biro Pusat Statistik, (1981:5)							
2. Biro Pusat Statistik, (1987:4)							
3. Biro Pusat Statistik, (1992:2)							
4. Badan Pusat Statistik, (2001:18)							
5. Badan Pusat Statistik, (2010)							

Salah satu penyebab ketidakmerataan penduduk adalah kesenjangan pembangunan yang terjadi antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya, yang selanjutnya meningkatkan keinginan penduduk untuk pindah. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat. Di samping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai sifat atau kebiasaan pindah ke daerah lain atau lebih sering disebut dengan merantau. Daerah-daerah tersebut adalah Sumatera Barat dengan suku

Minangkabaunya, Sulawesi Selatan dengan suku Bugisnya dan Sumatera Utara dengan suku Bataknya.

Tinginya arus perpindahan penduduk dari luar Jawa ke Pulau Jawa mengakibatkan terjadinya kelebihan penduduk di Jawa dan kekurangan penduduk di luar Jawa. Masalah ini telah disadari sejak Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Untuk memecahkan masalah ini pemerintah saat itu melaksanakan program pemindahan penduduk ke luar Jawa yang disebut dengan program kolonisasi. Program ini dimulai tahun 1905 dengan memindahkan 155 keluarga dari Jawa menuju ke daerah kolonisasi di Gedong Tataan di Lampung. Di daerah ini desa-desa kolonisasi didirikan, dan tiap-tiap tahun ke daerah ini dikirim kolonis-kolonis dari Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1921 jumlah kolonis di Gedong Tataan mencapai 19.572 orang (Amral Sjamsu, 1960 : 5).

Pada tahun 1922 sebuah pemukiman yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo didirikan di dekat Kota Agung di Lampung Selatan. Di samping itu didirikan pula beberapa pemukiman besar dekat Sukadana di Lampung Tengah, sedangkan pemukiman lain didirikan di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada akhir tahun 1941 telah ada 173.959 orang yang tinggal dalam proyek-proyek kolonisasi di Lampung (termasuk orang yang dilahirkan di desa-desa baru ini) dan telah ada lebih dari 56 ribu orang di proyek kolonisasi di daerah lain (Hardjono, 1977 : 18).

Setelah kemerdekaan, program kolonisasi diteruskan oleh Pemerintah Indonesia, hanya terminologi kolonisasi diganti dengan nama Transmigrasi (Amral Sjamsu, 1960:78). Selama tahun limapuluhan dan tahun pertama enam puluhan, sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi kelebihan penduduk di Pulau Jawa, tetapi jumlah penduduk yang berhasil ditransmigrasikan ke luar Jawa sangat kecil jumlahnya. Sebagai contoh, pada tahun 1953 direncanakan untuk memindahkan sejumlah 100 ribu penduduk, tapi hanya sebesar 40 ribu orang yang dapat dipindahkan. Dengan dimulainya Pelita I pada tahun 1969 terjadilah perubahan tujuan dari transmigrasi. Program transmigrasi dikaitkan dengan usaha pembangunan daerah. Jadi penyelenggaraan transmigrasi adalah juga hakekat Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia serta landasan pelaksanaannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Martono, 1985:2).

Memperhatikan hal di atas, sasaran kebijaksanaan transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup penduduk
2. Pembangunan daerah/regional
3. Keseimbangan penyebaran penduduk di seluruh daerah
4. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia
5. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia
6. Kesatuan dan persatuan bangsa melalui asimilasi antar berbagai suku bangsa di Indonesia
7. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Adapun rencana (target) pengiriman keluarga transmigran dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok selama Pelita I, II, III, dan IV berturut-turut adalah 46.566, 82.959, 500.000, dan 750.000 (Martono, 1987), dan menurut Menteri Transmigrasi Martono saat itu, seluruh target tersebut dapat terealisasi. Provinsi-provinsi yang dijadikan daerah pemukiman transmigrasi dewasa ini adalah sebagai berikut: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

Sejalan dengan program redistribusi penduduk di atas, pemerintah juga menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pusat-pusat pertumbuhan (pusat-pusat pendidikan, perdagangan, dan industri) telah dibangun di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Prasarana transport baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan daerah-daerah di seluruh Nusantara telah ditingkatkan atau dibangun yang baru bagi yang belum ada. Kesemua ini menyebabkan mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia semakin meningkat. Perpindahan penduduk ini disusul oleh perpindahan para sanak keluarga secara swakarsa. Para migran merupakan pelopor dalam redistribusi penduduk di Indonesia. Mereka merupakan sumber informasi secara tidak langsung mengenai keadaan daerah pemukiman baru. Mereka merupakan titik-titik api yang akan menarik para migran dari daerah asal.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa migrasi penduduk antar wilayah di Indonesia sudah sejak lama terjadi. Volume dan arus migrasi penduduk semakin meningkat sejalan dengan derap pembangunan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Migrasi penduduk yang semakin meningkat ini mempengaruhi dampak pada persebaran dan komposisi penduduk. Dengan tersedianya data SP2010, maka perlu dilakukan analisa migrasi untuk mengetahui bagaimana pola, volume dan arus migrasi antar pulau dan antar provinsi khususnya untuk periode 2000-2010.

10.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan arus dan pola perpindahan penduduk di Indonesia berdasarkan hasil SP2010. Informasi ini akan dibandingkan dengan data pada masa lampau (hasil SP71, SP80, SP90 dan SP2000) untuk mengetahui tren dari arus perpindahan tersebut. Baik arus maupun pola migrasi yang disampaikan terbatas hanya sampai tingkat provinsi dan per pulau saja, hal ini sehubungan dengan data dan informasi yang tersedia.

Dalam memenuhi maksud tersebut di atas ada beberapa macam informasi yang dibutuhkan pada SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010. Informasi tersebut adalah keterangan tentang provinsi tempat lahir untuk studi migrasi seumur hidup dan keterangan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu untuk studi migrasi risen.

10.3 Sistematika Penulisan

Penyajian tulisan ini terbagi dalam beberapa bab, mulai Bab X hingga Bab XIII. Pada Bab X disajikan keterangan umum tentang keadaan kependudukan migrasi di Indonesia, yang merupakan latar belakang permasalahan dan tujuan penulisan. Bab XI tentang sumber data yang digunakan dan konsep serta definisi yang dipakai.. Pada Bab XII disajikan uraian tentang pola umum dan arus migrasi di Indonesia baik antar pulau maupun antar provinsi dari hasil SP2010 yang dibandingkan dengan hasil-hasil sensus penduduk sebelumnya (1971, 1980, 1990, dan 2000), yang dibedakan menurut migrasi seumur hidup dan migrasi risen.

Bab penutup dari tulisan ini (Bab XIII) merupakan intisari dari seluruh tulisan ini dengan menyetengahkan butir-butir terpenting, dan memberikan arahan terhadap studi yang dapat dilaksanakan di waktu yang akan datang.

<http://www.bps.go.id>

XI. DATA DAN METODOLOGI

11.1 Sumber Data

Data yang digunakan untuk analisa migrasi penduduk ini adalah data hasil SP2010. Untuk membandingkan dengan masa lampau, juga digunakan hasil SP71, SP80, SP90, dan SP2000. Untuk hasil SP71 digunakan penerbitan Serie D, untuk SP80 dan SP90 bersumber pada penerbitan Serie S-2, SP2000 berdasarkan tabel-tabel penerbitan Serie L-2, dan untuk SP2010 bersumber pada Statistik Indonesia.

Informasi mengenai mobilitas penduduk di Indonesia yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk sampai dengan tahun 2010 sangat terbatas. Mobilitas penduduk non-permanen (ulang-alik dan sirkulasi), dan perilaku mobilitas penduduk tidak dapat terungkap dari data yang didapat. Walaupun ada kelemahan-kelemahannya menurut Sundrum (1976:93) data penduduk dari hasil SP71 merupakan data migrasi yang baik di Asia.

Dalam SP2010 informasi mengenai migrasi penduduk dikumpulkan dalam 2 pertanyaan pokok, yaitu tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Persamaan antara SP2010 dengan SP2000 adalah mengenai informasi satuan wilayah pindah yang dipakai yaitu dapat diperoleh informasi perpindahan sampai tingkat kabupaten/kota. Sedikit perbedaan antara SP2000 dengan SP2010 adalah mengenai perpindahan lima tahun yang lalu, yaitu pada SP2000 dapat diperoleh informasi perpindahan sampai antar desa, sedangkan pada SP2010 terbatas pada perpindahan antar kabupaten/kota. Jenis pertanyaan mengenai migrasi penduduk pada rumah tangga sampel dari SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010 dapat dilihat dalam Tabel 11.1.

Tabel 11.1 Pertanyaan Mengenai Migrasi Penduduk Pada Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010

Sensus Penduduk 1971		Sensus Penduduk 1980		Sensus Penduduk 1990		Sensus Penduduk 2000		Sensus Penduduk 2010	
1	Tempat lahir (provinsi, kabupaten/kota)	1	Provinsi tempat lahir	1	Provinsi tempat lahir	1	Tempat lahir (provinsi, kabupaten/kota)	1	Tempat lahir (provinsi, kabupaten/kota)
2	Pernah tinggal di provinsi lain?	2	Lamanya tinggal di provinsi ini	2	Lamanya tinggal di provinsi ini	2	Tempat tinggal 5 tahun yang lalu (provinsi, kabupaten/kota)	2	Tempat tinggal 5 tahun yang lalu (provinsi, kabupaten/kota)
3	Provinsi tempat tinggal terakhir sebelum disini	3	Tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di provinsi ini	3	Tempat tinggal sebelumnya (provinsi)				
4	Lamanya tinggal di provinsi tempat tinggal sekarang	4	Tempat tinggal 5 tahun yang lalu (provinsi)	4	Tempat tinggal 5 tahun yang lalu (provinsi)				

11.2 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang dipakai dalam tulisan ini adalah konsep dan definisi yang digunakan pada SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010. Dalam SP71, SP80, dan SP90 ada 4 pertanyaan yang digunakan untuk penentuan dan penghitungan migrasi yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, dalam SP2000 hanya ada 3 pertanyaan yang dikumpulkan yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, dan dalam SP2010 ada 2 pertanyaan yang dikumpulkan yaitu tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Untuk keterbandingan data dalam tulisan ini analisa migrasi yang akan dibahas adalah migrasi antar provinsi.

Berdasarkan dua pertanyaan yang berhubungan dengan migrasi yang dikumpulkan pada SP2010, penduduk yang dicacah dapat digolongkan menjadi migran dan bukan migran (lihat Tabel 11.2). Jenis migran yang dikumpulkan pada SP2000 dan SP2010 sama, yaitu migran seumur hidup (*life time migrant*) dan migran risen (*recent migrant*).

11.2.1 Migran Seumur Hidup (*Life Time Migrant*) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahanya. Dalam konsep ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda, maka termasuk migrasi seumur hidup.

11.2.2 Migran Risen (*Recent Migrant*) adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir ini (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen.

Tabel 11.2 Migran dan Bukan Migran Berdasarkan Kedua Pertanyaan dalam SP2010

Pertanyaan	Migran	Bukan Migran
1. Provinsi dan kabupaten/kota tempat lahir.	Seseorang yang dicacah di suatu provinsi atau kabupaten/kota yang bukan provinsi atau kabupaten/kota tempat kelahirannya. Migran ini disebut migran seumur hidup	Seseorang yang dicacah di provinsi atau kabupaten/kota tempat ia dilahir-kan.
2. Provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu.	Seseorang dimana provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal seka-rang berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Migran ini disebut migran risen	Seseorang dimana provinsi atau kabu-paten/kota tempat tinggal sekarang sama dengan provinsi atau kabupaten/ kota tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

XII. POLA DAN ARUS MIGRASI

12.1 Migrasi Seumur Hidup

12.1.1 Migrasi Seumur Hidup Antar Pulau

Dari Tabel 12.1 terlihat bahwa untuk migrasi keluar, selama 39 tahun terakhir secara absolut Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak mengeluarkan migran, yaitu: pada tahun 1971 sebanyak 1,9 juta, tahun 1980 sebanyak 3,6 juta, tahun 1990 sebanyak 5,1 juta, dan tahun 2000 sebanyak 5,4 juta, yang kemudian pada tahun 2010 menjadi 6,4 juta migran. Mulai tahun 1971 hingga tahun 2010 migran keluar tersebut sebagian besar menuju Pulau Sumatera, bahkan sampai tahun 1980 persentasenya mencapai lebih dari 80 persen. Namun demikian mulai tahun 1990 terjadi penurunan arus migran dari Pulau Jawa ke Sumatera yaitu menjadi hanya sebesar 69,73 persen, tahun 2000 persentasenya menurun lagi menjadi 62,55 persen, dan pada tahun 2010 ada sedikit kenaikan menjadi 57,81 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada periode 1990-2010 penyebaran penduduk dari Pulau Jawa sudah mulai menyebar ke pulau-pulau lain, tidak hanya terpusat di Pulau Sumatera saja.

Berikutnya Pulau Sumatera yang menduduki urutan kedua dalam besarnya migrasi keluar, pada tahun 1971 mempunyai migran keluar sebesar 369 ribu dan pada tahun 1980 naik menjadi 786,4 ribu migran keluar. Selanjutnya mulai tahun 1990 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan hingga menjadi diatas 1 juta migran keluar, yaitu: pada tahun 1990 sebanyak 1,2 juta, pada tahun 2000 sebanyak 1,7 juta dan 2010 menjadi 2,4 juta migran keluar. Sebagian besar migran keluar dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa yaitu 94,31 persen pada tahun 1971, 91,35 persen pada tahun 1980, 90,94 persen pada tahun 1990, 91,20 persen pada tahun 2000 dan 90,85 persen pada tahun 2010. Dari data tersebut terlihat bahwa arus migrasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa boleh dikatakan hampir tidak ada perubahan. Kecenderungan orang Sumatera pergi (pindah) menuju Pulau Jawa masih tetap merupakan prioritas utama.

Seperti halnya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan juga merupakan daerah yang migran keluaranya kebanyakan menuju Pulau Jawa. Arus yang terjadi dari Pulau Kalimantan menuju Pulau Jawa cenderung meningkat sejak tahun 1971 sampai tahun 2000, namun hasil SP2010 menunjukkan bahwa migrasi keluar dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa menurun sekitar empat persen dari tahun 2000. Sementara untuk Kepulauan Lain, sampai tahun 1980 sebagian besar migran keluaranya masih menuju Pulau Jawa, selanjutnya mulai tahun 1990 hingga 2010 arus migrasi mulai menunjukkan perubahan bahwa selain Pulau Jawa, yaitu Pulau Sulawesi juga merupakan daerah tujuan untuk pindah.

Berbeda dengan Pulau Sulawesi, arus migran yang keluar dari pulau ini hampir tersebar secara merata ke pulau-pulau lain dan kecenderungan ini sudah berjalan sejak tahun 1971 yang berlangsung terus sampai tahun 2010. Walaupun terjadi perubahan persentase pada setiap periode tetapi kecenderungan arus migrasi dari periode ke periode menunjukkan semakin meratanya arus tujuan migrasi yang keluar dari Pulau Sulawesi ke pulau-pulau lain. Dapat dimaklumi mengapa Pulau Jawa sebagai pulau yang menjadi daerah tujuan utama migran dari pulau-pulau yang lain karena pulau ini merupakan tempat pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga penduduk dari pulau-pulau di luar Jawa ingin menetap (tinggal) di Pulau Jawa.

Tabel 12.2 menyajikan migran masuk seumur hidup menurut pulau tempat lahir dan tempat tinggal sekarang. Untuk migrasi masuk, Pulau Sumatera adalah pulau yang paling banyak menerima migran baik pada tahun 1971, 1980, 1990, 2000 maupun pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut lebih dari 90 persen sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 adalah migran yang berasal dari Pulau Jawa. Demikian juga Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan lain, migran yang masuk ke pulau-pulau ini sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa yang memang mempunyai penduduk terbesar di Indonesia merupakan pulau pengirim migran terbesar untuk setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sedangkan migrasi masuk ke Pulau Jawa sendiri dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 kebanyakan berasal dari Pulau Sumatera. Persentase migran Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1971, sekitar 60 persen migran Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa, 39 tahun kemudian (tahun 2010), lebih

dari 70 persen migran Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa, kondisi ini menunjukkan betapa kuat daya tarik Pulau Jawa untuk migran Pulau Sumatera.

Tabel 12.1 Persentase Migran Keluar Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010

Tempat Lahir	Tahun	Tempat Tinggal Sekarang					Jumlah	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Migran Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumatera	1971	-	94,31	1,90	2,17	1,62	100,00	369.000
	1980	-	91,35	3,24	2,88	2,53	100,00	786.424
	1990	-	90,94	4,08	2,32	2,66	100,00	1.175.672
	2000	-	91,20	4,56	2,11	2,13	100,00	1.710.861
	2010	-	90,85	4,81	1,77	2,57	100,00	2.440.471
Jawa	1971	89,66	-	4,65	2,95	2,74	100,00	1.935.000
	1980	81,06	-	10,44	4,67	3,83	100,00	3.584.868
	1990	69,73	-	16,67	6,24	7,36	100,00	5.053.191
	2000	62,55	-	22,02	6,27	9,16	100,00	5.380.889
	2010	57,81	-	23,78	6,55	11,86	100,00	6.426.024
Kalimantan	1971	17,00	75,00	-	6,00	2,00	100,00	100.000
	1980	12,58	78,19	-	6,26	2,97	100,00	155.785
	1990	9,50	79,95	-	7,28	3,27	100,00	247.594
	2000	8,50	79,47	-	7,77	4,26	100,00	289.520
	2010	9,89	75,91	-	10,06	4,14	100,00	435.297
Sulawesi	1971	34,22	37,26	8,75	-	19,77	100,00	263.000
	1980	26,67	25,08	22,64	-	25,61	100,00	545.189
	1990	14,23	27,33	29,24	-	29,20	100,00	649.718
	2000	14,79	27,35	36,99	-	20,87	100,00	777.450
	2010	8,87	21,33	39,35	-	30,44	100,00	1.237.160
Kepulauan Lain	1971	25,45	56,36	2,73	15,46	-	100,00	110.000
	1980	13,32	49,70	4,88	32,10	-	100,00	231.139
	1990	13,63	37,22	10,88	38,27	-	100,00	439.024
	2000	11,93	37,83	13,45	36,79	-	100,00	699.850
	2010	12,66	40,15	14,78	32,41	-	100,00	834.361

Banyaknya migran masuk dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa adalah hal yang wajar, karena Pulau Sumatera secara geografis berdekatan dengan Pulau Jawa dibanding dengan pulau-pulau lainnya, dan juga sistem transportasi yang menghubungkan kedua pulau ini lebih baik dan lancar dibandingkan dengan sistem transportasi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain (selain Pulau Sumatera). Selain itu kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pembangunan di Pulau Jawa yang lebih baik dari pulau-pulau lainnya juga merupakan daya tarik migran, bukan hanya migran dari Pulau Sumatera juga migran dari pulau lainnya.

Tabel 12.2 Persentase Migran Masuk Seumur Hidup menurut Pulau Tempat Lahir dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010

Tempat Tinggal Sekarang	Tahun	Tempat Lahir					Jumlah	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Migran Masuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumatera	1971	-	92,78	0,91	4,81	1,50	100,00	1.870.000
	1980	-	93,69	0,63	4,69	0,99	100,00	3.101.814
	1990	-	95,25	0,63	2,50	1,62	100,00	3.699.393
	2000	-	93,79	0,69	3,20	2,33	100,00	3.588.945
	2010	-	93,50	1,08	2,76	2,66	100,00	3.973.093
Jawa	1971	59,69	-	12,86	16,81	10,64	100,00	583.000
	1980	65,80	-	11,16	12,52	10,52	100,00	1.091.855
	1990	66,49	-	12,31	11,04	10,16	100,00	1.608.136
	2000	68,80	-	10,15	9,38	11,68	100,00	2.267.873
	2010	70,46	-	10,50	8,39	10,65	100,00	3.146.664
Kalimantan	1971	5,69	73,17	-	18,70	2,44	100,00	123.000
	1980	4,77	70,02	-	23,10	2,11	100,00	534.266
	1990	4,26	74,66	-	16,84	4,24	100,00	1.127.938
	2000	4,74	72,05	-	17,49	5,72	100,00	1.644.690
	2010	5,20	67,75	-	21,58	5,47	100,00	2.255.733
Sulawesi	1971	9,09	64,77	6,82	-	19,32	100,00	88.000
	1980	8,27	61,09	3,60	-	27,04	100,00	273.987
	1990	5,16	59,65	3,41	-	31,78	100,00	528.629
	2000	5,53	51,63	3,44	-	39,41	100,00	653.389
	2010	5,54	54,07	5,63	-	34,76	100,00	778.039
Kepulauan Lain	1971	5,31	46,90	1,77	46,02	-	100,00	113.000
	1980	6,59	45,56	1,54	46,31	-	100,00	301.483
	1990	5,19	61,90	1,35	31,56	-	100,00	601.103
	2000	5,17	70,02	1,75	23,05	-	100,00	703.673
	2010	5,15	62,50	1,48	30,88	-	100,00	1.219.784

12.1.2 Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi

Tabel 12.3 menunjukkan bahwa pola dan arus migrasi seumur hidup per provinsi sangat bervariasi dan besarnya tidak selalu sama antara satu provinsi dengan provinsi lain. Secara umum provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan provinsi-provinsi pengirim migran, baik pada tahun 1971, 1980, 1990, 2000 maupun pada tahun 2010. DKI Jakarta sejak tahun 1971 hingga pada tahun 2010 merupakan provinsi penerima migran. Sedangkan Jawa Barat pada tahun 1971 dan 1980 merupakan provinsi pengirim migran, tetapi pada tahun 1990, 2000 dan 2010 menjadi provinsi penerima migran. Sejak Banten menjadi provinsi baru pada tahun 2000, hingga kini menjadi provinsi penerima migran, hal ini dapat dimaklumi karena Banten

merupakan daerah industri sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi migran yang berasal dari daerah lain. Bali sejak tahun 1971 sampai tahun 2000 merupakan provinsi pengirim migran, tetapi pada tahun 2010 berubah menjadi penerima migran. Sebaliknya Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1971 dan 1980 merupakan penerima migran, tetapi pada tahun 1990, 2000 dan 2010 menjadi pengirim migran.

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sejak tahun 1971 hingga tahun 2000 DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak didatangi oleh migran, dengan jumlahnya yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 DKI Jakarta menerima sekitar 1,8 juta migran, tahun 1980 menerima sekitar 2,6 juta migran, tahun 1990 menerima 3,1 juta migran dan pada tahun 2000 menerima 4,1 juta migran. Pada tahun 2010 Jawa Barat menggeser kedudukan DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling banyak didatangi migran dengan menerima migran sebesar 5,2 juta orang. Jadi untuk pertama kalinya sejak 39 tahun yang lalu, DKI Jakarta bukan lagi menjadi tujuan migran. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan pesatnya pembangunan perumahan dan industri di pinggiran Kota Jakarta yang merupakan wilayah Provinsi Jawa Barat. Provinsi kedua terbesar yang didatangi migran pada tahun 2010 adalah DKI Jakarta, dengan jumlah migran sebesar 5,2 juta orang.

Pada tahun 1971 dan 1980 Lampung merupakan provinsi kedua terbesar yang menjadi daerah tujuan migran dengan jumlah migran tidak kurang dari 1 juta orang pada tahun 1971 dan 1,8 juta migran pada tahun 1980 masuk ke provinsi ini. Pada tahun 1990 Lampung tergeser oleh Jawa Barat menjadi provinsi ketiga terbesar yang didatangi oleh migran. Pada tahun 2000 Lampung kembali tergeser oleh Riau dan Banten sehingga menjadi provinsi kelima terbesar yang didatangi oleh migran. Pada tahun 2010 Lampung menjadi provinsi keempat terbesar yang didatangi migran setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Walaupun demikian dalam jumlah absolut sebagai penerima migran, Lampung dan Riau merupakan provinsi-provinsi penerima migran terbesar di luar Pulau Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi terbesar di Indonesia, pada tahun 1971 Lampung menerima tidak kurang dari 1 juta migran, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta orang pada tahun 1980 dan 1990.

Suatu fenomena menarik yang ditemukan disini adalah pada tahun 2000 Provinsi Riau sebelum pecah menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, jumlah migran yang masuk ke Provinsi Riau lebih besar dari Lampung. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan perkembangan industri di Pulau Batam, selain itu Provinsi Riau juga merupakan provinsi penghasil minyak mentah. Kedua hal ini menjadi daya tarik migran masuk ke Provinsi Riau. Setelah pecah menjadi 2 provinsi pada tahun 2005, maka jumlah migran yang masuk tersebar ke 2 provinsi tersebut sehingga Provinsi Lampung kembali menjadi provinsi terbesar di luar Pulau Jawa yang menjadi daerah tujuan migran.

Dari Tabel 12.3 juga menunjukkan bahwa arus migrasi keluar per provinsi juga mempunyai pola sendiri-sendiri untuk setiap provinsi. Tidak ada provinsi yang mempunyai pola yang sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi yang paling besar migran keluarnya adalah Jawa Tengah, baik pada tahun 1971 (1,8 juta orang), 1980 (3,2 juta orang), 1990 (4,5 juta orang), 2000 (5,4 juta orang) maupun pada tahun 2010 (6,8 juta orang). Tiga provinsi yang menjadi tujuan utama dari migran Jawa Tengah pada tahun 2005 adalah provinsi Jawa Barat sebesar 23,74 persen, DKI Jakarta sebesar 22 persen dan Banten sebesar 10,21 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengapa Jawa Barat merupakan daerah tujuan utama bagi migran yang berasal dari Jawa Tengah, karena Jawa Barat mempunyai daya tarik sebagai daerah industri, juga adanya sarana transportasi yang cukup memadai baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Provinsi kedua terbesar migrasi keluarnya pada tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010 adalah Jawa Timur dengan jumlah migran masing-masing sebesar 1,6 juta, 2,5 juta, 3,1 juta, dan 3,9 juta. Sedangkan pada tahun 1971, provinsi kedua terbesar adalah provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta migran keluar. Migrasi keluar dari Jawa Timur tersebar merata ke beberapa provinsi. Pada tahun 2010 migran keluar dari Jawa Timur yang menuju Jawa Barat sebesar 12,17 persen, DKI Jakarta sebesar 10,51 persen dan Kalimantan Timur sebesar 10,46 persen, sisanya tersebar ke provinsi-provinsi lainnya. Provinsi ketiga yang terbesar migran keluarnya pada tahun 1980, 1990 dan 2000 adalah Jawa Barat, dimana besarnya migran keluar dari provinsi ini pada tahun 1980 adalah 1,5 juta, pada tahun 1990 sebesar 1,8 juta dan pada tahun 2000 sebesar 2,0 juta. Pada tahun 2010 Jawa Barat tergeser oleh DKI Jakarta menjadi provinsi ketiga yang paling besar migran keluarnya. Hal ini kemungkinan disebabkan keadaan Kota DKI Jakarta yang semakin padat penduduknya sehingga menyebabkan: polusi,

kemacetan, kriminalitas yang meningkat, masalah sampah dan masalah lainnya yang membuat orang merasa tidak nyaman tinggal di DKI Jakarta. Migran yang keluar dari DKI Jakarta sebagian besar menuju provinsi tetangganya yaitu Jawa Barat sebesar 57,26 persen dan Banten sebesar 25,92 persen.

Migrasi neto seumur hidup hasil SP71, SP80, SP90, SP2000 dan SP2010 menunjukkan bahwa hampir semua provinsi polanya tidak berubah, kecuali provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Dua provinsi pada periode yang sama tetap sebagai pengirim migran (migrasi neto negatif) terbesar adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu provinsi-provinsi yang polanya berubah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Jika jumlah migrasi neto Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau digabung, terlihat bahwa provinsi penerima terbesar di luar Pulau Jawa adalah Provinsi Riau. Namun, bila Provinsi Kepulauan Riau dikeluarkan maka Kalimantan Timur menjadi provinsi penerima migran terbanyak di luar Pulau Jawa pada tahun 2010.
- Provinsi yang pada tahun 1971 sebagai pengirim migran, yang kemudian sejak tahun 1980 hingga tahun 2010 berubah sebagai penerima migran adalah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1980 sebagai penerima migran, kemudian sejak tahun 1990 hingga 2010 sebagai pengirim migran adalah Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1980 sebagai pengirim migran, kemudian sejak tahun 1990 hingga tahun 2010 sebagai penerima migran adalah Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 1990 sebagai penerima migran, kemudian sejak tahun 2000 hingga 2010 sebagai pengirim migran adalah Provinsi Maluku.
- Provinsi yang pada tahun 1971 hingga tahun 2000 sebagai pengirim migran, tetapi pada tahun 2010 berubah sebagai penerima migran adalah Provinsi Bali.
- Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 1971, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi pengirim migran, kemudian sejak tahun 1980 hingga tahun 1990 sebagai penerima migran, tetapi pada tahun 2000 dan 2010 kembali berubah sebagai provinsi pengirim migran.

Hasil SP2010 menunjukkan bahwa provinsi penerima migran (migrasi neto positif) terbesar adalah Jawa Barat (2,2 juta), kemudian Banten (2,2 juta) dan Riau (1,6 juta). Provinsi penerima migran (migrasi neto positif) yang terkecil adalah provinsi Maluku Utara (0,04 juta). Sedangkan provinsi-provinsi pengirim migran (migrasi neto negatif) terbesar adalah Jawa Tengah (5,9 juta), Jawa Timur (2,9 juta) dan Sumatera Utara (1,7 juta), dan provinsi pengirim migran (migrasi neto negatif) terkecil adalah provinsi Sulawesi Utara (0,01 juta).

Tabel 12.3 Migrasi Seumur Hidup 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010

Provinsi	Migran Masuk					Migran Keluar					Migrasi Neto				
	1971	1980	1990	2000	2010	1971	1980	1990	2000	2010	1971	1980	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Nanggroe Aceh Daruss:	60.982	143.365	193.285	100.166	213.553	65.835	116.010	125.563	244.314	264.194	-4.853	27.355	67.722	-144.148	-50.641
Sumatera Utara	530.012	547.715	452.918	447.897	521.847	188.326	417.659	770.093	1.336.772	2.298.140	341.686	130.056	-317.175	-888.875	-1.776.293
Sumatera Barat	87.901	131.438	216.014	245.000	344.254	324.897	558.804	642.908	937.799	1.151.433	-236.996	-427.366	-426.894	-692.799	-807.179
Riau	20.606	343.024	681.627	1.175.960	1.911.760	41.636	86.540	127.672	180.778	314.303	-21.030	256.484	553.955	995.182	1.597.457
Jambi	155.924	293.245	470.848	566.153	738.961	27.487	47.151	77.299	149.376	181.189	128.437	246.094	393.549	416.777	557.772
Sumatera Selatan	327.312	608.497	932.032	987.157	1.017.990	199.060	333.024	443.384	525.954	779.239	128.252	275.473	488.648	461.203	238.751
Bengkulu	36.038	121.274	251.232	355.048	347.651	24.753	39.019	46.720	73.390	110.893	11.285	82.255	204.512	281.658	236.758
Lampung	1.001.103	1.782.703	1.726.969	1.485.218	1.463.929	29.728	57.664	167.565	385.748	713.809	971.375	1.725.039	1.559.404	1.099.470	750.120
Bangka Belitung	-	-	-	94.334	206.705	-	-	-	120.027	114.379	-	-	-	-25.693	92.326
Kepulauan Riau	-	-	-	432.725	801.073	-	-	-	57.416	84.751	-	-	-	375.309	716.322
DKI Jakarta	1.791.635	2.565.158	3.141.214	3.541.972	4.077.515	1.322.215	400.767	1.052.234	1.836.664	3.000.081	1.659.420	2.164.391	2.088.980	1.705.308	1.077.434
Jawa Barat	371.448	963.870	2.391.890	3.271.882	5.225.271	1.192.987	1.487.935	1.751.879	2.046.279	2.514.344	-821.539	-524.065	640.011	1.225.603	2.710.927
Jawa Tengah	253.477	336.611	509.401	708.308	902.711	1.798.001	3.227.892	4.524.988	5.354.459	6.829.637	-1.544.524	-2.891.281	-4.015.587	-4.646.151	-5.926.926
DI Yogyakarta	99.782	175.789	264.842	385.117	562.384	266.933	253.447	508.215	784.154	901.539	-167.151	-77.658	-243.373	-399.037	-339.155
Jawa Timur	273.228	433.451	564.401	781.590	925.510	749.848	1.597.851	2.479.487	3.063.297	3.864.218	-476.620	-1.164.400	-1.915.086	-2.281.707	-2.938.708
Banten	-	-	-	1.758.408	2.766.750	-	-	-	475.440	552.987	-	-	-	1.282.968	2.213.763
Bali	22.010	63.365	122.899	221.722	406.921	57.072	117.828	221.599	250.724	269.245	-35.062	-54.463	-98.700	-29.002	137.676
Nusa Tenggara Barat	33.575	51.493	67.023	107.605	115.832	12.764	44.487	96.774	145.546	197.243	20.811	7.006	-29.751	-37.941	-81.411
Nusa Tenggara Timur	10.218	38.735	46.310	106.053	185.083	26.222	47.534	99.442	156.602	268.998	-16.004	-8.799	-53.132	-50.549	-83.915
Kalimantan Barat	20.805	104.856	196.876	269.722	293.229	35.109	72.358	116.735	154.620	226.982	-14.304	32.498	80.141	115.102	66.247
Kalimantan Tengah	50.078	140.042	240.374	423.014	526.737	11.514	25.086	47.700	53.291	92.935	38.564	114.956	192.674	369.723	433.802
Kalimantan Selatan	66.119	142.619	272.797	360.324	487.245	84.257	169.561	201.936	255.595	312.390	-18.138	-26.942	70.861	104.729	174.855
Kalimantan Timur	39.548	292.028	600.201	856.251	1.308.485	23.723	34.059	63.533	90.635	148.585	15.825	257.969	536.668	765.616	1.159.900
Sulawesi Utara	48.668	88.266	87.715	147.091	206.139	60.837	121.231	153.466	151.326	217.774	-12.169	-32.965	-65.751	-4.235	-11.635
Sulawesi Tengah	50.937	184.526	286.142	369.634	452.792	34.274	33.912	48.360	74.463	122.195	16.663	150.614	237.782	295.171	330.597
Sulawesi Selatan	66.984	108.038	219.666	266.055	364.288	241.726	511.725	641.961	897.616	1.409.614	-174.742	-403.687	-422.295	-631.561	-1.045.326
Sulawesi Tenggara	25.906	104.793	236.848	366.817	447.484	30.771	89.957	107.673	95.189	177.075	-4.865	14.836	129.175	271.628	270.409
Gorontalo	-	-	-	26.888	64.585	-	-	-	113.050	117.058	-	-	-	-86.162	-52.473
Sulawesi Barat	-	-	-	104.458	172.113	-	-	-	73.360	89.607	-	-	-	31.098	82.506
Maluku	42.228	124.894	184.892	75.540	123.165	36.613	64.725	95.361	157.066	211.980	5.615	60.169	89.531	-81.526	-88.815
Maluku Utara	-	-	-	60.834	107.681	-	-	-	43.712	62.813	-	-	-	17.122	44.868
Papua Barat	-	-	-	130.767	250.196	-	-	-	28.763	48.955	-	-	-	102.004	201.241
Papua	33.513	93.030	261.308	226.773	435.773	6.449	15.559	30.786	43.586	87.545	27.064	77.471	230.522	183.187	348.228

12.2 Migrasi Lima Tahun Yang Lalu (Migrasi Risen)

12.2.1 Migrasi Lima Tahun yang Lalu Antar Pulau

Migrasi lima tahun yang lalu atau sering disebut migrasi risen pada sub-bab ini dibedakan menurut migrasi risen masuk dan migrasi risen keluar. Pada tahun 2010 migrasi keluar dari Pulau Sumatera sebanyak 0,3 juta jiwa dan sebagian besar (87,67 persen) menuju Pulau Jawa, sisanya hampir merata ke pulau-pulau lain. Sebaliknya, migrasi keluar dari Pulau Jawa sebanyak 0,9 juta dan hanya 46,03 persen yang menuju Pulau Sumatera. Arus migrasi dari Pulau Kalimantan juga lebih banyak pergi menuju Pulau Jawa, yaitu dari 0,1 juta migran yang keluar dari Pulau Kalimantan 62,46 persen menuju Pulau Jawa. Sedangkan dari 0,1 juta migran yang berasal dari Pulau Sulawesi, sebagian besar menuju Kepulauan Lain (37,65 persen), Kalimantan (35,40 persen) dan Pulau Jawa (20,76 persen). Sementara itu 0,1 juta migran dari Kepulauan lain, 48,74 persen menuju Pulau Jawa, dan 28,35 persen menuju Pulau Sulawesi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 12.4.

Arus migrasi risen masuk ke pulau-pulau di Indonesia nampaknya dipengaruhi oleh jarak pulau itu sendiri. Pulau Sumatera yang letaknya paling dekat dengan Pulau Jawa, menyebabkan arus penduduk yang deras antara kedua pulau tersebut. Dari 0,5 juta migran yang masuk Pulau Sumatera sebagian besar (91,33 persen) datang atau berasal dari Pulau Jawa. Sedangkan migran yang masuk Pulau Jawa, 61,85 persen berasal dari Pulau Sumatera. Arus migrasi yang masuk ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Lain, persentase terbesar berasal dari Pulau Jawa dengan persentase masing-masing sebesar 69,80 persen, 47,18 persen dan 64,07 persen. Jadi sejak tahun 1980, migran yang masuk ke pulau-pulau selain Pulau Jawa sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, kecuali pada tahun 2000 migran yang masuk ke Pulau Sulawesi sebagian besar berasal dari Kepulauan Lain. Hal tersebut dapat dimaklumi karena Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya sehingga menjadi sasaran program transmigrasi, sedangkan pulau-pulau selain Pulau Jawa menjadi penerima dari program tersebut (Tabel 12.5).

Tabel 12.4 Persentase Migran Keluar Lima Tahun yang Lalu menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1980, 1990, 2000 dan 2010

Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu	Tahun	Tempat Tinggal Sekarang					Jumlah	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Migran Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumatera	1980	-	87,86	4,36	4,19	3,59	100,00	297.207
	1990	-	89,50	2,54	5,66	2,30	100,00	81.397
	2000	-	87,73	5,31	3,98	2,98	100,00	423.965
	2005	-	91,40	3,26	2,01	3,33	100,00	305.353
	2010	-	87,67	6,10	2,62	3,61	100,00	392.587
Jawa	1980	73,20	-	13,68	7,03	6,09	100,00	1.107.035
	1990	64,61	-	18,41	7,07	9,91	100,00	318.917
	2000	48,05	-	27,78	6,68	17,49	100,00	812.631
	2005	53,40	-	20,57	8,91	17,12	100,00	578.146
	2010	46,03	-	28,14	8,00	17,82	100,00	991.835
Kalimantan	1980	16,20	68,11	-	12,20	3,49	100,00	64.393
	1990	5,58	64,94	-	21,77	7,71	100,00	29.248
	2000	12,30	66,29	-	11,03	10,38	100,00	86.415
	2005	7,98	70,69	-	14,76	6,57	100,00	114.052
	2010	10,51	62,46	-	20,68	6,35	100,00	129.871
Sulawesi	1980	14,87	27,19	26,69	-	31,25	100,00	143.036
	1990	9,32	18,85	20,53	-	51,30	100,00	26.931
	2000	11,31	38,07	31,34	-	19,28	100,00	157.256
	2005	8,77	24,47	40,49	-	26,26	100,00	143.012
	2010	6,19	20,76	35,40	-	37,65	100,00	203.753
Kepulauan Lain	1980	10,81	54,94	3,48	30,77	-	100,00	139.796
	1990	6,85	23,91	22,10	47,14	-	100,00	29.443
	2000	8,47	40,79	11,16	39,58	-	100,00	280.210
	2005	8,23	53,18	7,32	31,27	-	100,00	141.267
	2010	9,37	48,74	13,54	28,35	-	100,00	182.446

Tabel 12.5 Persentase Migran Masuk Lima Tahun yang Lalu menurut Pulau Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu dan Pulau Tempat Tinggal Sekarang 1980, 1990, 2000 dan 2010

Tempat Tinggal Sekarang	Tahun	Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu					Jumlah	
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Kepulauan Lain	%	Migran Masuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumatera	1980	-	94,54	1,22	2,48	1,76	100,00	857.157
	1990	-	97,10	0,77	1,18	0,95	100,00	212.227
	2000	-	88,22	2,40	4,02	5,36	100,00	442.622
	2010	-	91,33	2,73	2,52	3,42	100,00	499.939
Jawa	1980	62,07	-	10,43	9,24	18,26	100,00	420.694
	1990	70,08	-	18,27	4,88	6,77	100,00	103.959
	2000	61,64	-	9,49	9,92	18,94	100,00	603.394
	2010	61,85	-	14,58	7,60	15,98	100,00	556.511
Kalimantan	1980	6,24	73,01	-	18,40	2,35	100,00	207.428
	1990	2,84	80,63	-	7,59	8,94	100,00	72.820
	2000	6,84	68,66	-	14,99	9,51	100,00	328.808
	2010	5,99	69,80	-	18,04	6,18	100,00	399.876
Sulawesi	1980	8,82	55,13	5,57	-	30,48	100,00	141.106
	1990	9,72	47,56	13,43	-	29,29	100,00	47.394
	2000	8,81	28,34	4,97	-	57,88	100,00	191.644
	2010	6,12	47,18	15,96	-	30,74	100,00	168.261
Kepulauan Lain	1980	8,53	53,93	1,80	35,74	-	100,00	125.082
	1990	3,78	63,78	4,55	27,89	-	100,00	49.536
	2000	6,51	73,24	4,62	15,63	-	100,00	194.009
	2010	5,14	64,07	2,99	27,80	-	100,00	275.905

12.2.2 Migrasi Lima Tahun yang Lalu Antar Provinsi

Tabel 12.6 menyajikan migrasi lima tahun yang lalu menurut provinsi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010 arus migrasi lima tahun yang lalu masih tetap didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa baik sebagai provinsi pengirim/asal (keluar) maupun sebagai provinsi penerima/tujuan (masuk). Untuk migrasi masuk lima tahun yang

lalu, Jawa Barat adalah provinsi terbanyak menerima migran yaitu lebih dari satu juta yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta (44,29 persen) dan Jawa Tengah (24,74 persen). DKI Jakarta merupakan provinsi kedua penerima migran terbesar yaitu sekitar 0,6 juta migran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah (33,91 persen) dan Jawa Barat (30,16 persen). Kemudian Banten dengan jumlah migran masuk 0,4 juta berasal dari Provinsi DKI Jakarta (38,32 persen) dan Jawa Barat (21,45 persen).

Untuk arus migrasi keluar, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling besar migrasi keluarannya yaitu diatas 0,9 juta dimana 26,00 persen menuju Jawa Barat, 22,01 persen menuju DKI Jakarta dan 9,46 persen menuju Banten. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi kedua terbesar migrasi keluarannya yaitu sekitar 0,8 juta yang sebagian besar (51,64 persen) menuju Jawa Barat dan 20,08 persen menuju Banten. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi ketiga terbesar, mempunyai migran keluar sekitar 0,6 juta yang tersebar ke DKI Jakarta sebesar 32,18 persen, Banten sebesar 16,66 persen dan Jawa Tengah sebesar 11,98 persen.

Tabel 12.6 Migrasi Lima Tahun yang Lalu 1980, 1990, 2000 dan 2010

Provinsi (1)	Migran Masuk					Migran Keluar					Migrasi Neto		
	1980	1990	2000	2010	1980	1990	2000	2010	1980	1990	2000	2010	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Nanggroe Aceh Darussalam	49.848	55.325	15.347	63.900	28.248	49.389	161.581	38.802	21.600	5936	-146.234	25.098	
Sumatera Utara	85.635	106.806	139.383	123.875	177.289	277.647	358.522	372.644	-91.654	-170.841	-219.139	-248.769	
Sumatera Barat	90.644	126.075	108.881	130.093	153.239	173.220	233.945	150.709	-62.595	-47.145	-125.064	-20.616	
Riau	93.991	242.512	358.297	294.870	53.757	92.903	88.708	125.814	40.234	149.609	269.589	169.056	
Jambi	105.874	135.319	109.230	110.027	36.178	64.033	83.346	52.689	69.696	71.286	25.884	57.338	
Sumatera Selatan	216.599	209.252	163.193	117.309	132.011	198.841	151.956	129.814	84.588	10.411	11.237	-12.505	
Bengkulu	64.583	82.223	68.776	47.740	15.899	28.595	35.831	26.910	48.684	53.628	32.945	20.830	
Lampung	494.991	208.518	148.934	92.352	45.594	135.907	149.260	154.420	449.397	72.611	-326	-62.068	
Bangka Belitung	-	-	36.510	60.721	-	-	33.773	17.054	-	-	2.737	43.667	
Keptulauan Riau	-	-	206.250	209.969	-	-	41.340	54.847	-	-	164.910	155.122	
DKI Jakarta	746.903	819.571	698.436	643.872	382.326	993.377	850.343	883.423	364.577	-173.806	-151.907	-239.551	
Jawa Barat	506.901	1.338.326	1.095.196	1.048.877	468.441	495.727	631.753	595.877	38.460	842.599	463.443	453.000	
Jawa Tengah	174.445	379.656	349.231	301.330	908.302	1.159.694	1.017.494	979.860	-733.857	-780.038	-668.263	-678.530	
DI Yogyakarta	94.049	160.292	196.573	227.277	72.933	120.777	129.530	103.492	21.116	39.515	67.043	123.785	
Jawa Timur	193.918	319.919	178.504	242.974	570.555	647.348	529.037	528.370	-376.637	-327.429	-350.533	-285.396	
Banten	-	-	620.115	464.993	-	-	207.358	192.983	-	-	412.757	272.010	
Bali	36.132	64.852	85.122	102.338	52.404	56.127	47.353	41.216	-16.272	8.725	37.769	61.122	
Nusa Tenggara Barat	22.519	34.851	56.236	47.561	38.987	36.853	50.714	40.982	-16.468	-2.002	5.522	6.579	
Nusa Tenggara Timur	24.195	23.819	27.983	49.252	34.713	45.620	54.989	67.484	-10.518	-21.801	-27.006	-18.232	
Kalimantan Barat	37.719	42.929	48.850	42.563	28.431	44.686	45.682	42.144	9.288	-1.757	3.168	419	
Kalimantan Tengah	47.917	95.827	124.350	122.882	15.989	37.015	24.903	34.506	31.928	58.812	99.447	88.376	
Kalimantan Selatan	59.691	77.906	88.111	103.368	46.061	76.447	62.612	55.292	13.630	1.459	25.499	48.076	
Kalimantan Timur	108.523	190.393	152.986	213.471	20.334	68.192	42.817	73.039	88.189	122.201	110.169	140.432	
Sulawesi Utara	44.146	33.822	53.873	47.955	38.259	51.272	38.830	45.473	5.887	-17.450	15.043	2.482	
Sulawesi Tengah	80.515	68.694	74.972	61.874	17.282	28.038	30.555	39.174	63.233	40.656	44.417	22.700	
Sulawesi Selatan	56.972	112.390	80.648	120.551	147.855	161.050	185.215	208.570	-90.883	-48.660	-104.567	-88.019	
Sulawesi Tenggara	49.408	70.154	107.372	64.010	29.575	36.681	22.251	42.613	19.833	33.473	85.121	21.397	
Gorontalo	-	-	9.193	26.608	-	-	33.448	16.820	-	-	-24.255	9.788	
Sulawesi Barat	-	-	33.739	37.119	-	-	19.078	20.053	-	-	14.661	17.066	
Maluku	44.017	67.575	18.446	29.149	26.995	38.899	92.781	30.179	17.022	28.676	-74.335	-1.030	
Maluku Utara	-	-	14.759	24.375	-	-	28.480	14.887	-	-	-13.721	9.488	
Papua Barat	-	-	25.879	53.818	-	-	17.623	16.835	-	-	8.256	36.983	
Papua	31.520	70.246	49.681	66.475	16.191	31.631	24.329	38.803	15.329	38.615	25.352	27.672	

Dari Tabel 12.6 juga terlihat bahwa sekitar separuh provinsi migrasi neto lima tahun yang lalunya positif atau migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Dari beberapa provinsi yang mempunyai migrasi neto positif ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang migrasi neto positifnya paling besar yaitu 0,4 juta kemudian Banten dengan 0,2 juta. Sedangkan yang paling kecil adalah Kalimantan Barat sebesar 0,0004 juta migran.

Provinsi-provinsi yang migrasi neto lima tahunnya negatif atau migrasi keluar lebih besar dari migrasi masuk merupakan provinsi-provinsi pengirim migran. Dari beberapa provinsi yang migrasi netonya negatif, Jawa Tengah merupakan provinsi yang migrasi neto negatifnya paling besar yaitu 0,6 juta, kemudian Jawa Timur yang mempunyai migrasi neto negatif sekitar 0,3 juta dan Sumatera Utara dengan 0,2 juta migran neto negatif. Sedangkan provinsi yang migrasi neto negatifnya terkecil adalah Provinsi Maluku dengan 0,001 juta dan Sumatera Selatan dengan 0,01 juta migran neto negatif. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12.6.

XIII. KESIMPULAN

Berdasarkan data migrasi seumur hidup per pulau, sejak tahun 1971 sampai tahun 2010, ternyata Pulau Jawa tetap merupakan pulau pengirim migran terbesar di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, dengan volume yang terus meningkat. Pada periode tersebut migran keluar dari Pulau Jawa sebagian besar menuju ke Pulau Sumatera, namun demikian sejak tahun 1990 penyebaran penduduk dari Pulau Jawa tidak lagi memfokus ke Sumatera tetapi sudah mulai merata ke pulau-pulau lainnya.

Pulau Sumatera adalah pulau kedua sebagai pengirim migran terbesar, dimana sebagian besar migran mempunyai daerah tujuan Pulau Jawa. Seperti halnya migran dari Sumatera, migran dari Pulau Kalimantan sebagian besar juga menuju ke Pulau Jawa. Berbeda dengan arus migran dari pulau-pulau lain, arus migran keluar dari Pulau Sulawesi dan Kepulauan Lain tersebar hampir merata ke pulau-pulau lainnya.

Hasil SP71 dan SP80 menunjukkan bahwa berdasarkan migrasi seumur hidup tiga propinsi penerima migran masuk terbesar berturut-turut adalah Propinsi DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Pada tahun 1990 urutan tersebut berubah menjadi pertama Propinsi DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, dan ketiga Lampung. Pada tahun 2000, Propinsi DKI Jakarta tetap di urutan pertama, diikuti oleh Jawa Barat dan Banten di posisi kedua dan ketiga. Sedangkan pada tahun 2010, Propinsi Jawa Barat menggeser DKI Jakarta sebagai propinsi penerima migran masuk terbesar, kemudian diikuti DKI Jakarta dan Banten di posisi kedua dan ketiga. Jadi untuk pertama kalinya sejak 39 tahun yang lalu, DKI Jakarta bukan lagi menjadi tujuan migran.

Sebagai daerah pengirim migran, tiga propinsi di Pulau Jawa yang penduduknya padat yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, berturut-turut adalah propinsi pengirim migran terbesar pertama, kedua dan ketiga pada tahun 1971. Pada tahun 1980, 1990 dan 2000 komposisi tersebut berubah menjadi Jawa Tengah pada urutan pertama, Jawa Timur kedua,

dan Jawa Barat ketiga. Pada tahun 2010, Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap di posisi pertama dan kedua, diikuti Propinsi DKI Jakarta di urutan ketiga.

Migrasi lima tahun yang lalu antar pulau baik masuk maupun keluar tetap didominasi oleh Pulau Jawa. Setiap pulau selain Pulau Jawa menerima migran terbesar dari Pulau Jawa, sebaliknya migran yang masuk Pulau Jawa sebagian besar berasal dari Pulau Sumatera. Pola ini terlihat sejak tahun 1971 hingga tahun 2010.

Pola migrasi risen antar propinsi sedikit mengalami perubahan dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Ada beberapa propinsi yang pada tahun 2000 masih menjadi propinsi penerima migran, namun pada tahun 2010 berubah menjadi propinsi pengirim migran, antara lain Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Maluku Utara.

Pola migrasi neto negatif terbesar lima tahun yang lalu terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan yang terkecil terdapat di Maluku. Di lain pihak propinsi-propinsi yang migrasi neto lima tahunnya positif pada tahun 2010 terbesar di Jawa Barat dan terkecil di Kalimantan Barat.

Analisa migrasi pada penulisan ini hanya menyajikan informasi yang terbatas tentang volume, pola serta arus migrasi seumur hidup dan risen, namun demikian diharapkan tulisan ini dapat menggugah minat para peneliti untuk menguraikan seluk beluk perpindahan penduduk Indonesia secara lebih mendalam. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi latar belakang dan dasar analisa perpindahan penduduk tahap berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 1983, *"Perpindahan Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil SP80"*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1984, *"Analisa Migrasi Indonesia Berdasarkan Data SP71 dan SP80"*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1994, *"Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi"*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2001, *"Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2006, *"Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2005"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2011, *"Migrasi Internal Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Henry.S.Shryok, Jacob S.Siegel and Associate, 1980, *"The Methods and Materials of Demografi"*, US Department of Commerce, Washington.D.C, USA.
- Ida Bagus Mantra, Dr,1987, *"Migrasi Penduduk di Indonesia Berdasarkan Hasil SUPAS 1985"*, BPS, Jakarta
- United Nation, 1970, *"Methods of Measuring Internal Migration"*, Manual VI, United Nations, New York.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

ISSN 2302-8513



9 772302 851000